



**PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN**

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN  
TAHUN 2024**

Jalan Ahmad Yani No. 74 Singkawang Kode Pos : 79123

Telepon (0562) 638701 Faksimile (0562) 638701

Email : [disperkimta@singkawangkota.go.id](mailto:disperkimta@singkawangkota.go.id)

Website : [disperkimta.singkawangkota.go.id](http://disperkimta.singkawangkota.go.id)

# KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja sebagai dokumen Perencanaan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan alat untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah dan harus terjalin keselarasan dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD)/Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2024 yang menggambarkan rencana target capaian kinerja, pagu dana Indikatif, dan prakiraan maju serta sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2024. Renja merupakan penjabaran operasional tahunan dari dokumen perencanaan jangka menengah Renstra/Perubahan Renstra Perangkat Daerah, dan harus terjalin keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti Rencana pembangunan Daerah (RPD)/Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan sebagaimana tercantum dalam RKPD tahun anggaran 2024 serta harus bersinergi dengan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat. Disamping itu pula Renja juga mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu (tahun 2023).

Renja Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke 2 (dua) dari periode Renstra/Perubahan Renstra DISPERKIMTA Tahun 2023-2026. Dalam Renja Perubahan Tahun 2024 penyusunan program dan kegiatan/sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah/Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang menjadi acuan/pedoman pada Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

**Tujuan ke - 3 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan**

Sasaran ke-1 : Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.

Sasaran ke-2 : Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan

Sasaran Strategis Perangkat Daerah Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang pada tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

1) Meningkatnya rumah Layak Huni.

Indikator Sasaran : Persentase Rumah layak Huni.

Dengan kebijakan antara lain:

- Penanganan, Penyediaan dan fasilitasi Rumah layaa huni bagi korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah sebagai Upaya Pemenuhan SPM bidang Perumahan Rakyat, dan
- Pembangunan, Peningkatan Lingkungan Perumahan yang layak, sehat, aman, yang didukung prasarana dan sarana dan utilitas umum (PSU) lingkungan Perumahan yang memadai sebagai penunjang fungsi hunian.

2) Meningkatnya Penanganan Luas kawasan Permukiman Kumuh.

Indikator Sasaran : Persentase Penanganan Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha.

Dengan kebijakan antara lain:

- Perencanaan, Penataan dan Peningkatan infrastruktur perumahan permukiman kumuh, sehingga tetap terjaga kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman, terutama prasarana sarana dasar (PSD) dan Prasarana sarana Utilitas Umum (PSU) lingkungan perumahan permukiman kumuh menjadi layak huni, sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan sebagai tempat tinggal, tempat hunian dan tempat berkarya dan produktif.
- Peningkatan akses rumah tangga bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap kondisi rumah yang tidak layak huni (RTLH) terutama yang berada pada deliniasi kawasan permukiman kumuh dan diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan memberikan Bantuan Stimulasi Rumah Swadaya (BSRS) terhadap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sehingga dapat mencegah tumbuh dan berkembangnya slump area (kumuh baru).
- Pencegahan luas area kawasan permukiman yang berpotensi permukiman kumuh dengan pembangunan/ Peningkatan dan Pemeliharaan terhadap Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) terutama terhadap nfrastruktur perumahan permukiman di luar kawasan permukiman kumuh yang teridentifikasi berpotensi menjadi kawasan permukiman kumuh baru, dilakukan upaya pencegahan/peningkatan infrastruktur PSU perumahan permukiman pada kawasan permukiman berpotensi slump area (kumuh baru) agar tidak memicu meluas dan bertambahnya kawasan permukiman Kumuh.

3) Meningkatnya Penanganan Sengketa Tanah Garapan.

Indikator Sasaran : Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

Dengan kebijakan antara lain:

- Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yaitu Pengelolaan, Pengendalian, Pemanfaatan Penggunaan Tanah sesuai kewenangan yang dilimpahkan.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang merupakan salah satu Dinas Pengampu/Pengemban yang menangani Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu urusan Pemerintahan Wajib bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu urusan Pemerintahan Wajib bidang Pertanahan.

Harapan kami, semoga Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Dinas Perumahan, Permukiman dan pertanahan dapat mencapai sasaran yang menjadi prioritas Pembangunan pada RKPD Tahun 2024 dan dapat mencapai target pada Renstra/ Perubahan Renstra DISPERKIMTA Tahun 2023-2026 sehingga mencapai target kinerja yang diharapkan sebagaimana tercantum pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD)/Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang ini masih terdapat kekurangan dalam penyajian data, kelengkapan data maupun akurasi data, untuk itu kritik dan saran yang membangun kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini.

Singkawang, 25 Juli 2024

Kepala Dinas-Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Kota Singkawang



NIP. 19781209 200604 1 009

# DAFTAR ISI

## Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika .....	7
<b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU</b>	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	26
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.	66
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	73
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	90
<b>BAB III : TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH</b>	97
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	97
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	100
3.3. Program dan Kegiatan .....	102
<b>BAB IV : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	121
<b>BAB V : PENUTUP</b> .....	121
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Berpedoman pada kerangka umum perencanaan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang termaktub dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan..

Prinsip-prinsip didalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Rumusan program/kegiatan didalam renja Perangkat Daerah didasarkan atas

pertimbangan urutan urusan pelayanan Wajib / Pilihan urusan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah.

4. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan perkeluaran dan total kebutuhan dana yang menunjukkan prakiraan maju tahun  $n$  dan  $n+1$ .

Kota Singkawang termasuk dari sejumlah daerah otonom yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPD sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025. RKPD Kota Singkawang Tahun 2025 merupakan pelaksanaan perencanaan tahun kedua dari Perubahan RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD/RPD, Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, RKA-SKPD, KUA-PPAS, dan RAPBD.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan kota Singkawang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA). yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan, permukiman dan pertanahan, dan merupakan salah satu Dinas pengampu/pengembangan yang menangani Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan Pelayanan Dasar dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta urusan Wajib Pertanahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pada bulan April Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan Penataan Kelembagaan maka diterbitkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang, terakhir pada tanggal 28 bulan Desember Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan Penataan Kelembagaan dan diterbitkan Peraturan Walikota nomor 108 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan,

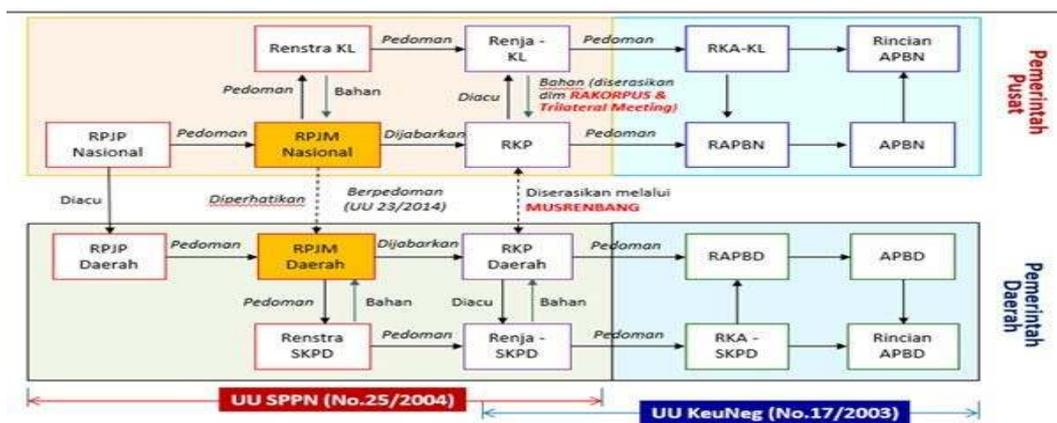
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 67. Serta di ikuti pula dengan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 061/486/setda.or-a Tahun 2021. Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub-Subtansi dan Sub-Koordinator Di Lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang

. Dokumen Renja Tahun Anggaran 2025 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang mengacu pada Perubahan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 yang merupakan penjabaran operasional tahun ke 2 (dua). Disamping itu, Renja DISPERKIMTA harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus Pembangunan Daerah tahun 2025, terjalin keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti Perubahan RPD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan sebagaimana tertuang dalam RKPD tahun anggaran 2025, serta bersinergi dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat. Disamping itu penyusunan Renja bepedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen RKPD merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD Kota Singkawang Tahun 2025 berpedoman pada RPD Kota Singkawang Tahun 2023-2026, RPJMD Perubahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Pada lingkup pemerintah daerah, RKPD digunakan sebagai pedoman dalam penyempurnaan Rancangan RENJA (Rencana Kerja) PD menjadi RENJA Perangkat Daerah.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RKPD Kota Singkawang, dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah dan dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan system keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1

Gambar 1.1



## 1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Nomor 47, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1419);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, (Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang nomor 51);
22. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 11 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 11);
23. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 11.1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Perubahan Kota Singkawang Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 11.1);
24. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 12.1 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023–2026 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 12.1);
25. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor );
26. Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2023– 2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang adalah :

1. Menjabarkan arah Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang untuk periode 1 tahun yaitu tahun 2025, yang merupakan landasan dan sekaligus tolak ukur kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dalam arti menggambarkan capaian kinerja yang disusun mengacu pada RKPD tahun berkenaan.
2. Mengukur dan merumuskan kebutuhan anggaran/dana untuk memenuhi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang selama satu tahun berjalan tahun 2025.
3. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2024. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang adalah :

1. Tersedianya dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Sebagai Dokumen Perencanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Singkawang.

2. Mendeskripsikan tentang program kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dalam menciptakan kepastian dan perencanaan program kegiatan kerja Dinas dalam periode 1 tahun (tahun 2025) sehingga terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam Perencanaan alokasi sumber daya dan sumber dana.
3. Merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

#### **1.4. Sistematika Renja**

Renja Tahun 2025 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dibagi menjadi 5 bab dengan penyajian sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
- 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Landasan Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja
  - 1.4. Sistematika Renja
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu
  - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH**
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Daerah
  - 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
  - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAN PERANGKAT DAERAH**
- BAB V : PENUTUP**
- LAMPIRAN – LAMPIRAN

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RECANA KERJA SKPD TAHUN LALU**

#### **1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu**

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 (tahun Berjalan) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan pada *(Lampiran Tabel 2.1 Form Tabel-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 tahun berjalan* sebagai berikut :

Tabel 2.1 (Form Tabel T-C.29.)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)\*

Pemerintah Kota Singkawang

Dinas Perumahan,Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah	
								Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		8 = (7/6)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2024
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.	04.			URUSAN WAJIB DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
				SEKRETARIAT DISPERKIMTA									
1.	04.	01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Pelaksanaan Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	400 %	-	100	100	100	100	200	50,00
1.	04.	01.	2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400 %	-	100	100	100	100	200	50,00
			000 1	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2 Dokumen)	9 Dokumen		2	2	100	2	4	44
			000 2	Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (1 Dokumen)	5 Dokumen	-	1	1,0	100	1	2,0	40,00
			000 3	Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (1 Dokumen)	5 Dokumen	-	1	1,0	100	1	2,0	40,00

				000 4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (1 Dokumen)	5 Dokumen		1	1,0	100	1	2,0	40,00
				000 5	Sub Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (1 Dokumen)	5 Dokumen		1	1,0	100	1	2,0	40,00
				000 6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (5 Dokumen)	25 Dokumen		5	5,0	100	5	10	40,00
						Jumlah Laporan (LKPJ-LPPD, SPM, RFK, PERJANKIN, Realisasi PERJANKIN) Dokumen	25 Dokumen		5	5,0	100	5	10	40,00

Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah		
								Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2024	Tingkat Realisasi Target Rentra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)	
				000 7	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (5 Dokumen)	16 Dokumen		5	5,0	100	5	10	63
1.	04.	01.	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan 1. Perangkat Daerah	400 %	-	100	100	100	100	200	50,00
				000 1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1) Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 orang/48 Bulan	-	36 Orang/12 Bulan	36 Orang/12 Bulan	100	36 Orang/12 Bulan	72 Orang/12 Bulan	50,00

				000 2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (1Dokumen) 1)	5 Dokumen	-	1	1	100	1	2	40,00
				000 3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (1 Dokumen)	5 Dokumen	-	1	1	100	1	2	40,00
				000 4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (1 Dokumen)	5 Dokumen	-	1	1	100	1	2	40,00
				000 5	Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1) Jumlah dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun1 Dokumen	5 Dokumen	-	1	1	100	1	2	40,00
				000 6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 1) Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (2	8 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1.	04.	01.	2.03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Dareah	400 %	-	100	100	100	100	200	50,00
				000 1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (1 Dokumen) 1)	4 Dokumen	-	1	1	100	1	2	50,00
				000 3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (1 Dokumen) 1)	4 Laporan		1	1	100	1	2	50,00
						Jumlah Laporan Usulan Penghapusan Aset yang tidak bisa digunakan (Rusak sedang/Berat) pada SKPD	4 Laporan		1	1	100	1	2	50,00
				000 5	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1) Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	48 Laporan		12	12	100	12	24	50,00
				000 6	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		1	1	100	1	2	50,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah	
									Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		8 = (7/6)	Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2024
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.	04.	01.	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Admintrasi Umum Perangkat Daerah	400 %	-	100	100	100	100	200	50,00
				000 1	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1)	4 Paket	-	1	1	100	1	2	50,00
				000 2	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1)	8 Paket	-	2	2	100	2	4	50,00
						Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 2)	400 %		100	100	100	100	200	50,00
				000 3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1)	4 Paket	-	1	1	100	1	2	50,00
				000 5	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 1)	4 Paket	-	1	1	100	1	2	50,00
				000 6	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	-	1	1	100	1	2	50,00
					Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

				000 9	konsultasi ke Dalam dan luar daerah	1)	48	Laporan	-	12	12	100	12	24	50,00
				001 0	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1)	4	Dokumen	-	1	1	100	1	2	50,00
				001 1	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1)	4	Dokumen	-	1	1	100	1	2	50,00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah	
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		8 = (7/6)	Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2024
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1. 04. 01. 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400 %	-	100	100	100	100	200	50,00
	000 1 Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	-	12	12	100	12	24	50,00
	000 2 Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1)	48 Laporan	-	12	12	100	12	24	50,00
	000 4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	-	12	12	100	12	24	50,00
		- Cakupan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	400 %	-	100	100	100	100	200	50,00
1. 04. 01. 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400 %	-	100	100	100	100	200	50,00
	000 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1)	4 Unit/48 bulan	-	1	1	100	1	1	50,00
	000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajakdan Perizinannya 1)	19 Unit	-	5	5	100	5	10	50,00
	000 9 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	-	1	1	100	1	2	50,00

				0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Peralatan gedung Kantor) yang dipelihara/direhabilitasi	320	Unit		80	80	100	80	160	50,00
1.	04				<b>URUSAN WAJIB DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>										
					<b>BIDANG PERUMAHAN RAKYAT</b>										
1.	04	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	1 <b>Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah yang ditangani</b>	400	%	-	100	100	100	100	200	50,00
						2 <b>Persentase Pendataan, inventarisasi/identifikasi dan DED Perumahan Permukiman terdampak Bencanadan terdampak Relokasi Program Pemerintah</b>	100	%		50	50	100	-	-	-
1.	04.	02	2.01		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1, Cakupan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	400	%	-	100	100	100	100	200	50,00
				0006	Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1) Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	4	Dokumen	-	1	1	100	1	2	50,00
				0008	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Jumlah Dokumen Bakal Calon Penerima Rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/kota	4	Dokumen	-	-	-	-	1	1	25,00
				0010	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Jumlah Dokumen Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kab/Kota	4	Dokumen	-	-	-	-	1	1	25,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah	
									Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		8 = (7/6)	10 = (5+7+9)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1	04	02	2	03.	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1.	400 %	-	100	100	100	100	200	50,00
1	04	02	2	03.	000 1	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 1) Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	24 Unit Rumah	-	6	6	100	6	12	50,00
				02	Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1) Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah/Rumah Khusus Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4 Dokumen	-	1	1	100	1	2	50	
				0007	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1) Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	24 Rumah Tangga	-	-	-	-	6	6	25,00	
				0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terdampak Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota 1) Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	6 Rumah Tangga	-	-	-	-	1	1	16,67	
				001 2	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1) Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	4 Unit Rumah	-	2	2	100	1	3	75,00	
1.	04	05			<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b> 1. Sarana, dan Utilities Umum (PSU)	<b>Persentase Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana, dan Utilities Umum (PSU)</b>	79,27 %	-	78,52	78,52	100,00	78,75	78,75	99,34
					2. (Perumahan Pengembang) yang ditangani	<b>Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang ditangani</b>	87,55 %		15	24	100	55,47	55,47	63,36

1.	04.	05	2.01		Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan Perencanaan, Pembangunan/Peningkatan Prasarana, Saranadan Utilites Umum (PSU) Lingkungan Perumahan	400	%	-	100,00	100	100	100,00	200	50,00
				000 1	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1) Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	4	Dokumen	-	1	1	100,00	1	2	50,00
				000 2	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 1)	125	Lokasi/Paket	-	33	33	100	35	68	50,00
				000 3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1)	4	Laporan	-	1	1	100	1	2	50,00
				001 0	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 1)	4	Laporan	-	1	1	100	1	2	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah					
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)				
	<b>BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN</b>													
1.	04.	03			<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>									
					1 Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani	69,95 %	-	50,08	50,08	100	53,84	53,84	77,00	
					2 Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)	100 %	-	25,00	25,00	100	50,00	50,00	50,00	
1	04	03	2.01		Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Cakupan Izin/Rumusan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	200 %	-	-	-	100	100	50,00	
1	04	03	2.01	0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	2 Laporan	-	-	-	1	1	50,00	
1	04	03	2.02		Kegiatan Penataan dan Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Cakupan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	200 %	-	-	-	100	100	50,00	
1	04	03	2.02	0008	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	2 Dokumen	-	-	-	1	1	50,00	
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	-	-	-	1	1	100,00	
1.	04.	03	2.03		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	1. Luas Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan infrstruktur Kawasan Permukimannya	8,63 Ha	-	2	2,00	100	2	4	46,35

					(Sepuluh) Ha										
						2. Cakupan Penanganan Jumlah Unit RTLH Bagi MBR pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)	400	%	-	100	100	100	100	200	50,00
				01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1) Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	12	Dokumen	-	4	4	100	-	8	-
				02	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	48	Unit	-	17	17	100	12	29	50,00
						* Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapatkan bantuan Rehabilitasi pada Kawasan Permukiman Kumuh (DAU)	48	Unit/KK	-	17	17	100	12	29	50,00
						- Jumlah Fasilitas/Monitoring Rumah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi (DAU)	4	Dokumen/Kegiatan	-	1	1	100	1	2	50,00
				04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	4	Laporan	-	-	-	-	1	1	25,00

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah					
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		8 = (7/6)	Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2024	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)				
	06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh Yang diRemajakan/ Dipugar 1)	8,94 Ha	-	2	2	100	2	4	46,00			
1.	04.	04	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luasdi bawah 10 Ha yang ditangani</b> 1	21,62 %	-	5,4	5,4	100	10,81	10,81	50,00		
				<b>Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)</b> 2	15,14 %	-	3,79	3,79	100	7,57	7,57	50,00		
1.	04.	04	2.03	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota 1.	20 Ha	-	5	5	100	5	10	50	
				01	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak LayakHuni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 1).	99 Unit	-	8	8	100	33	41	41
					* Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi/Pembangunan baru (DAU)	99 Unit	-	8	8	100	33	41	41	
					Jumlah Fasiltasi/Monitoring dan BOP Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi/Pembangunan baru (DAU)	4 Dokumen	-	1	1	100	1	2	50,00	

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah		
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		8 = (7/6)	Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2024	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)	
	<b>BIDANG PERTANAHAN</b>										
2	10 04	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	1 <b>Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi</b>	400 %	-	100	100	100	100	200	50,00
2	10 04 201	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. <b>Cakupan Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi/ditangani</b>	400 %	-	100	100	100	100	200	50,00
		02 Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	1) Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen/Laporan Berita Acara	-	1	1	100	1	2	50,00
			- Jumlah Dokumen Pendampiangn Hukum (Litigasi/Non Litigasi)	4 Dokumen/Laporan Berita Acara	-	1	1	100	1	2	50,00
2	10 05	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	1. <b>Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan</b>	400 %	-	100	100	100	100	200	50,00
2	10 05 201	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1. Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	400 %	-	100	100	100	100	200	50,00
		02 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19 Dokumen	-	4	4,00	100	4	8	42,11
			# Cakupan Ganti Rugi/Santunan Tanah/Kerohiman yang berdampak Pembangunan	400 %	-	100	100,00	100	100	200,00	50,00
			- Jumlah Dokumen Appraisal Penilaian Tanah	4 Dokumen	-	1	1,00	100	1	2,00	50,00

						Jumlah SK Tim Verifikasi, Persiapan dan - Pelaksanaan Pengadaan Tanah (3 SK Walikota)	1	Dokumen	-	1	1,00	100	1	2	50-
						Jumlah Pengumuman dimedia cetak mengenai - Pengadaan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	-	1	1,00	100	1	2	50-
2	10	08			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>1. Persentase inventarisasi Tanah Kosong dan Kebijakan Pemanfaatan</b>	<b>400</b>	<b>%</b>	-	100,00	100	100	-	100	25
2	10	08	202		Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	1. Cakupan Inventarisasi/terdata dan kebijakan Pemanfaatan Tanah Kosong	400	%	-	100	100	100	-	100	33,33
				01	Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong	1) Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	4	Dokumen	0	1	1	100	-	100	33 -

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah		
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2024	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)	
		Jumlah Draft Peraturan (Perda/Perwako) - Pemanfaatan Tanah Kosong yang disusun	1 Dokumen		1	1	100	-	200	-	
		Jumlah Dokumen Survey Lapangan dalam - keperluan Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen		0	1	100	-	30 0	-	
2	10 09	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	1. <b>Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)</b>	400 %	-	100,00	100	100	-	100	25-
2	10 09 201	Kegiatan Penertiban Izin Membuka Tanah	1) Cakupan Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara	400 %	-	100	100	100	-	100	25
		01 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah.	1) Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	4 Dokumen		4	4,00	100	-	4	100
			Jumlah Dokumen Pengukuran Pertanahan ( - Pendataan PTSL)	4 Dokumen		1	1,00	100	-	1	25
			- Jumlah Dokumen Pemetaan Pertanahan	4 Dokumen		-1	100	100	-	1 -	25
		02 Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara.	1) Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	4 Dokumen		1	1,00	100	-	1 -	25
			Jumlah Dokumen Database SKT/SPT yang - terinput pada Aplikasi SIPETA	1 Dokumen		1	1,00	100	-	1-	21
			Jumlah Lahan yang dilaksanakan/difasilitasi bantuan operasional Pendaftaran Tanah SismatisLengkap	3.260 Persil		225	225	100	-	2250	32

						(PTSL)									
2	10	10			<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Persentase Luas Wilayah Yang Sudah 1. Terpetakan</b>	<b>36</b>	<b>%</b>	<b>- 7</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>200,00</b>	<b>52,78</b>	
2	10	10	201		Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1. Cakupan Penggunaan/Pemanfaatan Tanah	400	%	- 100	100	100	100	200	50,00	
				01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi dan 1) Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	19	Laporan/Dokum en	4	4,00	100	5	9,00	47,37	
						- Jumlah wilayah Bidang Tanah yang terpetakan	4	Dokumen	1	1,00	100	1	2,00	50,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah	
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2024	Tingkat Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah Dokumen Pengukuran dan Pemetaan - Bidang Tanah	4 Dokumen		1	1,00	100	1	2,00	50,00
		Jumlah Dokumen Peraturan Wali Kota tentang - Pengadaan Tanah Skala Kecil	4 Dokumen		1	1,00	100	1	2,00	50,00
		Jumlah Software Informasi Pertanahan yang - dilaksanakan pemutakhiran pemeliharaan (berkala)	4 Dokumen		1	1,00	100	1	2,00	50,00
	02	Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 1) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk menetapkan Zonasi Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	19 Dokumwn		1	1,00	100	5	0	36,84
		Jumlah Nilai Lahan Wilayah Administrasi - kelurahan di Kota Singkawang yang terinventarisasi	12/4 Kelurahan/ Dokumen		9	9	100	1	9	100
		Jumlah Dokumen /laporan Konsolidasi dan - Penataan/Pengamanan Tanah Aset Milik Pemerintah Daerah	3 Dokumen		0	0	0	1	3	
		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi kegiatan - Pertanahan	1 Dokumen		0	0	0	0	0	100

## 1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NPSK dan SPM, maupun terhadap IKK. Jenis indikator yang di kaji si sesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Dalam lampiran Permendagri No.86 Tahun 2017 Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah adalah indikator kinerja pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berkenaan. Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat menggunakan formula yang di disajikan dalam tabel Lampiran peraturan menteri Dalam Negeri No.86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Lampiran indikator dapat diperbaharui oleh Pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun capaian kinerja sampai dengan tahun 2024 terhadap Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi/Renstra DISPERKIMTA Tahun 2023-2026 yang mana baru dimulai pada tahun 2023 ini, maka menguraikan evaluasi Capaian Renstra tahun 2021-2023 seperti pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2 (Form Tabel. T-C.30)

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

NO	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis	KET
				Tahun	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>													
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar</b>													
<b>A.</b>	<b>Bidang Perumahan Rakyat</b>												
I	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman												
	1 Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota.	100%		100,00%	100,00%	100,00%	0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		SPM Perumahan Rakyat Permen PUPR No: 29/PRT/M/2018

NO	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis	KET
				Tahun	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%		100,00%	100,00%	100,00%	0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		SPM Perumahan Rakyat Permen PUPR No: 29/PRT/M/2018
3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)		%	92,25%	99,32%	99,43%	97,91%	99,20%	99,32%	99,43%	99,55%		Permendagri 86/2017
4	Persentase Rumah Layak Huni			92,25%	99,32%	99,43%	97,91%	99,20%	99,32%	99,43%	99,55%		IKU DISPERKIMTA
5	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah yang ditangani			-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%		RENSTRA PERUBAHAN
6	Persentase Pendataan, inventarisasi/identifikasi dan DED Perumahan Permukiman terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah			-	50%	-	-	50%	-	-	-		RENSTRA

NO	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis	KET
				Tahun	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Persentase lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)			-	78,52%	-	-	79,71%	-	-	-		RENSTRA
8	Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan aset PSU) yang ditingkatkan/dipelihara			-	15%	30%	-	45,45%	-	-	-		RENSTRA
9	Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang ditangani			-	39,43%	55,47%	-	-	55,47%	71,51%	87,55%		RENSTRA PERUBAHAN
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar</b>													
<b>B</b>	<b>Bidang Kawasan Permukiman</b>												
II Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman													
10	Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10			-	47,74%	-	35,02%	47,74%	-	47,74%	-		IKU DISPERKIMTA

NO	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis	KET
				Tahun	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ha yang ditangani												
11	Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				-	2,60%	-	-	2,60%	-	2,60%	-	RENSTRA
12	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani				-	12,50%	-	-	12,5%	-	13%	-	RENSTRA
13	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				-	12,50%	-	-	12,5%	-	13%	-	RENSTRA
14	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni				-	1,57%	-	-	1,57%	-	1,57%	-	RENSTRA
15	Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha				-	15,06%	-	-	15,06%	-	15,06%	-	RENSTRA

NO	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis	KET
				Tahun	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan			-	49,92%	46,16%	-	49,92%	46,16%	49,92%	30,05%		IKU KOTA (RPD)
17	Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani			-	50,08%	53,84%		50,08%	53,84%	50,08%	69,95%		IKU DISPERKIMTA
18	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani			-	50%	54%		50,08%	53,84%	50,08%	69,95%		RENSTRA PERUBAHAN
19	Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha)			-	25%	50%		25%	50%	75%	100%		RENSTRA PERUBAHAN
20	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani			-	5,40%	10,81%		5,40%	10,81%	16,21%	21,62%		RENSTRA PERUBAHAN

NO	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis	KET
				Tahun	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha)				3,79%	8%		3,79%	7,57%	11,36%	15,14%		RENSTRA PERUBAHAN
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>													
<b>C</b>	<b>Bidang Pertanahan</b>												
III Pertanahan													
22	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan			-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%		RENSTRA
23	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi/ditangani			-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%		RENSTRA PERUBAHAN
24	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan			-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%		RENSTRA PERUBAHAN

NO	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis	KET
				Tahun	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)		
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan			-	7%	12%	-	7%	12%	24%	36%		RENSTRA PERUBAHAN
26	Persentase terinventarisasi dan Termanfaatkannya Tanah Kosong			-		33,33%	-	-	33,33%	66,66%	100%		RENSTRA PERUBAHAN
27	Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)			-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%		RENSTRA PERUBAHAN
28	Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa			-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%		RENSTRA PERUBAHAN
29	Persentase Sistem Informasi Tanah Terpadu yang dipelihara			-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%		RENSTRA PERUBAHAN
30	Persentase Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan yang difasilitasi ditangani/diselesaikan			-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%		RENSTRA PERUBAHAN

Tabel 2.3  
**PENCAPAIAN KINERJA (IKU)**  
**TERHADAP TARGET RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2023-2026**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI TAHUN				TARGET RENSTRA TAHUN			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya rumah layak huni	1. Persentase Rumah Layak Huni	99,20	99,32	-	-	99,20	99,32	99,43	99,55
2.	Menurunnya luas kawasan kumuh	1. Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	50,08	53,84	-	-	50,08	53,84	61,37	69,95
3.	Meningkatnya penanganan konflik pertanahan	1. Persentase penyelesaian konflik pertanahan	100	100	-	-	100	100	100	100

**1. Indikator Persentase Rumah Layak huni.**

Tabel 2.3 pada tahun 2023 Persentase Rumah layak huni sebesar 99,20% dengan target 99,20% yang berarti capaiannya adalah 100%. Realisasi 99,20% diperoleh dengan membandingkan data Jumlah seluruh rumah layak huni (unit) dengan jumlah seluruh rumah (unit).

**2. Indikator Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani.**

Tabel 2.3 Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani pada tahun 2023 dengan target 50,08% dan realisasinya sebesar 50,08% yang berarti capaiannya adalah 100%. Realisasi 50,08% diperoleh dengan membandingkan data luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha yang ditangani pada tahun 2023 seluas 2,00 Ha, maka secara akumulasi sampai dengan tahun 2023 tercapai seluas 6,65 Ha atau tertangani sebesar 50,08% dari jumlah total luas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha seluas 13,28 Ha.

**3. Persentase penyelesaian konflik pertanahan.**

Tabel 2.3 pada tahun 2023 tercapai 100%. Pada tahun 2023 indikator kinerja utama yaitu Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Target 100% dan realisasi 100% dengan membandingkan 1 kasus yang terdaftar dan 1 kasus difasilitasi penyelesaian melalui mediasi.

➤ **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.**

**A. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

**1) Program Pengembangan Perumahan.**

Pada Program Pengembangan Perumahan, Kejadian Bencana alam sulit di prediksi, berdasarkan indeks kebencanaan Kota Singkawang termasuk kategori sedang, Kejadian bencana Alam di kota singkawang relatif sering terjadi pada waktu tertentu, potensi kejadian bencana antara lain; cuaca ekstrem, angin puting beliung, banjir, tanah longsor serta kebakaran lahan, yang mengakibatkan kerusakan ringan, sedang/berat rumah warga masyarakat, untuk mengantisipasi apabila terjadinya bencana pada tahun berjalan, maka secara rutin dianggarkan melalui program pengembangan perumahan, program tersebut merupakan antisipasi/kesiagaan terhadap kejadian bencana pada tahun berjalan, serta dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat.

**Hambatan dan kendala sebagai berikut :**

1. Bencana yang tidak bisa diprediksi mengakibatkan persiapan untuk administrasi Korban Bencana tidak dapat disiapkan dari awal dan di sisi lain dinas terkait menunggu terbitnya SK Korban Bencana dari Pemerintah. Terbitnya SK Korban Bencana sebagai acuan untuk memulai kegiatan menjadi salah satu faktor penting, sedangkan warga yang terdampak bencana harus ditangani sesegera mungkin.
2. Pada Tahun 2023 ada Peristiwa kejadian bencana angin puting beliung yang terjadi pada triwulan I dan dilakukan penanganan dengan target 6 unit rumah dan realisasi fisik 100% namun pada sisi penyerapan anggaran menggunakan swadaya masyarakat.
3. Pada Tahun 2023 dilaksanakan kegiatan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Kabupaten/Kota dengan target 1 unit rumah/Kepala Keluarga, dan realisasi fisik 100% , namun masih pada tahap verifikasi.
4. Masih kurangnya perhatian/kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya membangun rumah yang layak, sehat dan aman secara swadaya sesuai standar keselamatan bangunan dan bagi penghuninya. Tujuannya yaitu mengurangi dampak kerusakan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, misalnya banjir dan angin puting beliung.

**2) Program Peningkatan Prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU).**

**Hambatan dan kendala sebagai berikut :**

1. Pada Program Peningkatan Prasarana sarana dan Utilitas Umum (PSU). Kurangnya data Pendukung yang valid terutama data base inventarisasi Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) diantaranya Perumahan permukiman yang terfasilitasi PSU sehingga menyulitkan dalam penyediaan data untuk Pemanfaatan Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dilingkungan Perumahan Permukiman. Pada tahun 2023 Pendataan PSU telah dilakukan yang

difokuskan pada lingkungan perumahan yang dibangun oleh Pengembang/Developer, akan tetapi Disperkimta khususnya bidang perumahan rakyat belum dapat membuat dokumen standar yang harus dipenuhi dari satu kawasan yang dibangun oleh pengembang perumahan. Kawasan yang dimaksud adalah termasuk rumah dan PSU yang harus disediakan pengembang dan untuk penentuan standar perkawasan diperlukan koordinasi lintas OPD seperti ke bidang penataan ruang Dinas PUPR kota Singkawang untuk mengetahui pembagian zona dari setiap wilayah di kota singkawang.

2. Pada saat pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan PSU perumahan adanya nama lokasi (gang/Jalan) yang tidak sesuai dilapangan ketika verifikasi perencanaan pembangunan/peningkatan PSU terutama pada Pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan Lingkungan serta adanya penolakan dari warga setempat saat pekerjaan fisik akan dilaksanakan terkait lahan/tanah yang akan dilalui rencana pembangunan PSU Perumahan (Jalan lingkungan perumahan dan saluran drainase lingkungan perumahan).
3. Pelaksanaan serah terima aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pengembang perumahan ke Pemerintah Daerah Kota Singkawang mengalami kendala. Kendala yang dimaksud adalah kesulitan dalam menemukan sertifikat PSU yang dimiliki oleh pengembang atau tidak adanya kejelasan mengenai keberadaan sertifikat tersebut. Telah dilakukan konfirmasi ke BPN Kota Singkawang dan dinyatakan bahwa sertifikat PSU yang dimaksud sudah berada di tangan pengembang sendiri.
4. Kebutuhan masyarakat akan Pembangunan prasarana dan sarana dasar (PSD) yang merupakan sarana dasar yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan Perumahan Permukiman dengan pembangunan/peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan sebagai penunjang fungsi hunian yang sehat dan aman seperti jalan dilingkungan Perumahan dan saluran drainase dilingkungan Perumahan selalu diharapkan masyarakat namun disisi Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) masih terbatas, disamping itu pula kebijakan mesti terarah, perencanaan yang terpadu dan bersinergi dengan OPD teknis lainnya agar lebih terarah dan terprogram dengan baik sehingga dapat meningkatkan kuantitas infrastruktur yang berkualitas. Adapun Komponen PSU Perumahan yang dilaksanakan oleh DISPERKIMTA sesuai Tugas dan Fungsi berfokus pada jalan dilingkungan Perumahan dan saluran drainase dilingkungan Perumahan, dan beberapa komponen PSU lainnya seperti Akses Air minum, Sanitasi, PJU, RTNH/RTH sebagian berada pada Tusi OPD lainnya (lintas OPD) sehingga diperlukan sinkronisasi dan Koordinasi yang optimal dalam penyelenggaraan Perencanaan dan Pembangunan PSU Perumahan.

### **3) Program Kawasan Permukiman.**

1. Pada Program Kawasan Permukiman, Penanganan kawasan kumuh berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Singkawang yang mengacu dengan ditetapkannya SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A TAHUN 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 58,57 Ha. Dalam SK Walikota Singkawang tersebut terdapat deliniasi kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/kota yaitu dengan luas di bawah 10 Ha yaitu seluas 13,28 Ha, dan rencana target Penanganan total luas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha sampai akhir periode RPD/Renstra Tahun 2023-2026.
2. Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani pada tahun 2023 dengan target 47,68% dan realisasinya sebesar 50,08% yang berarti capaiannya adalah 105,02%. Realisasi 50,08% diperoleh dengan membandingkan data luasan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha yang ditangani pada tahun 2023 seluas 2,00 Ha, maka secara akumulasi sampai dengan tahun 2023 tercapai seluas 6,65 Ha atau tertangani sebesar 50,08% dari jumlah total luas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha seluas 13,28 Ha. Sedangkan pada tahun 2022 tertangani seluas 2,31 Ha dan secara akumulasi sampai dengan tahun 2022 tercapai seluas 4,65 Ha atau sebesar 35,02% terhadap jumlah total Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha seluas 13,28 Ha.
3. Pada tahun 2023 dilaksanakan Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman kumuh dengan total 26 paket pembangunan/pemugaran/peningkatan jalan lingkungan yang dilaksanakan Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perkimta, dari hasil evaluasi hanya terdapat 4 paket jalan lingkungan yang masuk dalam delineasi kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sedangkan 22 paket jalan lingkungan merupakan usulan pikir pada sasaran di luar kawasan delineasi kumuh sebagai upaya pencegahan terhadap potensi tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh baru.
4. Kegiatan peningkatan jalan lingkungan dan saluran lingkungan yang masuk dalam kawasan kumuh dengan luas di bawah < 10 Ha berlokasi di sekitar Jl. Hansip (Gg. Berlian, Gg. Kecubung, Jalur 5, Gg. Uray Dahlan M Suka) tidak berdampak pada pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh, tetapi hanya mengurangi bobot/skor kekumuhan.
5. Kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha di Kota Singkawang terdiri dari 4 Kelurahan, yaitu Kelurahan Roban (RT/RW.036/005), Kelurahan Sekip Lama ( RT/RW.004/002, RT/RW.005/002, RT/RW.006/002), kelurahan Sedau (RT/RW. 039/007) dan kelurahan Kuala (RT/RW.005/003, RT/RW.007/002, RT/RW.010/003) sesuai SK Wali Kota Singkawang No. 600/294/Disperkimta.Perkim-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang.

6. Penanganan Indikator yang berpengaruh terhadap pengurangan luasan kumuh adalah Kondisi Penyediaan Air Minum, Kondisi Drainase Lingkungan, Kondisi Pengelolaan Persampahan, Kondisi Pengelolaan Air Limbah, Kondisi dan Proteksi Kebakaran, sedangkan indikator kondisi jalan lingkungan dan kondisi bangunan gedung tidak mengurangi luasan kawasan permukiman, hanya mengurangi bobot kekumuhan, hal ini disebabkan cakupan pelayanan jalan lingkungan, kualitas permukaan jalan lingkungan, ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, dan ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan di baseline nilainya rendah dalam artian sudah hampir tuntas/tidak kumuh.
  7. Berdasarkan PERMEN PUPR Nomor 2/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ada 7 indikator penetapan kawasan kumuh, meliputi : Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Persampahan dan Proteksi Kebakaran. Dalam penanganannya tidak hanya bisa dilakukan oleh Dinas Perkimta saja
  8. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat dalam Peyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Pokja PKP Kota Singkawang pada tahun 2023 membentuk Forum PKP, tetapi belum dilakukan fasilitasi pertemuan, draft rencana kerja dan lokakarya/sosialisasi Forum PKP.
- **Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai berikut :**
- A. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.**
- 1) Program Pengembangan Perumahan.**
- Pada tahun 2023 untuk mengantisipasi apabila terjadinya bencana yang menyebabkan kerusakan pada rumah masyarakat yang terdampak bencana, maka dianggarkan pada Program Pengembangan Perumahan dengan Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dengan rencana target 6 unit rumah dan Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan target 1 Unit rumah maka total rencana target 6 unit rumah. Pada tahun 2023 di triwulan I ada kejadian bencana alam (puting beliung) yang mengakibatkan kerusakan pada sejumlah 6 unit rumah masyarakat, adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut :
1. Mengupayakan terbitnya SK Korban Bencana sesegera mungkin dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelaksanaan penganggulan rumah terdampak korban bencana serta memeriksa kelengkapan berkas dan kesiapan penerima bantuan dalam menerima bantuan. Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar administrasi sehingga tidak menghambat pelaksanaan.
  2. Penanganan rumah bagi korban bencana pada tahun 2023 sudah dilaksanakan menggunakan partisipasi swadaya masyarakat. Sehingga hanya sampai pada tahap pendataan.

3. Penanganan rumah bagi masyarakat yang terdampak/terkena relokasi program pemerinatah pada tahun 2023 dengan target 1 unit rumah/Kepala keluarga dan realisasi 1 unit maka capaian 100%, sejumlah 1 unit rumah tersebut masih dalam tahap verifikasi.
4. Melakukan pemetaan awal terhadap kondisi eksisting yang ada dengan melaksanakan kegiatan/sub kegiatan identifikasi, pendataan, nventarisasi dalam rangka penerapan pemenuhan SPM bidang perumahan rakyat.
5. Mengupayakan sosialisasi kepada masyarakat melalui penyebaran informasi pada pertemuan langsung/tidak langsung (media sosial/cetak) terhadap pentingnya membangun rumah yang layak, sehat dan aman secara swadaya sesuai standar keselamatan bangunan dan bagi penghuninya, tujuannya yaitu mengurangi dampak kerusakan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, misalnya angin puting beliung dan banjir.

## **2) Program Peningkatan Prasarana Sarana dan utilitas Umum (PSU).**

1. Pada Program Peningkatan Prasarana Sarana dan utilitas Umum (PSU). Mengupayakan Kegiatan Penyusunan Dokumen Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang dianggarkan melalui APBD Kota Singkawang pada tahun anggaran berikutnya dengan pola yang melibatkan pihak ke 3 yang di dalamnya terdapat tenaga ahli sehingga dapat tersedia/update data yang di harapkan serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas, Badan yang terkait serta meningkatkan intensitas Peninjauan Lapangan dalam upaya mendapatkan data yang Akurat.
2. Hearing dan koordinasi dengan warga untuk mendapatkan solusi serta surat Kesepakatan/Persetujuan warga terkait tidak keberatan atas Lahan/Tanah yang akan dibangun, atau lokasi pelaksanaan tidak dikerjakan, digeser pada APBD Perubahan dan Memverifikasi dan memastikan dari awal setiap usulan terkait lokasi pembangunan Jalan/Drainase Lingkungan terutama pada lahan tanah yang dilalui tidak bermasalah terhadap pemilik lahan agar pada saat pelaksanaan fisik tidak terjadi penolakan.
  - a.. Memverifikasi dan memastikan dari awal setiap usulan terkait lokasi pembangunan Jalan/Drainase Lingkungan terutamapada lahan tanah yang dilalui tidak bermasalah terhadap pemilik lahan agar pada saat pelaksanaan fisik tidak terjadi penolakan.
  - b. Mengusulkan pergeseran/rasionalisasi anggaran program kegiatan pada APBD Perubahan.
3. Menghubungi pengembang perumahan untuk mengejar keberadaan sertifikat PSU yang dimaksud dan mengecek legalitas sertifikat tersebut.
4. Melakukan investigasi dan verifikasi terhadap sertifikat PSU yang dimiliki oleh pengembang perumahan dan mengecek apakah sertifikat tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPN Kota Singkawang dalam mengejar keberadaan sertifikat PSU yang dimaksud dan mengecek legalitas sertifikat tersebut.
6. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan serah terima aset PSU dari pengembang perumahan ke Pemerintah Daerah Kota Singkawang untuk menghindari kendala yang sama di masa yang akan datang.
7. Melakukan pembinaan kepada pengembang perumahan dalam hal pengelolaan sertifikat PSU yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Pada Tahun 2023 indikator program Persentase lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan target 79,72% dan realisasi 79,71% maka capainnya 99,99%, program tersebut meliputi 1 kegiatan penyelenggaraan PSU perumahan dengan 4 sub kegiatan, 1 sub kegiatan berupa pekerjaan fisik dan 2 sub kegiatan bersifat non fisik penunjang.
9. Sub Kegiatan fisik yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian dengan Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jalan di lingkungan Perumahan yang dibangun/ditingkatkan target sejumlah 30 Lokasi/30 Paket yang tersebar di 5 Kecamatan dengan target panjang jalan Lingkungan Perumahan 1.176,57 M'/12 Paket dan realisasi panjang jalan 1.185,47 M'/12 paket maka capaian 100%.  
Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Saluran drainase di lingkungan Perumahan yang dibangun/ ditingkatkan target 3.027,69 M'/18 Paket, realisasi 3.025,19 M'/18 Paket, maka capaian 100%, serta pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan teknis Jalan lingkungan target 4 dokumen realisasi 4 Dokumen, Perencanaan dan Pengawasan teknis Saluran drainase lingkungan target 5 dokumen realisasi 5 Dokumen.  
Sub Kegiatan non fisik yaitu Sub kegiatan Perencanaan Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum lingkungan Perumahan target 2 Dokumen dan realisasinya 2 Dokumen capaian 100%.
10. Penanganan Prasarana dan Sarana Dasar dan Utilitas umum/Infrastruktur Lingkungan Perumahan Kawasan Permukiman berdasarkan Skala Prioritas dan dilaksanakan bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan Daerah (APBD Kota Singkawang) maka Pembangunan Prasarana dan sarana Dasar (PSD) dan Prasarana dan sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan seperti Jalan di lingkungan perumahan serta Pembangunan Saluran Drainase di lingkungan Perumahan juga di upayakan diusulkan setiap tahunnya ke Pemerintah Provinsi pada Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman melalui Musrenbang, dan yang belum terakomodir dan tertangani pembangunan sarana dan prasarananya dan akan ditindaklanjuti pada tahun anggaran berikutnya.

### 3) Program Kawasan Permukiman.

1. Penanganan Perumahan dan permukiman kumuh memerlukan anggaran yang cukup besar sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan Daerah, disamping itu penanganan perumahan dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan melalui SK Wali Kota Singkawang telah menjadi prioritas Pemerintah Pusat untuk penanganannya melalui sumber dana APBN dan sharing APBD, dan diharapkan dapat tertangani sampai tuntas kumuh 0%. Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pembagian Urusan terkait Penanganan Kumuh di bawah 10 Ha ditangani Pemerintah Kab/Kota, sehingga dalam penanganan pengurangan kumuh harus berfokus sesuai dengan pembagian urusan agar tercipta kolaborasi/pembagian peran antara Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat.
2. Penanganan Perumahan dan permukiman kumuh menjadi salah satu prioritas daerah diharapkan dapat tertangani sampai tuntas kumuh 0% sebagaimana gerakan nasional Kotaku Kota Tanpa Kumuh 100-0-100 (100% air minum, 0% kumuh dan 100% sanitasi), dan dari aspek pembiayaan memerlukan anggaran yang cukup besar untuk dapat mencapai target tersebut yang akan diupayakan melalui sumber dana APBD dan APBN serta keterlibatan seluruh stake holder, pelaku usaha dan masyarakat.
3. Melakukan pemetaan dan pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, mengusulkan pendanaan yang bersumber dari APBN (Promenade II) dan APBD (pembangunan dan peningkatan jalan/saluran) di lokasi permukiman kumuh sesuai SK Wali Kota Singkawang Tahun 2020.
4. Melakukan Koordinasi dengan Eks. Asmandat KOTAKU dan POKJA PKP dalam hal perencanaan Kegiatan yang berdampak besar terhadap pengurangan luasan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, sehingga Kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai maksimal sesuai indikator kinerja yang ditetapkan.
5. Pada tahun 2020 Kelurahan Roban (RT/RW.036/005) dengan luasan permukiman kumuh sebesar 1,16 Ha sudah tuntas penanganan permukiman kumuhnya melalui kegiatan peningkatan jalan, saluran lingkungan program KOTAKU, pada tahun 2022 di Kelurahan Sekip Lama ( RT/RW.004/002, RT/RW.005/002, RT/RW.006/002) dengan luas 2,31 Ha sudah tuntas penanganan luasan permukiman kumuhnya melalui kegiatan perbaikan/pemugaran saluran lingkungan, dan peningkatan jalan lingkungan melalui Kegiatan di Dinas Perkimta dan PUPR Kota Singkawang. Sedangkan kelurahan Kuala dan Sedau peningkatan jalan lingkungan sudah tuntas, tetapi menyisakan permasalahan ketersediaan akses air minum, sanitasi, drainase, persampahan dan proteksi kebakaran, sehingga dalam perencanaan ke depan diupayakan penyediaan tempat sampah, motor pengangkut sampah, tempat

penampungan air, perbaikan/penyediaan toilet, perbaikan drainase dan penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

6. Melalui Pokja PKP dan Forum PKP direncanakan draft rencana kerja Pokja PKP, yang terdiri dari 7 strategi, yaitu : optimalisasi koordinasi Pokja PKP, Advokasi peningkatan alokasi APBD untuk Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fasilitasi pembentukan Forum PKP, Fasilitasi percepatan regulasi bidang sanitasi, Percepatan akses sanitasi, pendampingan penggunaan aplikasi SPKP dan penyelesaian program pengentasan kawasan kumuh yang diharapkan bisa berkontribusi terhadap pengurangan 7 indikator kekumuhan.
7. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, POKJA PKP merencanakan fasilitasi pembentukan, penyusunan rencana kerja dan lokakarya/sosialisasi Forum PKP di Kota Singkawang yang diagendakan dalam draft rencana kerja Pokja PKP pada bulan Maret s/d Juni 2024.

## **B. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

**Hambatan dan kendala sebagai berikut :**

### **1) Program Sengketa Tanah Garapan.**

Pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan Fasilitasi penyelesaian konflik sengketa dan perkara pertanahan melalui kegiatan Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan, namun sampai saat ini masih terjadinya Konflik, Perkara dan Permasalahan Pertanahan di Kota Singkawang dikarenakan:

- a) Belum optimalnya sosialisasi tentang peraturan mengenai hukum/kebijakan pertanahan dikarenakan peserta rapat/sosialisasi masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan-aturan mengenai hukum pertanahan di Kota Singkawang ;
- b) Masih kurang pahamnya masyarakat Kota Singkawang dalam pemanfaatan/pengelolaan tanah/lahan sesuai peruntukannya;
- c) Proses fasilitasi penyelesaian sengketa tanah garapan melalui mediasi, kendala yang sering terjadi adalah tidak hadirnya para pihak yang bersengketa

### **2) Pada Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota,**

- Pengadaan Lahan/Tanah Untuk Infrastruktur Perkotaan
  - Pemilik tanah tidak mengetahui secara detail letak batas-batas tanah, sehingga dalam proses pengukuran tidak mendapatkan luasan tanah

### **3) Pada Program Pengelolaan Tanah Kosong pada Sub Kegiatan Sub Pemanfaatan Tanah Kosong**

- adapun kendala pada kegiatan tersebut adalah:

- Banyaknya tanah terlantar (tanah kosong) yang tidak produktif berbanding terbalik dengan kepemilikan tanah oleh masyarakat untuk pertanian/perkebunan dan lainnya sebagainya.

**4) Pada Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah,**

adapun kendala pada kegiatan tersebut adalah:

- Data SKT/SPT yang disiapkan dari Kantor Lurah Pangmilang belum terupdate secara efektif, sehingga data yang diperlukan kurang optimal.

**5) Pada Program Penatagunaan Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah,**

adapun kendala pada kegiatan tersebut adalah:

- a) Pemilik lahan/tanah tidak mengetahui batas-batas lahan/tanahnya dan lahan/tanah tidak memiliki patok batas.
- b) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dalam pengelola pertanahan dalam memahami, mengoperasikan dan melaksanakan Sistem Informasi Pertanahan.

**6) Pada Program Penatagunaan Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah,**

adapun kendala pada kegiatan tersebut adalah:

- a) Pada Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota, adapun kendala Ketidaktahuan masyarakat mengenai informasi harga jual lahan/tanah miliknya sendiri.

**Upaya mengatasi hambatan dan kendala dilakukan hal sebagai berikut :**

- 1) a. Pada Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. Melakukan penyuluhan/Sosialisasi terus menerus terkait regulasi yang berkaitan dengan Hukum Pertanahan dan memberikan pandangan kepada masyarakat, baik fungsi dan manfaat dari peraturan-peraturan pertanahan yang berlaku.
  - b. Mefasilitasi dengan memediasi pihak yang bersengketa dalam penyelesaian konflik pertanahan dan memfasilitasi konflik pertanahan yang tidak dapat diselesaikan dengan mediasi untuk dilanjutkan ke proses Hukum.
  - c. Memfasilitasi dengan Informasi Lahan akan kebutuhan warga terhadap tanah/lahan yang akan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dengan Peninjauan di lapangan melihat kondisi dan mengambil titik koordinat pada lahan/tanah sebagai bahan yang di sampaikan kepada Dinas yang membidangi Tata Ruang untuk mengetahui peruntukan kegunaan tanah yang sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)
- 2) Pada Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan. Tim Persiapan Pengadaan Tanah melaksanakan koordinasi Tim dan membuat surat permohonan ke Kantor Pertanahan Kota Singkawang untuk

- melaksanakan pengukuran ulang/balik batas lahan/tanah agar mengetahui letak batas-batas tanah sehingga memperoleh ukuran/luasan yang akan dibebaskan,
- 3) Pada Program Pengeloaan Tanah Kosong. Melaksanakan inventarisasi tanah kosong pada wilayah Pemerintah kota Singkawang yang nantinya dan akan dimanfaatkan dengan bentuk dikerjasamakan antara pemilik tanah dengan masyarakat/pengusaha/investor untuk pengelolaan/pemanfaatan tanah kosong tersebut sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan PAD kota Singkawang
  - 4) Pada Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah Melakukan koordinasi langsung ke Kantor Lurah Pangmilang untuk segera melengkapi data-data SKT/SPT.
  - 5) Pada Program Penatagunaan Tanah.
    - Menghadirkan pemilik lahan dan pemilik lahan/tanah yang berbatasan dengan lahan/tanah yang dimohon/diukur.
    - Mencari data daftar harga nilai jual lahan/tanah atau data objek pajak lahan/tanah.

Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan merupakan Perangkat Daerah Pengampu yang menangani Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pertanahan. Untuk Pencapaian Kinerja Aspek Pelayanan Umum Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang antara lain pada aspek pelayanan umum dalam Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Aspek Pelayanan Umum Bidang pertanahan Tabel 2.4 dan 2.5 sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Capaian Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2023**

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio rumah layak huni	0,2044	0,2060	0,2070	0,2072	0.2432	0,2138
2.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	89,68	90,51	91,17	91,42	97.91	99,20
3.	Cakupan layanan rumah layak huni dan terjangkau (%)	94,06	98,69	99,53	99,60	99,63	96,25
4.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (%)	75,96	76,50	77,35	78,27	79.31	79,71
5.	Persentase rumah layak huni (%)	89,68	90,51	91,17	91,42	97.91	99,20
6.	Persentase Luasan PermukimanKumuh yang ditangani (%)	80,63	84,68	88,73	52,20	57,33	50,08

*Sumber : Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2024*

Pada Tabel 2.4 Capaian ketersediaan rumah layak huni di Kota Singkawang relatif meningkat setiap tahun. Adapun beberapa kendala umum yang dihadapi dalam penanganan rumah tidak layak huni yaitu belum adanya penyusunan dokumen database jumlah rumah, Rumah Layak Huni (RLH), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dan belum optimalnya penataan, perencanaan, pembangunan/ peningkatan/ pemeliharaan infrastruktur Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan kawasan permukiman yang tidak layak huni

**Tabel. 2.5**  
**Capaian Aspek Pelayanan Umum**  
**dalam Bidang Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2023**

No	Uraian	TAHUN						Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Persentase luas lahan bersertifikat(%)	59,31	59,58	61.26	56.10	62.92	63.55	Sumber ATR/BPN Kota Singkawang
2.	Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara(%)	n/a	100	100	100.	100	100	DISPERKIMTA Memfasilitasi Penyelesaian Konflik sengketa Pertanahan, dan Lintas OPD
3.	Penyelesaian izin lokasi(%)	n/a	100	100	n/a	n/a	n/a	Berada di Dinas Penanaman Modal

*Sumber: Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, tahun 2024*

Pada Tabel 2.5 Persentase luas lahan bersertifikat setiap tahun dari tahun 2018-2023 mengalami peningkatan. Upaya masyarakat untuk mensertifikatkan lahannya perlu didorong agar semua lahan yang dimiliki masyarakat, dan swasta dapat teregistrasi dengan baik. Hal tersebut tentunya akan memudahkan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya.

Berdasarkan sumber data ATR/BPN Kota Singkawang, bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi merupakan urusan dan tugas Kementerian ATR/BPN dan yang direvisi kembali pada Peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional-Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, bahwa Kementerian ATR/BPN melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan Izin Lokasi. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa dalam rangka penanaman modal tidak diperlukan lagi Izin Lokasi.

## A. Capaian Kinerja dan Analisis Bidang Perumahan Rakyat

Standar pelayanan minimal berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 dan terakhir sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal.SPM Maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang melaksanakan pelayanan Dasar yaitu SPM Bidang Perumahan Rakyat yaitu :

### ➤ **Kinerja Pelayanan Bidang Perumahan Rakyat, Capaian SPM Sub Urusan Perumahan Rakyat.**

Adapun Salah Satu SPM yang dilaksanakan oleh Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

SPM Perumahan Rakyat terdiri atas :

a) Jenis Pelayanan Dasar

b) Mutu Pelayanan Dasar

c) Penerima Pelayanan Dasar.

(1) Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

(2) Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

(3) Penerima Pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar (setiap rumah tangga) yang memenuhi Kriteria.

Adapun Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/kota terdiri atas :

1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota..

2) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Capaian Pelayanan Dasar SPM Sub urusan Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018, ada 2 (dua) Jenis SPM Pelayanan

dasar Urusan Perumahan Rakyat seperti pada (Tabel 2.7 dan 2.8) dengan Pencapaian sebagai Berikut :

**Tabel 2.7**

**Indikator SPM Sub Urusan Perumahan Rakyat**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2021**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	Setiap Tahun

**Tabel 2.8**

**Target Indikator SPM Sub Urusan Perumahan Rakyat**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	FORMULASI	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$	100%	Setiap Tahun/ maksimal penyelesaian selama 3 tahun untuk satu kejadian bencana
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$	100%	Setiap Tahun/Rencana kebutuhan dan rencana aksi

## **1. Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**

merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota,

### **Pengertian :**

- a) Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah.
- b) Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
- c) Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.
- d) Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.
- e) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada.

### **1 Jenis Pelayanan :**

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- 1) Pada Saat Pasca bencana.
- 2) Surat Penetapan Bencana dari Bupati/Walikota.
- 3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor.

Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.

Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya

Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur

## **2. Jenis Pelayanan Dasar Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.**

merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota,

### **Pengertian :**

- a) Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah.
- a) “Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.
- b) Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati/Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan.
- c) Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- d) Rumah khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- e) Penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan/atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- f) Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
- g) Subsidi uang sewa merupakan bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

**Jenis Pelayanan :**

- 1) Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program:

Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);

Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau

Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.

- 2) Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung

Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau

Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukitan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya.

Tabel 2.9.

## Realisasi Capaian Indikator SPM Sub Urusan Perumahan Rakyat

No	JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR	Target Daerah	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2019
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota.	100 % setiap Tahun	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota.	100 % setiap tahun	100 %	100 %	0 %	0 %	100 %

(Tabel 2.3) Realisasi Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.

Tabel 2.10.

Realisasi Capaian Daerah terhadap target Nasional  
SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	FORMULASI	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN					
				DATA PERHITUNGAN TAHUN 2022		DATA PERHITUNGAN TAHUN 2021		DATA PERHITUNGAN TAHUN 2020	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$	100 % (6 Unit)	5 Unit Rumah	100%	0 Unit Rumah	0%	0 Unit Rumah	0%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$	100 % (1 Unit/KK)	2 Unit Rumah	100%	0	0	0	0

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018.

Kejadian Bencana ditetapkan melalui surat Keputusan Kepala Daerah sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundangan yang berlaku. Adapun uraian realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

**a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota**

Berdasarkan tabel 2.8, 2.9 dan 2.10 diatas menunjukkan pelayanan dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota pada tahun 2023 dengan capaian 100%, Pada tahun 2023 terdapat 6 unit rumah warga akibat kejadian bencana angin puting beliung, maka Tim SPM khususnya Bidang Perumahan Rakyat di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sudah melakukan identifikasi dan pendataan secara langsung ke lokasi terdampak bencana. Sehingga diperoleh data jumlah rumah yang terdampak sebanyak 6 unit rumah dengan kategori rusak ringan. Adapun realisasi kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) didapat dari kegiatan yang dikelola atau dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat sekitar korban bencana. Hal ini berakibat penyaluran bantuan bahan bangunan yang sudah dianggarkan pada APBD TA 2023 khususnya di DPA Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang tidak dapat terealisasi. Disamping Bencana yang tidak bisa diprediksi mengakibatkan persiapan untuk administrasi Korban Bencana tidak dapat disiapkan dari awal. Sedangkan pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak korban bencana memakan waktu cukup lama disebabkan proses administrasi harus dipenuhi karena sudah tercantum pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Pada saat bersamaan masyarakat yang terdampak bencana harus ditangani secepatnya.

**Tabel 2.11 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Tahun 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RUPIAH)	REALISASI ANGGARAN (RUPIAH)	%
1.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>254.908.800</b>	<b>162,544,400</b>	<b>63.77 %</b>
	<b>1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>57.498.900</b>	<b>56.251.600</b>	<b>97.83 %</b>
	1. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	57.498.900	56.251.600	97.83 %
	<b>2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>197.409.900</b>	<b>106,292,800</b>	<b>53.84 %</b>
	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	89.915.300	0	0
	2. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	107.494.600	106,292,800	98.88 %
	3. Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	-	-	-

Pada tahun 2022, Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota dengan capaian 100%, terdapat 5 unit rumah warga akibat kejadian bencana tanah longsor (alam) dan diberikan bantuan yang bersifat bantuan sosial pembangunan/rehabilitasi rumah warga tersebut yang ditetapkan melalui SK. Walikota Singkawang Nomor : 653/425/PERKIMTA.PERUM-A/TAHUN 2022 Tentang Penerima Bantuan Bahan Bangunan Bagi Korban Bencana Tanah Longsor beralamat di Tanjung Batu Harapan RT.001 RW.001 Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan berjumlah 2 unit rumah dan di Jl. Ayani Gg. Batu Mas RT.032 RW.013 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat berjumlah 3 unit rumah Tahun Anggaran 2022, dengan anggaran APBD-P Tahun 2022 serta dalam DPPA SKPD DISPERKIMTA dengan Program Pengembangan Perumahan pagu dana Rp. 121.997.100 dan realisasi anggaran Rp. 24.827.800 (20.35%) dengan realisasi fisik 100% sejumlah 5 unit rumah/Kepala Keluarga.

Sedangkan pada Tahun 2018-2021 capaian 0% (Tabel 2.9, dan 2.10) di karenakan tidak ada peristiwa Kejadian Bencana Alam yang di tetapkan oleh Kepala Dearah sejak tahun 2018-2021.Pada tahun 2021 terdapat 6 unit rumah warga akibat kejadian bencana kebakaran rumah akibat konsleting Listrik/human error (non alam) dan diberikan bantuan yang bersifat bantuan sosial pembangunan/rehabilitasi rumah warga tersebut yang ditetapkan melalui SK. Walikota Singkawang Nomor : 653/409/PERKIMTA.PERUM-A/TAHUN 2021 Tentang Penerima Bantuan Bahan Bangunan Bagi Korban Bencana Kebakaran RT.026. RW.010 Gang 70 Kel. Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Tahun Anggaran 2021, dengan anggaran APBD-P Tahun 2021 serta dalam DPPA SKPD DISPERKIMTA, namun dan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak termasuk kedalam kategori Pelayanan SPM karena kebakaran rumah akibat konsleting listrik/human error bukan peristiwa kejadian alam merupakan kejadian (non alam) sehingga tidak termasuk dalam penghitungan Capaian SPM bidang Perumahan Rakyat (masuk kategori kegiatan rutin), dengan demikian capaian SPM Tahun 2021 tidak tercapai (0%).

Demikian juga pada Tahun 2020, terdapat 2 rumah warga akibat kejadian kebakaran dan diberikan bantuan yang bersifat bantuan sosial pembangunan/rehabilitasi rumah warga tersebut yang ditetapkan melalui SK. Walikota Singkawang Nomor : 653/397/PERKIMTA.PERUM-A/TAHUN 2020 Tentang Penerima Bantuan Pembangunan Rumah berupa uang bagi Korban bencana kebakaran Rt. 025 Rw. 005 Gang sayur Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Tahun Anggaran 2020, dengan anggaran APBD-P Tahun 2020 sebesar Rp. 70.000.000. dengan target 2 Unit rumah (Rp. 35.000.000 Per unit Rumah) anggaran tersebut berada pada Pejabat Penata Usaha Keuangan Daerah (PPKD) di Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang. Untuk pelaksanaan penanganan fisiknya melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dengan target 2 unit rumah warga yang difasilitasi penyediaan/rehabilitasi rumah akibat kejadian bencana kebakaran dan terealisasi 2 unit rumah namun dan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak termasuk kedalam kategori Pelayanan SPM karena kebakaran rumah akibat konsleting listrik/human error bukan

peristiwa kejadian alam merupakan kejadian (non alam) sehingga tidak termasuk dalam penghitungan Capaian SPM bidang Perumahan Rakyat (masuk kategori kegiatan rutin), dengan demikian capaian SPM Tahun 2020 tidak tercapai (0%).

**b. Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota.**

Berdasarkan tabel 2.9 dan 2.10 diatas pada tahun 2023 tercapai (100%).

Kegiatan untuk fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota di anggarkan pada APBD Induk Tahun 2023 dengan target 1 unit rumah, dan terealisasi 1 unit rumah. Namun realisasi hanya sampai pada tahap Pendataan inventarisasi/identifikasi rumah dilokasi rawan bencana atau yang berpotensi terdampak bencana. Sedangkan untuk pelaksanaan relokasi program Pemerintah Kab/Kota belum dapat dilaksanakan dikarenakan tahapan verifikasi yang belum selesai.

Begitu pula pada tahun 2022 Capaian SPM 100%, untuk pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota di anggarkan pada APBD Induk Tahun 2022 dan APBD-P Tahun 2022 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dengan pagu dana sebesar Rp. 121.893.900 dan realisasi anggaran Rp. 65.885.400 (54.05%) dengan realisasi fisik 100% dimana target 2 unit rumah dan terealisasi 2 unit rumah, namun dalam penyerapan anggaran 1 unit rumah di biayai anggaran APBD dan 1 unit rumah menggunakan biaya swadaya dari warga yang terdampak relokasi program pemerintah.

Sedangkan pada tahun 2018, 2020 dan 2021 menunjukkan pelayanan dasar Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota dengan capaian SPM 0%. Pada tahun 2019 tabel 2.9 dan 2.10 Capaian SPM Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota tercapai 100% dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat dengan penerima manfaat layanan sejumlah 30 WTP (warga terdampak) 30 unit rumah/Kepala Keluarga yang direlokasi dengan rincian 13 WTP diberikan dana santunan Kerohiman dan 17 WTP dana pembangunan rumah baru yang semula berada dipermukiman Kumuh Kel.Kuala (bertempat tinggal/berdiam di bantaran sungai), adapun Pagu dana Rp. 2.735.377.925,00 dan Realisasi Rp. 645.606.000,00 (24%).

**Tabel 2.12**

**Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018-2023 (Bidang Perumahan Rakyat)**

No	Jenis Indikator	Realisasi						KET
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Rasio rumah layak huni	0.2044	0.2060	0.2070	0.2072	0.2432	0.2138	Permendagri 86/2017
2.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	89,68 %	90,51 %	91,17 %	91,42 %	97,91 %	99,20 %	Permendagri 86/2017
3.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	94,06 %	98,69 %	99,53 %	99,60 %	99,63 %	96,25 %	Permendagri 86/2017
4.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	75,96 %	76,50 %	77,35 %	78,27 %	79,31 %	79,71 %	Permendagri 86/2017

Sumber: Bidang Perumahan, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Tahun 2024

Capaian Kinerja terkait pada bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

**1. Indikator Rasio Rumah Layak Huni**

Tabel 2.12 Rasio rumah layak huni tahun 2023 tercapai 0,2138 yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni 51.767 Unit dibagi dengan jumlah penduduk di Kota Singkawang tahun 2023 sejumlah 242.146 Jiwa.

Pada Tahun 2022 Rasio rumah layak huni tahun 2022 mencapai 0,2432.

Rasio rumah Layak huni di Kota Singkawang mencapai 0,2432, yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni 58.451 Unit dibagi dengan jumlah penduduk di Kota Singkawang tahun 2022 sejumlah 240.327 Jiwa.

Pada tahun 2021 Rasio rumah layak huni di Kota Singkawang mencapai 0,2072, yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni 49.604 Unit dibagi dengan jumlah penduduk di Kota Singkawang tahun 2021 sejumlah 239.377 Jiwa.

Pada tahun 2020 Rasio rumah layak huni di Kota Singkawang mencapai 0,2066, yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni 49.363 Unit dibagi dengan jumlah penduduk di Kota Singkawang tahun 2020 sejumlah 238.438 Jiwa.

Rasio rumah layak huni di Kota Singkawang pada tahun 2019 mencapai 0,2060, yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni 48.909 Unit dibagi dengan jumlah penduduk di Kota

Singkawang tahun 2019 sejumlah 237.429 Jiwa. peningkatan rasio tersebut dikarenakan adanya perubahan/konsolidasi data penduduk (sumber data penduduk tahun 2019 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang).

## **2. Indikator ketersediaan rumah layak huni**

Tabel 2.12 Cakupan Ketersediaan rumah layak huni tahun 2023 tercapai 99.20% yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni 51.767 Unit dibagi dengan jumlah seluruh rumah di Kota Singkawang tahun 2023 sejumlah 52.182 unit rumah

Pada tahun 2022 Cakupan Ketersediaan rumah layak huni di Kota Singkawang mencapai 97.91% yang diperoleh dari perhitungan jumlah rumah layak huni 58.451 Unit dibagi dengan jumlah seluruh rumah di Kota Singkawang tahun 2022 sejumlah 59.700 unit rumah.

## **3. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau**

Pada Tabel.2.12 Tahun 2023 tercapai 96.25%

## **4. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).**

Pada Tabel.2.12 Tahun 2023 tercapai 79.71%

## **B. Capaian Kinerja dan Analisis Bidang Kawasan Permukiman**

Capaian Indikator Kinerja terkait pada Bidang Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tabel 2.13 sebagai berikut :

Tabel 2.13

**Capaian Indikator Kinerja (Pada Bidang Kawasan Permukiman)**

No	Indikator	Realisasi							KET
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Persentase luasan permukiman kumuh Dikawasan Perkotaan	44,77 %	80,63 %	84,68 %	88,73 %	6,03 %	17,64 %	24,82 %	Permendagri 86/2017
2	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,0811	0,0285	0,0225	0,0165	0,1092	0,0957	0,0874	Permendagri 86/2017
3.	Persentase Permukiman yang Tertata	-	67,32 %	69,56 %	69,80 %	69,96 %	70,29 %	70,49 %	Permendagri 86/2017
4.	Rasio Permukiman Layak huni	0,9720	0,9874	0,9986	0,9987	0,9725	0,9757	0,9777	Permendagri 86/2017

Sumber: Bidang Permukiman Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024

**1) Indikator Persentase Luasan Permukiman Kumuh Dikawasan Perkotaan.**

*Dengan pengertian luas permukiman kumuh adalah jumlah seluruh luasan permukiman kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.*

*Defenisi Operasioal Berkurangnya luasan permukiman kumuh, yang telah ditetapkan melalui peningkatan kualitas permukiman pada permukiman yang tidak layak huni dan/atau permukiman yang sudah layak, dalam rangka meningkatkan fungsi dan daya dukung kawasan dalam bentuk perbaikan, pemugaran, peremajaan, permukiman kembali serta pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.*

Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat dan di kawasan Perkotaan, di kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan-fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Tabel 2.13 pada Tahun 2023 Capaian Persentase luasan kawasan permukiman kumuh di kawasan Perkotaan sebesar 14,54 Ha (27,82%) terhadap SK terbaru, yaitu SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang sejumlah 58,57.

Tabel 2.13 pada Tahun 2022 Capaian Persentase luasan kawasan permukiman kumuh di kawasan Perkotaan sebesar 10,53 Ha (17,64%) terhadap SK terbaru. Jumlah total luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang berdasarkan SK terbaru, yaitu SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang sejumlah 58,57 ha (0,11 %) dari luas wilayah Kota Singkawang sebesar 50.400 Ha/504 Km<sup>2</sup>. Sampai dengan tahun 2021 luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang tertangani sejumlah 3,53 Ha (6,03 %) dan masih terdapat sebesar 55,04 ha atau 93,97 % yang belum tertangani terhadap SK terbaru.

Pada Tabel 2.13 capaian Tahun 2020 terkait indikator Persentase luasan kawasan permukiman kumuh di kawasan Perkotaan sebesar 65,69 Ha (88,73%) terhadap SK lama (Berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor 600/70.A/PERUM-C/Tahun 2016) dengan Jumlah luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang yang tertangani seluas 65,69 Ha (88,73%) dari jumlah total 74,03 Ha luasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Singkawang (Berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor 600/70.A/PERUM-C/Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh). Dan masih terdapat sebesar 8,34 Ha (11,27%) luas Permukiman Kumuh yang belum tertangani, maka dengan demikian terjadi peningkatan penanganan sebesar 4,05% pada Tahun 2020 jika dibandingkan pada Tahun 2019 dengan luas 62.69 Ha (84.68%).

## 2) Indikator Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh.

Dengan rumusan persamaan yaitu *Luas Lingkungan Permukiman Kumuh dibagi luas Wilayah dikalikan 100%*

Tabel 2.13 Capaian Tahun 2023 sebesar 0,0874% berdasarkan luas *Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh perkotaan berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor : SK Wali Kota Singkawang Nomor 600/294/DISPERKIMTA.PERKIM-A Tahun 2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Singkawang sejumlah 58,57 Ha.*

Tabel 2.13 Capaian Tahun 2022 sebesar 0,0957% berdasarkan luas *Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh perkotaan berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor : 600/70.A/PERUM-C/2016 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sejumlah 48,24 Ha) atau sebesar 0,0957% dari luas wilayah Kota singkawang 50.400 Ha*

Capaian Persentase lingkungan Permukiman Kumuh pada tahun 2021 sebesar 0.1092% berdasarkan luas *Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh perkotaan berdasarkan SK Walikota Singkawang Nomor : 600/70.A/PERUM-C/2016 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sejumlah 55,04 Ha) atau sebesar 0,1092% dari luas wilayah Kota singkawang 50.400 Ha,*

Perhitungan data Capaian Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh pada Tahun 2020 secara akumulasi tercapai 0,0165% sedangkan pada Tahun 2019 tercapai 0,0225 % dari luas wilayah Kota Singkawang.

### 3) Persentase Permukiman Yang Tertata

*Pengertian Persentase Permukiman yang tertata dengan rumusan persamaan yaitu luas area permukiman tertata (Ha) dibagi luas area permukiman keseluruhan (Ha).*

*Tabel 2.13 Pada Tahun 2023 Persentase Permukiman yang tertata sebesar 1.481,69 Ha (70,49%) dari Luas Wilayah Permukiman sebesar 2.102,05 Ha.*

*Pada tahun 2022 Capaian Persentase Permukiman yang tertata 1.477,48 Ha (70,29%) dari Luas Wilayah Permukiman sebesar 2.102,05 Ha.*

*Pada tahun 2021 Capaian Persentase Permukiman yang tertata 1.470,68 Ha (69,96%) dari Luas Wilayah Permukiman sebesar 2.102,05 Ha.*

*Pada tahun 2020 Capaian Persentase Permukiman yang tertata 1.467,15 Ha (69,80%) dari Luas Wilayah Permukiman sebesar 2.102,05 Ha.*

*Pada tahun 2019 Capaian Persentase Permukiman yang tertata 1.462,15 Ha (69,56%) dari Luas Wilayah Permukiman sebesar 2.102,05 Ha.*

## C. Capaian Kinerja dan Analisis Pelayanan Bidang Pertanahan

Seiring dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah dimana seksi Konsolidasi Tanah menjadi Bidang Pertanahan yang mempunyai tupoksi 9 Kewenangan Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah yang meliputi:

1. Izin Lokasi
2. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
5. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
6. Penetapan Tanah Ulayat
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong
8. Izin Membuka Tanah
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/ Kota

Urusan Wajib Dasar yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pertanahan menjadi tugas fungsi khususnya Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang baru terbentuk pada tahun bulan Desember 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dan Peraturan Walikota

Singkawang Nomor : 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan rakyat, Kawasan permukiman dan pertanahan.

Adapun upaya mewujudkan kebijakan pertanahan meliputi : upaya meningkatkan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang, meningkatkan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian, dan meningkatkan tertib administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum. Upaya yang dilakukan oleh Bidang Pertanahan yaitu melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang sebagian besar memiliki keterkaitan terhadap rangkaian proses perizinan, maka bersifat lintas OPD yang tidak terlepas dari peran keterlibatan/keterkaitan OPD teknis lainnya dan instansi Vertikal lainnya antara lain: Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, Dinas PUPR, Badan Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Singkawang dan instansi Vertikal BPN/ATR serta Kejaksaan Negeri dalam rangka meningkatkan koordinasi, Sinkronisasi dan keterpaduan Program kegiatan dan keterkaitan proses perizinan, integrasi data base/informasi ketersediaan data, serta Fasilitasi Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan, dengan program dan kegiatan :

**1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Tahun 2018-2020)** kegiatannya diantaranya mencakup Kepatuhan Penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan Tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum serta Fasilitasi penyelesaian konflik sengketa dan perkara pertanahan melalui kegiatan Fasilitasi Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan, serta fasilitasi Penanganan kasus konflik Perkara sengketa Pertanahan dengan kegiatan diantaranya :

- a. Kegiatan Fasilitasi Izin Lokasi
- b. Kegiatan Penyuluhan Hukum Pertanahan
- c. Kegiatan Penyusunan peraturan daerah Tentang Pertanahan
- d. Kegiatan Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Pada Tahun 2020 tidak terdapat kegiatan PTSL.

Pada tahun 2019 ditargetkan 1.000 persil lahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang difasilitasi memperoleh bantuan sertifikasi lahan/Tanah melalui sumber dana APBD Tahun 2019, masing-masing Penerima manfaat memperoleh Bantuan Rp. 250.000 Per Persil. Dengan mekanisme penerima manfaat sesuai data usulan dari Kelurahan yang telah diverifikasi yang selanjutnya proses penerbitan sertifikat lahan/tanah oleh kantor ATR/BPN dan terealisasi 801 Persil Tanah Masyarakat melalui kegiatan Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pada Tahun 2019

- e. Kegiatan Fasilitasi Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan .

Pada tahun 2018-2020 penyelesaian konflik pertanahan saat ini kegiatan Pengaduan layanan masalah Pertanahan dalam memberikan Fasilitasi Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan kepada masyarakat, antara lain : berupa Alih Fungsi Lahan dan informasi lahan bagi masyarakat yang ingin mengubah peruntukan lahan dari alas hak yang ada baik

SKT/SPT maupun Sertifikat serta bagi masyarakat yang ingin membeli suatu bidang tanah namun ingin mengetahui terlebih dahulu peruntukannya secara Rencana Tata Ruang. Konflik pertanahan yang disampaikan pada bidang pertanahan sampai saat ini hanya berupa tembusan dari pemohon, meskipun demikian bidang pertanahan tetap melakukan fungsinya dengan melaksanakan survey lapangan ke lokasi yang dimohon.

**2. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan (Tahun 2018-2020)**  
pengembangan/penyediaan Sistem informasi/data Base Pertanahan. Dengan kegiatan antara lain::

- a. Inventarisasi Tanah Kosong dalam upaya penyediaan data base yuridis, fisik maupun sosial yang berkaitan dengan tanah kosong sehingga kedepan dapat dijadikan indikator dalam penyelesaian masalah tanah kosong./Pemanfaatan Tanah Kosong
- b. Inventarisasi Aset Pemda dengan tujuan penyediaan data base aset pemda dalam bentuk Geografis Informasi Sistem (SIG) dengan harapan akan tersedianya aset pemda yang lebih akurat baik secara letak dengan adanya kepastian titik koordinat, luas wilayah maupun kondisi eksiting dengan cara pemetaan pada bidang tanah. Sistem Penyediaan data base yang akurat ini akan mempermudah dalam upaya pemberian Ijin Pemakaian Tanah Aset Pemda.
- c. Pengadaan tanah (Aset) bagi Kepentingan Pembangunan. Pemakaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah, Pada Tahun 2018 telah diprogramkan kegiatan pembuatan sistem informasi pertanahan yang handal berupa suatu sistem program dimana Ijin Pemakaian Tanah dapat dilakukan secara online dengan kelengkapan Prosedur dan Manual Ijin Pemakaian Tanah Aset. Hal ini diharapkan akan mempermudah kepada masyarakat umum yang ingin memakai Aset Pemda serta Aset Pemda yang ada dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal kepada PAD Kota Singkawang, namun dikarenakan anggaran yang tidak maksimal maka dialihkan/pergeseran pada APBDP tahun 2018 diprioritaskan pada penyediaan perangkat penunjang sehingga kegiatan penyediaan sistem data base tersebut diusulkan kembali pada tahun anggaran 2019..
- d. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Ijin Pemanfaatan tanah Serta Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)
- e. Peningkatan Aparatur Dalam Pengelolaan sistem Informasi Pertanahan.

➤ Adapun program kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021-2023, dan capaian tahun 2023 sebagai berikut :

- 1. Program Penelolan Tanah Ulayat (Tahun 2021)** dengan indikator Cakupan Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Kas Desa, target 100% realisasi 100% maka capaian 100%., dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Sedagkan pada tahun 2022 dan 2023 program tersebut tidak dilaksanakan dan tidak masuk dalam Renja dan DPA Disperkimta Tahun 2023.
- 2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan,** dengan Indikator Kinerja Program (outcoame) Persentase Sengketa Pertanahan yang difasilitasi target 100% realisasi 100% maka capaian 100%

3. **Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah untuk Pembangunan**, dengan indikator Kinerja Program (outcome) Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/ Santunan Tanah untuk pembangunan, target 100% realisasi 50% maka capaian 50%.
4. **Program Penetapan Tanah Kosong** dengan indikator Cakupan Terdatanya Jumlah Tanah Kosong, target 100% realisasi 100%.
5. **Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah**, dengan indikator Cakupan Terdatanya/ Tertib Administrasi Data Pertanahan mengenai Izin Membuka Tanah Negara, target 100% realisasi 100% Dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah, dengan realisasi PTSL tahun 2023 sejumlah 66 persil.
6. **Program Penatagunaan Tanah**, dengan indikator Cakupan Luasan Wilayah yang sudah Terpetakan, target 23,08% realisasi sebesar 23,08%, dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dan Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota.

**Adapun capaian kinerja IKK pada bidang pertanahan (tabel 2.14 dan 2.15) sebagai berikut :**

1. Pada Tahun 2023 Lahan Bersertifikat atau 63,55% (32.032,73 Ha) berdasarkan sumber Data BPN kota singkawang), sedangkan Tahun 2022 sebesar 62,92% (31.712,64 Ha).
2. Pada Tahun 2023 terdapat 1 (satu) Konflik, Sengketa dan perkara pertanahan yang difasilitasi oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang melalui Bidang Pertanahan melalui proses mediasi penyelesaian perkara pertanahan Batas Wilayah antara Pemerintah Kota Singkawang dengan Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, batas daerah Kabupaten Bengkayang dengan Kota Singkawang di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan yang berbatasan dengan Desa Karimunting Kabupaten Bengkayang; dengan realisasi (100%) yaitu :
  - Fasilitasi Penanganan Konflik Lahan/Tanah:
    - a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang terkait hal tersebut;
    - b. Menyurati Sdr. Agus Firsawan untuk melakukan koordinasi dengan Kantor ATR/BPN Singkawang;
    - c. Konsolidasi dengan Camat dan Lurah Sedau;
    - d. Rapat koordinasi dengan Tim PBD Kota Singkawang; dan
    - e. Melakukan overlay peta lokasi sebagaimana dimaksud Sdr. Agus Firsawan.
  - Hasil Mediasi Pengaduan Konflik Lahan/Tanah:
    1. Lokasi bidang tanah di daerah perbatasan antara Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 yang masuk dalam pengaduan Sdr. Bagus Firsawan SE tidak diketahui secara detil dikarenakan Sdr. Bagus Firsawan SE saat ini belum pernah mengajukan permohonan terkait layanan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dalam rangka memastikan letak

bidang tanahnya pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang;

2. Sdr. Bagus Firsawan SE dapat mendaftarkan permohonan pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang layanan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI;
  3. Solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyikapi hal ini agar mendapatkan solusi adalah Sdr. Bagus Firsawan melakukan gugatan;
  4. Jika memang benar terdapat alas hak tanah masyarakat di lokasi tersebut dan tidak bermasalah dengan alas hak yang telah ada sebelumnya, maka Pemerintah Kota Singkawang akan melakukan fasilitasi perbaikan administrasi pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang yang berlaku dan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dan Pemerintahan Kota Singkawang.
3. Pada Tahun 2022 terdapat 4 (satu) Konflik, Sengketa dan perkara Petanahan yang difasilitasi oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang melalui Bidang Pertanahan melalui proses mediasi penyelesaian perkara pertanahan di Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara dengan realisasi (100%) yaitu :
- Fasilitasi penanganan perkara/konflik Batas Wilayah antar Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang melalui tinjau langsung kelapangan Pada Hari Minggu, Tanggal 22 April 2022 Penegasan Batas Wilayah Kota Singkawang dengan Kabupaten Bengkayang di Kelurahan Bagak Sahwa Kec. Singkawang Timur bersama Tim Pemerintah Kota Singkawang dan Tim PBD Kota Singkawang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Tim PBD Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Tim PBD Provinsi Kalimantan Barat dan 4. Topograf KODAM XII/TANJUNGPURA berdasarkan yang ditetapkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2018 yang sudah tertera titik-titik koordinat batas wilayah termasuk 17 titik Tapal Batas Wilayah yang berada di Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan. Tim Survei Bidang Pertanahan melakukan survei pendahuluan bersama Tim Kelurahan Sagatani untuk memastikan titik-titik koordinat pada 17 titik Tapal Batas Singkawang - Bengkayang yang sudah ditetapkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2018 yang akan dipasang Pilar/Patok Batas Wilayah. Bagian Pemerintah Kota Singkawang dan Dinas Perkimta juga melakukan koordinasi bersama tokoh masyarakat, Ketua RT/RW setempat untuk menginformasikan agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai batas wilayah yang sudah ditetapkan dan sudah terpasang 17 pilar/patok batas wilayah antara Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang di Daerah Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Timur.
  - Fasilitasi penanganan perkara/konflik juga dilakukan akibat dari Pembangunan Pintu Gerbang Tama Ka' Lawakng di Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur, Pintu Gerbang Mahligai Pesisir di Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara dan Pintu Gerbang Cap Go Meh di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan,

yaitu:

- Fasilitasi penyelesaian konflik/perkara akibat pembangunan Pintu Gerbang Mahligai Pesisir di Kelurahan Semelagi Kecil Kecamatan Singkawang Utara terdapat warga terdampak pembangunan Gerbang Utara mengenai lahan warga, menindaklanjuti hal tersebut Wali Kota Singkawang dan bersama TIM Pemerintahan segera mediasi langsung warga terdampak agar tidak terjadi kesalah pahaman dan mencari solusi terbaik mendapati kesepakatan bahwa pemilik lahan sudah memberikan lahan/tanah tersebut dan tanpa ada tuntutan ganti kerugian.
  - Fasilitasi penyelesaian konflik/perkara akibat pembangunan Pintu Gerbang Cap Go Meh di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan dimana penanganan melalui mediasi langsung pada warga terdampak pembangunan Gerbang Selatan dan Pemindahan tiang listrik mengenai lahan rumah tinggal terdampak pembangunan. Penanganan melalui mediasi langsung bersama Wali Kota Singkawang dan bersama TIM Pemerintahan mendapati kesepakatan dengan penggantian pembangunan rumah tinggal dan ganti kerugian.
  - Fasilitasi penyelesaian konflik/perkara akibat pembangunan Pintu Gerbang Tama Ka' Lawakng di Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, bangunan Pintu Gerbang Tama Ka' Lawakng diyakini berada dalam wilayah ruang milik jalan dan tindak lanjut untuk koordinasi Pemerintah Daerah Kota Singkawang sudah menyurati (menginformasikan) kepada pemohon pengaduan konflik (pemilik lahan) agar diselesaikan dengan berkoordinasi bersama, namun pihak pemohon tidak menghadiri undangan tersebut dan sampai saat ini masih belum ada kesepakatan dari pemilik lahan.
4. Capaian tahun 2023 terkait penyelesaian izin lokasi Berdasarkan sumber data ATR/BPN Kota Singkawang, bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi merupakan urusan dan tugas Kementerian ATR/BPN dan yang direvisi kembali pada Peraturan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional-Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi, bahwa Kementerian ATR/BPN melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan Izin Lokasi. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa dalam rangka penanaman modal tidak diperlukan lagi Izin Lokasi.

Sedangkan tahun 2021 terkait Izin Lokasi (dimulai sejak Tahun 2020 pengajuan izin lokasi di Kota Singkawang telah melalui sistem OSS (Online Single Submission), sejak Tahun 2019 DISPERKIMTA khususnya Bidang Pertanahan (memfasilitasi Penyelesaian Izin Lokasi) DISPERKIMTA khususnya Bidang Pertanahan bagian dari Tim Teknis yang memberikan jawaban pertimbangan dan untuk melengkapi pertimbangan Teknis dari Kantor Agraria dan Tata Ruang / BPN Kota Singkawang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (melalui Tim Teknis) dan selanjutnya disampaikan ke Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja untuk

ditindaklanjuti proses perizinannya, dan pada Tahun 2021 terkait penerbitan izin lokasi melalui Tata Ruang / BPN Kota Singkawang.

Tabel 2.14

**Capaian Indikator Kinerja IKK pada Bidang Pertanahan tahun 2018- 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	KET
1	Luas Lahan Bersertifikat	%	59,31%	59.58%	61,26%	56,61%	62,92%	63,55%	Sumber data dari ATR/BPN
2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	Lintas OPD
3	Penyelesaian izin lokasi	%	100%	100%	100%	n/a	n/a	n/a	Lintas OPD, dan Tahun 2020 Merupakan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Tabel 2.15

**Data pendukung Pelayanan Bidang Pertanahan s/d Tahun 2023**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Updating Sistem Pendaftaran Tanah (SKT/SPT)	146 Persil Kec. Singkawang barat	263 Persil Kec. Singkawang tengah		-	2 Kecamatan	1.102 Persil	353 Persil	66 Persil
2.	Pendaftaran Tanah sistematis lengkap (PTSL) dengan bantuan operasional	-	-	-	811 Persil	-	1.102 Persil	353 Persil	66 Persil
3.	Inventarisasi HPL	-	-	-	-	-	285 Persil	-	-
4.	Penyelesaian masalah pertanahan garapan (fasilitasi/mediasi dan rekomendasi)	-		-	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	4 Kasus	1 Kasus
5.	Penerbitan Surat rekomendasi izin Lokasi	-	-	-	-				-
6	Penerbitan Surat rekomendasi izin Membuka Tanah Negara	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Penerbitan Surat Peringatan	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Pelanggaran Pemanfaatan (TKD, Tanah Umum)								
8.	Penerbitan Izin Lokasi (buah)	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Penerbitan IPT (buah)	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Penerbitan Izin Membuka Tanah (buah)	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Penerbitan Izin Konsolidasi Tanah (buah)	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Inventarisasi Tanah Kosong	-	-	-	2.500 Ha	657 Ha	1 Kec. Singkawang	5 Kec. Singkawang	-
13.	Inventarisasi Tanah Ulayat/.Kas Desa	-	-	-	-	-	1 Kec. Singkawang Timur	-	-
14.	Pemetaan Bidang Tanah	-	-	-	-	-	3 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan
15.	Zonasi Nilai Tanah (ZNT)	-	-	-	-	-	5 kelurahan	2 kelurahan	2 kelurahan
16.	Penyusunan Draft Rancangan Perda	-	-	-	-	Raperda Pemanfaatan Tanah Kosong/terlantar, Dan raperda IMTN			-
17.	Penyusunan Draft Rancangan Perwako	-	-	-	-	Draft Peraturan Walikota (PerWako) Tentang Pemakaian Aset Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemerintah Daerah	Draft Perwako IMTN	-	-
18.	Informasi Lahan (pemohon)	-	-	-	2	12	-	1	6
19.	Patok Tapal Batas/Tanda Batas Wilayah Administrasi Kota Singkawang - bengkayang (wilayah kec. singkawang Timur)							17 Patok	-
20.	Aplikasi SIPETA dan pemeliharaan							1 Aplikasi	-

Sumber: Bidang Pertanahan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang tahun 2024.

### 1.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kota Singkawang sebagai berikut :

1. Belum optimalnya akses rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkait penyediaan/fasilitas rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah Kota Singkawang sebagai upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang Perumahan Rakyat.
2. Belum optimalnya fasilitas/penyediaan rumah susun/rumah khusus bagi masyarakat yang terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah, sebagai upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang Perumahan Rakyat.
3. Belum optimalnya pemetaan kondisi awal SPM Bidang Perumahan Rakyat (identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi, Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan dan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program pemerintah) yang merupakan bagian ketentuan untuk melaksanakan pemenuhan penerapan SPM.
4. Belum Tersedianya NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual) Penanganan penyediaan/fasilitas rumah layak huni bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah Kota singkawang serta SOP pelaksanaannya.
5. Belum tersedianya updating basis data/database PSU lingkungan perumahan kawasan permukiman sebagai penunjang fungsi hunian yang layak huni yang valid dan update.
6. Belum optimalnya penyediaan dokumen perencanaan pengembangan/peningkatan Infrastruktur Prasarana Sarana dan utilitas umum (PSU) lingkungan perumahan kawasan permukiman dan permukiman kumuh serta sinergi, integrasi dan keterpaduan dokumen RP3KP antar sektor/ lintas OPD.
7. Belum optimalnya Pelaksanaan pembangunan/peningkatan PSU di wilayah Perumahan yang dibangun oleh pengembang/Developer karena belum optimalnya Penyerahan Aset Fasum dan Fasos dari pihak pengembang Perumahan ke Pemerintah Daerah Kota Singkawang.
8. Masih terbatasnya ketersediaan data base Rumah Tidak Layak huni (RTLH) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang valid dan update sehingga menyulitkan dalam perencanaan/ penanganannya maupun sebagai pertimbangan kebijakan.
9. Masih terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kepemilikan rumah layak huni dan terjangkau, belum tuntasnya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Singkawang.
10. Belum optimalnya keterpaduan dan sinergisitas Perencanaan Pembangunan Kawasan permukiman yang tertata baik dan berkelanjutan dan hingga terwujudnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan Utilitas umum perumahan kawasan permukiman yang layak huni, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan.
11. Belum optimalnya pembangunan kawasan permukiman yang terkadang tidak tuntas dalam satu wilayah. Terbatasnya Kemampuan Keuangan Daerah (APBD) dalam Penyediaan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana Sarana Utilitas (PSU)

Perumahan Kawasan permukiman sehingga dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai prioritas kemampuan APBD, serta masih minimnya kegiatan Fisik yang bersumber dana APBD dalam mendukung Penanganan Permukiman Kumuh dan Kolaborasi antar OPD melalui Pokja PKP belum optimal dalam menuntaskan 7 indikator kumuh.

12. Belum optimalnya pengaturan dan pengendalian pengembangan kawasan perumahan permukiman. Peningkatan kebutuhan kawasan perumahan yang layak huni sebagai akibat pertumbuhan penduduk kota yang cukup tinggi mengingat Kota Singkawang merupakan salah satu kota tujuan wisata, perdagangan dan jasa di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pusat kegiatan (Wisata, Pemerintahan, Pendidikan, Perekonomian, jasa dsb.), peningkatan jumlah penduduk perkotaan berdampak pada kecenderungan pembangunan permukiman yang sporadis dan memberikan tekanan pada kawasan perkotaan dan akan berdampak menurunkan kesejahteraan masyarakat dan menyebabkan adanya kawasan perkotaan tidak inklusif dan tidak layak huni.
13. Belum Optimalnya Kuantitas dan Kualitas Penataan Pembangunan / Peningkatan / Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana sarana Dasar (PSD) dan Prasarana sarana utilitas Umum (PSU) Kawasan perumahan dan Permukiman Kumuh sesuai standar pelayanan minimal perkotaan.
14. Belum optimalnya pencegahan dan Peningkatan Kualitas permukiman serta permukiman kumuh, adanya beberapa perkembangan kawasan perumahan permukiman yang berpotensi menjadi Slum area (kumuh) baru. Pertumbuhan Pembangunan Perumahan Permukiman semakin berkembang pesat seiring bertambahnya Jumlah Penduduk/Jumlah Rumah Tangga sehingga berdampak pada Lingkungan Hunian yang belum tertata dengan baik. Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH) cenderung meningkat serta belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana dasar (PSD) dan utilitas umum (PSU) Perumahan kawasan permukiman yang memadai sehingga dapat memicu meluasnya permukiman kumuh.
15. Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga lingkungan perumahan permukiman agar tidak kumuh, serta belum optimalnya fasilitasi keterlibatan/peran aktif masyarakat dan pelaku usaha sehingga terbukanya kesempatan secara swadaya masyarakat/pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan/pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman guna meminimalisir slump area (kumuh) baru.
16. Belum optimalnya Penyiapan Pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap bangun (Lisiba) serta penyiapan lahan relokasi terdampak Program pemerintah dan terdampak bencana.
17. Masih kurangnya penguatan/pembaharuan kebijakan yang ada tentang pencegahan dan peningkatan perumahan kumuh dan permukiman kumuh (Perda No 8 Tahun 2018 terkait pencegahan dan peningkatan Kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilakukan reviu/revisi mengingat sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan saat ini).
18. Belum Optimalnya Penyuluhan/himbauan/sosialisasi dan fasilitasi pelayanan keluhan masyarakat akan permasalahan pemanfaatan ruang kota/informasi lahan terkait bidang pertanahan di kota

singkawang.

19. Masih terjadinya konflik, sengketa, perkara masalah Pertanahan di wilayah Kota Singkawang terkait pada tata kelola pemanfaatan penggunaan, dan penguasaan tanah seperti belum optimalnya penatagunaan tanah, masih terjadi tumpang tindih alas hak kepemilikan tanah termasuk batas-batas tanah, dan adanya potensi terjadinya konflik di masyarakat terkait penggunaan tanah terhadap aktifitas kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar lokasi, serta belum optimalnya Pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian/santunan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dapat menimbulkan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan.
20. Belum optimalnya penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak serta tanah garapan.
21. Belum tersedianya regulasi/aturan yang mengatur pelaksanaan/petunjuk teknis mengenai izin membuka Tanah Negara (IMTN). Maka diperlukan legalitas/kepastian hukum dalam bentuk perwako yang mengatur tentang Izin Membuka Tanah Negara.
22. Belum optimalnya fasilitasi dan peningkatan pemahaman/ keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar operasional prosedur.
23. Belum optimalnya survey tata ruang oleh dinas terkait terhadap izin pengelolaan tanah garapan serta aktifitas didalamnya.
24. Belum optimalnya sosialisasi tentang tata ruang terhadap tata guna lahan pada pola ruang wilayah dalam bentuk perda tata ruang atau sistem informasi tata ruang oleh instansi terkait.
25. Belum terinventarisir dan terpetakan secara keseluruhan terhadap bidang tanah yang dapat dikelola optimal guna memudahkan akses investor maupun masyarakat Kota Singkawang serta aturan yang mengikatnya.
26. Belum tersedianya regulasi/perwako yang mengatur zona nilai tanah dan bangunan di wilayah Kota Singkawang.
27. Belum optimlnya (belum tuntasnya) Pendataan terhadap zonasi nilai tanah dan bangunan di Kota Singkawang, belum mencakup seluruh wilayah kota Singkawang (masih bertahap).
28. Belum tersedianya regulasi tata kelola pertanahan, diperlukan perumusan terhadap Perda/Perwako yang mengatur tentang tata kelola pertanahan.
29. Belum optimalnya (belum tuntasnya) inventarisasi terhadap luasan tanah masyarakat yang menempati wilayah tanah ulayat, kondisi di dalam dan di sekitar tanah ulayat oleh dinas terkait, serta diperlukan pemetaan dan penetapan secara legal oleh bidang pertanahan dan BPN terhadap lokasi dan luasan tanah ulayat.
30. Belum tersedianya regulasi/kebijakan Peraturan Daerah (perda/perwako) pemanfaatan/pengelolaan tanah kosong.
31. Belum optimalnya Penatagunaan Tanah, belum tersedianya regulasi Perda RDTR di wilayah perkotaan.
32. Belum optmimalnya penyediaan/pengembangan Sistem informasi Pengelolaan pertanahan yang handal dan terpadu didukung data base pertanahan yang valid, terinventarisir, pengelolaan arsip pertanahan, serta pemanfaatan tanah di wilayah Kota Singkawang secara tertib sesuai

kewenangan pemerintah daerah.

33. Belum terlaksananya penertiban kepemilikan tanah masyarakat tanah kelebihan maksimum dan absente serta belum tersedianya regulasi/kebijakan daerah yang mengaturnya.
34. Belum optimalnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Keterpaduan lintas Dinas/Instansi terkait maupun instansi vertikal dan sinergitas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
35. Masih terbatasnya jumlah aparatur yang ada dan SDM yang berkompeten dibidangnya (ahli tofografi bidang pertanahan arsitektur/teknik sipil di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman), serta masih kurangnya pemahaman aparatur terkait ketentuan peraturan/kebijakan hukum dibidang pertanahan.
36. Belum optimalnya pemahaman aparatur, pola pikir/mindset dan budaya kerja, menyusun rencana kinerja yang berorientasi pada hasil/outcome, impact serta mengoptimalkan pelayanan publik dan inovasi Daerah.
37. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kerja/operasional dalam mendukung optimalisasi kinerja dan pelayanan publik yaitu; gedung kantor (ruangan kerja), fasilitas dan peralatan kerja kantor serta sarana transportasi yang memadai dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen RKPD Kota Singkawang tahun 2024 ini memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Singkawang, program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja pemerintah daerah

Perencanaan pembangunan kota tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Perencanaan pembangunan kota merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2024 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 dengan tema : **“Mempercepat Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, yang di jabarkan Dalam 7 Prioritas Nasional (PN) yaitu :

1. PN 1 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumabuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. PN 2 adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. PN 3 adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing.
4. PN 4 Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan.
5. PN 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. PN 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. PN 7 adalah memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

### ➤ **Prioritas Pembangunan Daerah**

Perencanaan pembangunan kota tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Perencanaan pembangunan kota merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Pembangunan nasional yang

ditetapkan untuk tahun 2024 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 dan RKPD Provinsi Kalimantan Barat yang sampai dengan saat ini masih dalam tahap penyusunan.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui

5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses kekawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang. Pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SD menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia :

Untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan tahun 2024 dan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 pada RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, maka prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Pengurangan Kemiskinan Dan Pengangguran Melalui Pembangunan Perekonomian Yang Merata
5. Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Adapun tema pembangunan pada RKPD Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

Untuk mewujudkan keselarasan antara prioritas pembangunan Kota Singkawang dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, maka RKPD Kota Singkawang tahun 2024 ditetapkan dengan tema **“Percepatan Pembangunan Infrastruktur**

## **Yang Berkontribusi Pada Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi serta Suksesnya Pemilu 2024”.**

Berdasarkan hasil analisa terhadap isu-isu strategis pembangunan, prioritas pembangunan nasional, RKPDP Provinsi, RPD Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026, maka :

I. Rancangan prioritas pembangunan Kota Singkawang Tahun 2024, yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter;
- 2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing;
- 3) Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 4) Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi;
- 5) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya.

Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas pembangunan daerah Kota Singkawang dimaknai sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter;  
Diarahkan pada upaya mewujudkan:
  - a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
  - b. Peningkatan kualitas pendidikan;
  - c. Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga;
  - d. Peningkatan pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah.
- 2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing;  
Diarahkan pada upaya mewujudkan:
  - a. Peningkatan daya saing daerah melalui penerapan inovasi daerah;
  - b. Peningkatan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan;
  - c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi disektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM;
  - d. Peningkatan ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan perikanan;
- 3) Peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata  
Diarahkan pada upaya mewujudkan:
  - a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - a. Peningkatan kualitas penataan ruang dan penataan bangunan;
  - b. Peningkatan sampah yang dikelola;

- c. Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar;
  - d. Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi.
- 4) Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pelayanan publik yang berbasis inovasi dan teknologi informasi;  
Diarahkan pada upaya mewujudkan:
- a. Peningkatan kualitas pelayanan public dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - b. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 5) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya.  
Diarahkan pada upaya mewujudkan:
- a. Peningkatan pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik;
  - b. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
  - d. Peningkatan pengembangan kelestarian budaya

## II. Program Perangkat Daerah yang menjadi prioritas :

- 1) Program penguatan layanan kesehatan yang merata, terjangkau dan bermutu;
- 2) Program optimalisasi akses dan kualitas pendidikan;
- 3) Program peningkatan kualitas dan kuantitas olahragawan yang berprestasi;
- 4) Program peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pembangunan;
- 5) Program peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
- 6) Program peningkatan keikutsertaan keluarga dalam Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- 7) Program peningkatan daya saing dan investasi daerah;
- 8) Program penurunan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan;
- 9) Program peningkatan daya saing koperasi dan UMKM;
- 10) Program peningkatan daya saing sektor perdagangan dan industri;
- 11) Program optimalisasi sector ekonomi kreatif sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi;
- 12) Program peningkatan produksi, kualitas produksi pertanian dan perikanan;
- 13) Program peningkatan ketahanan pangan masyarakat;
- 14) Program pengembangan sector pariwisata secara inovatif dan berkelanjutan;
- 15) Program pengurangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- 16) Program optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- 17) Program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan;
- 18) Program peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar;
- 19) Program peningkatan pemenuhan infrastruktur pengembangan ekonomi

Implementasi program-program pembangunan yang secara operasional akan dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan pembangunan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku

ujung tombak dalam menentukan tercapainya sasaran pembangunan Kota Singkawang. Dengan keselarasan antara prioritas pembangunan Kota Singkawang dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, maka tercapainya sasaran-sasaran pembangunan Kota Singkawang akan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Adapun Telaahan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPDP Tahun 2025 menetapkan Prioritas Pembangunan Daerah bagi Dinas Perumahan kota singkawang terkait pada prioritas sebagai berikut :

**Rancangan prioritas pembangunan Kota Singkawang Tahun 2024 yaitu :**

- 1) Peningkatan pembangunan infrastruktur, penataan ruang, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Dengan arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas pembangunan daerah Kota Singkawang dimaknai pada :

- Peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata

Diarahkan pada upaya mewujudkan :

**1. Peningkatan Kualitas Penataan ruang dan penataan bangunan.**

**2. Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar.**

**Dengan Program Prioritas :**

- 20). Program peningkatan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar;
  - a. Penyediaan Utilitas dan sarana prasarana publik
    1. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
  - b. Pengembangan dan penataan kawasan
    1. Program Pengembangan Perumahan
    2. Program Kawasan Permukiman
    3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Adapun review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPDP Tahun 2025 yang menjadi prioritas utama pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dengan memperhatikan sasaran Pembangunan Daerah dengan mensinkronisasikan keterpaduan antara Renstra dan RPD serta RKPDP dan Renja Perangkat Daerah sehingga dapat mengakomodir program-program prioritas dengan pagu dana indikatif menyesuaikan kemampuan Keuangan Daerah (APBD). Berikut review Rancangan Awal RKPDP (dapat juga dilihat pada Lampiran Form T-C.31) sebagai berikut :

Tabel, 2.16 (Form Tabel T-C.31)

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 (Perubahan) Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat  
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				40.082.633.144					40.082.633.144			
	Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan				5.992.886.581					5.992.886.581			
1	1	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	DISPERKIMTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	5.992.886.581	1	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	DISPERKIMTA	1	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	5.992.886.581
1	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	83.837.342	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	1	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	83.837.342
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	1) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen (Renjal/Renja Perubahan)	13.838.810	1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen (Renjal/Renja Perubahan)	13.838.810
		2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen (RKA)	4.999.180	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISPERKIMTA	2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen (RKA)	4.999.180
		3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen (Perubahan RKA)	4.999.652	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DISPERKIMTA	3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen (Perubahan RKA)	4.999.652
		4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen (DPA)	4.998.760	4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DISPERKIMTA	4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen (DPA)	4.998.760
		5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen (Perubahan DPA)	4.999.180	5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DISPERKIMTA	5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen (Perubahan DPA)	4.999.180

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6)	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6)	8 Laporan	30.002.300	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6)	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6)	8 Laporan	30.002.300	
			Jumlah Laporan (LKPJ-LPPD, SPM, RFK, PERJANKIN, Realisasi PERJANKIN) -	8 Laporan	30.002.300			Jumlah Laporan (LKPJ-LPPD, SPM, RFK, PERJANKIN, Realisasi - PERJANKIN) -	8 Laporan	30.002.300	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 7)	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7)	5 Laporan	19.999.460	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 7)	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7)	5 Laporan	19.999.460	
			- Jumlah Laporan LAKIP/LKT -	1 Laporan	4.999.460			- Jumlah Laporan LAKIP/LKT -	1 Laporan	4.999.460	
			- Jumlah Laporan PMPRB -	1 Laporan	4.000.000			- Jumlah Laporan PMPRB -	1 Laporan	4.000.000	
			Jumlah Laporan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional/Jumlah Laporan Standar Kompetensi Jabatan -	1 Laporan	3.500.000			Jumlah Laporan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional/Jumlah Laporan Standar Kompetensi Jabatan -	1 Laporan	3.500.000	
			- Jumlah Laporan SPIP -	1 Laporan	4.000.000			- Jumlah Laporan SPIP -	1 Laporan	4.000.000	
			- Jumlah Laporan Inovasi Daerah -	1 Laporan	3.500.000			Jumlah Laporan Inovasi Daerah -	1 Laporan	3.500.000	
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> 2	<b>DISPERKIMTA</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> 2	<b>100%</b>	<b>3.859.774.994</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> 2	<b>DISPERKIMTA</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> 2	<b>100%</b>	<b>3.859.774.994</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1)	DISPERKIMTA	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1)	32 Orang/1 2 Bulan	3.490.107.996	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1)	DISPERKIMTA	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1)	32 Orang/1 2 Bulan	3.490.107.996	

	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 2) Tugas ASN	DISPERKIMTA	2) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	325.255.720	2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DISPERKIMTA	2) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	325.255.720	
			Cakupan Jasa administrasi keuangan yang disediakan (Pengelola Keuangan Pengelola Barang, Panitia Pengadaan, - PPK, PPTK, PPHP dan Operator Aplikasi )	1 Dokumen	325.255.720			Cakupan Jasa administrasi keuangan yang disediakan (Pengelola Keuangan Pengelola Barang, Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, PPHP dan Operator Aplikasi )	1 Dokumen	325.255.720	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan 3) Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 3) Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	11.026.880	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan 3) Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	11.026.880	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	11.010.298	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	11.010.298	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14.999.540	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14.999.540	
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 6) Tanggapan Pemeriksaan	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	7.374.560	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 6) Tanggapan Pemeriksaan	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	7.374.560	
3	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>DISPERKIMTA</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>12.204.900</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>DISPERKIMTA</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>12.204.900</b>	
	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.002.300	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.002.300	
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.196.260	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.196.260	

3) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPERKIMTA	3) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.006.340	3) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPERKIMTA	3) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.006.340
---	-------------	---	-----------	-----------	---	-------------	---	-----------	-----------

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Administrasi Kepegawaian dan Disiplin 4 Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	80.106.888	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Administrasi dan Disiplin 4 Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	80.106.888	
	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta 1) Atribut Kelengkapannya	DISPERKIMTA	1) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	30.106.888	1) Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DISPERKIMTA	1) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	30.106.888	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 2) Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DISPERKIMTA	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	46 Orang	50.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DISPERKIMTA	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	46 Orang	50.000.000	
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	892.085.462	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	892.085.462	
	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1)	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.998.300	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.998.300	
	2) Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	259.127.800	2) Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	259.127.800	
			Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%	259.127.800			Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%	259.127.800	
	ATK Perkantoran		Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang disediakan	1 Paket	70.184.580	ATK Perkantoran		Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang disediakan	1 Paket	70.184.580	
	Peralatan dan Perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kerja Perkantoran yang disediakan	1 Paket	188.943.220	Peralatan dan Perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kerja Perkantoran yang disediakan	1 Paket	188.943.220	
	3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	26.841.460	3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	26.841.460	

	4) Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.113.740	4) Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.113.740	
7.	5) Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.945.000	5) Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.945.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatorif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	551.059.162	6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DISPERKIMTA	6) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	551.059.162	
	7) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	7) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DISPERKIMTA	7) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	0	
7	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DISPERKIMTA</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>787.502.245</b>	<b>7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DISPERKIMTA</b>	<b>7 Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>787.502.245</b>	
	1) Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyediaan 1) Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.243.120	1) Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.243.120	
	2) Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	270.542.797	2) Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	270.542.797	
	3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	512.716.328	3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	512.716.328	
			Cakupan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	512.716.328			Cakupan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	512.716.328	
	PTT/Tenaga Kontrak-Jasa Pendukung Administrasi/Teknis - Perkantoran	DISPERKIMTA	Jumlah Orang Jasa Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran yang disediakan	14 Orang/1 2 Bulan	445.084.100	- PTT/Tenaga Kontrak-Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	DISPERKIMTA	Jumlah Orang Jasa Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran yang disediakan	14 Orang/1 2 Bulan	445.084.100	
	Makanan dan Minuman - Rapat/Tamu	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Makanan dan Minuman Tamu/Rapat yang disediakan	1 Paket/12 Bulan	67.632.228	- Makanan dan Minuman Rapat/Tamu	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Makanan dan Minuman Tamu/Rapat yang disediakan	1 Paket/12 Bulan	67.632.228	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	277.374.750	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	277.374.750	
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISPERKIMTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	119.490.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DISPERKIMTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	119.490.000	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - yang dipelihara	4 unit / 12 Bulan (60 Kali)	104.190.000			- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	4 unit / 12 Bulan (60 Kali)	104.190.000	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - yang dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit	15.300.000			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit	15.300.000	
2)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISPERKIMTA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	99.834.750	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DISPERKIMTA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	99.834.750	
3)	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISPERKIMTA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Peralatan gedung Kantor) yang dipelihara/direhabilitasi	85 Unit	58.050.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DISPERKIMTA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Peralatan gedung Kantor) yang dipelihara/direhabilitasi	85 Unit	58.050.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT				33.009.747.173					33.009.747.173	
1.	1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	KOTA SINGKAWANG	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah yang ditangani	100%	123.067.360	1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	KOTA SINGKAWANG	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah yang ditangani	100%	123.067.360	
	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	82.388.340	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	82.388.340	
	Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	59.779.820	Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	59.779.820	
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	11.126.980	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	11.126.980	
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	11.481.540	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	11.481.540	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	40.679.020	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	40.679.020	
1)	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	6 Unit Rumah	28.094.620	1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	6 Unit Rumah	28.094.620	
2)	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas 1) Penyediaan Rumah	3 Rumah Tangga	4.998.920	2) Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan 1) Rumah	3 Rumah Tangga	4.998.920	
3)	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Rumah Tangga yang terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah 1)	1 Rumah Tangga	4.998.920	3) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Rumah Tangga yang terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Fasilitas Penyediaan 1) Rumah	1 Rumah Tangga	4.998.920	
4)	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi masyarakat yang Terkena relokasi Program Kabupaten/Kota yang 1) Terbangun	1 Unit Rumah	2.586.560	4) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi masyarakat yang Terkena relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun 1)	1 Unit Rumah	2.586.560	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	KOTA SINGKAWANG	Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang) yang ditangani	55,47%	32.886.679.813	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	KOTA SINGKAWANG	Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang) yang ditangani	55,47%	32.886.679.813	
	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Perencanaan, Pembangunan/Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilities Umum (PSU) Lingkungan Perumahan	100%	32.886.679.813	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Perencanaan, Pembangunan/Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilities Umum (PSU) Lingkungan Perumahan	100%	32.886.679.813	
	1) Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	316.483.440	1) Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	316.483.440	
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	316.483.440	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	316.483.440	
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	237 Lokasi/Paket	32.394.268.793	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	237 Lokasi/Paket	32.394.268.793	
	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan (jalan dan drainase Lingkungan Perumahan)	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PSU lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang sudah menyerahkan Aset PSU yang terfasilitasi PSU	100%	32.394.268.793	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan (jalan dan drainase Lingkungan Perumahan)	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PSU lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang sudah menyerahkan Aset PSU yang terfasilitasi PSU	100%	32.394.268.793	
	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan (jalan dan drainase Lingkungan Perumahan)	KOTA SINGKAWANG	Jumlah lokasi PSU lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	237 Lokasi/Paket	32.394.268.793	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan (jalan dan drainase Lingkungan Perumahan)	KOTA SINGKAWANG	Jumlah lokasi PSU lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	237 Lokasi/Paket	32.394.268.793	

3)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1)	1 Laporan	21.943.000			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1)	1 Laporan	21.943.000	
4)	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 1)	1 Laporan	153.984.580	4)	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 1)	1 Laporan	153.984.580

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN				1.079.999.390					1.079.999.390	
3.	3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	KOTA SINGKAWANG	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani 1.1	50,83%	196.187.780	3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	KOTA SINGKAWANG	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani 1.1	50,83%	196.187.780	
			Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha) 1.2	50,0%	0			Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha) 1.2	50%	0	
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 3	Kota Singkawang	Luas Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan infrstruktur Kawasan Permukimannya 1.1	0,1 Ha	196.187.780	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 3	Kota Singkawang	Luas Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan infrstruktur Kawasan Permukimannya 1.1	0,1 Ha	196.187.780	

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	38.745.520	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	38.745.520	
	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	1) Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	157.442.260	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	1) Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	157.442.260	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	KOTA SINGKAWANG	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani	10,81%	883.811.610	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	KOTA SINGKAWANG	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani	10,81%	883.811.610	
			Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)	7,57%	883.811.610			Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)	7,57%	883.811.610	
	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	5 Ha	883.811.610	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	5 Ha	883.811.610	
			Cakupan Penanganan jumlah Unit RTLH bagi MBR untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh diluar kawasan permukiman kumuh	100%	883.811.610			Cakupan Penanganan jumlah Unit RTLH bagi MBR untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh diluar kawasan permukiman kumuh	100%	883.811.610	

	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1)	Kota Singkawang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 1)	34 Unit	883.811.610	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1)	Kota Singkawang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 1)	34 Unit	883.811.610	
		Kota Singkawang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi/Pembangunan baru	34 Unit	883.811.610		Kota Singkawang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi/Pembangunan baru	34 Unit	883.811.610	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERTANAHAN										
	BIDANG PERTANAHAN					1.944.453.440				1.944.453.440	
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	KOTA SINGKAWANG	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi	100%	10.789.200	1	KOTA SINGKAWANG	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi	100%	10.789.200	
1	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah/ Kota.	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi/ditangani	100%	10.789.200	1	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi/ditangani	100%	10.789.200	
1)	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen/Berita Acara	10.789.200	1)	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen/Berita Acara	10.789.200	
2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	KOTA SINGKAWANG	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	1.432.799.060	2	KOTA SINGKAWANG	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	1.432.799.060	
1	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	462.799.060	1	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	462.799.060	
1)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	462.799.060	1	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	462.799.060	
		KOTA	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah				KOTA	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah			

		SINGKAWANG	# Daerah Kabupaten/Kota	100%	64.899.060		SINGKAWANG	# Daerah Kabupaten/Kota	100%	64.899.060	
		KOTA SINGKAWANG	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	1 Dokumen	64.899.060		KOTA SINGKAWANG	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	1 Dokumen	64.899.060	
		KOTA SINGKAWANG	Jumlah laporan Tim Persiapan Kegiatan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah	1 Laporan	91.500.000		KOTA SINGKAWANG	Jumlah laporan Tim Persiapan Kegiatan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah	1 Laporan	91.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KOTA SINGKAWANG	Jumlah laporan iklan/reklame, film dan Pemotretan	1 Laporan	306.400.000		KOTA SINGKAWANG	Jumlah laporan iklan/reklame, film dan Pemotretan	1 Laporan	306.400.000	
	Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 2)	KOTA SINGKAWANG	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan 1)	1 Laporan	970.000.000	Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota 1)	KOTA SINGKAWANG	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan 1)	1 Laporan	970.000.000	
			Cakupan Ganti Rugi/Santunan Tanah/Kerohiman yang # terdampak Pembangunan	100%	970.000.000			Cakupan Ganti Rugi/Santunan Tanah/Kerohiman yang # terdampak Pembangunan	100%	970.000.000	
			Jumlah dokumen Ganti Rugi/Santunan Tanah/Kerohiman yang	1 Laporan	917.526.960			Jumlah dokumen Ganti Rugi/Santunan Tanah/Kerohiman yang terdampak Pembangunan	1 Laporan	917.526.960	

			terdampak Pembangunan								
			- Jumlah Dokumen Appraisal Penilaian Tanah	1 Laporan	50.000.000			Jumlah Dokumen Appraisal Penilaian Tanah	1 Laporan	50.000.000	
			- Jumlah Sertifikasi/ Pembuatan Alas Hak Tanah	1 Laporan	2.473.040			Jumlah Sertifikasi/ Pembuatan Alas Hak Tanah	1 Laporan	2.473.040	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	KOTA SINGKAWANG	Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa	0%		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	KOTA SINGKAWANG	Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa	0%	0	
										0	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	KOTA SINGKAWANG	Persentase Luas Potensi Pemanfaatan atas tanah kosong yang sudah diinventarisasi	0%		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	KOTA SINGKAWANG	Persentase Luas Potensi Pemanfaatan atas tanah kosong yang sudah diinventarisasi	0%	0	
5.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	KOTA SINGKAWANG	Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	0%		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	KOTA SINGKAWANG	Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	0%	0	
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	KOTA	Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan			PROGRAM PENATAGUNAAN	KOTA	Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan			

6	6.	SINGKAWANG	6	12%	500.865.180	6 TANAH	SINGKAWANG	6	12%	500.865.180	
	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 1	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Penggunaan/Pemanfaatan Tanah 1	100%	500.865.180	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 1	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Penggunaan/Pemanfaatan Tanah 1	100%	500.865.180	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 1)	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) 1) Kabupaten/Kota	20 Laporan	293.480.530	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 1)	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) 1) Kabupaten/Kota	20 Laporan	293.480.530	
	Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 2)	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk menetapkan Zonasi Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan 1) Pertanahan Lainnya	2 Dokumen	207.384.650	Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 1)	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk menetapkan Zonasi Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan 1) Lainnya	2 Dokumen	207.384.650	
			<b>JUMLAH</b>		<b>42.027.086.584</b>			<b>JUMLAH</b>		<b>42.027.086.584</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah Merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil proses Perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan Proses bottom Up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga peyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang mengakomodir aspirasi masyarakat melalui forum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui reses DPRD (Pokok-pokok Pikiran) yang kemudian di sinkronisasikan, diverifikasi dan dimasukkan kedalam program kegiatan dan di lakukan entry kedalam sistem aplikasi SIPD dan dapat juga dilihat pada (tabel 2.16 Form T-C-32) dengan program sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)** dengan kegiatan:  
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, yaitu Pembangunan/Peningkatan Jalan Di Lingkungan perumahan dengan Lokasi tersebar di 5 kecamatan.
2. **Program Kawasan Permukiman serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh :**
  - a. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadya (BSPS) yang bersumber dana dari DAU-APBD Kota Singkawang yang merupakan Bantuan sosial dengan sasaran Rehabilitasi Rumah Tidak layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan lokasi tersebar di 5 kecamatan di Kota Singkawang.
  - b. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

Tabel 2.17 (Form Tabel T-C.32.)

**USULAN PROGRAM KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN  
TAHUN 2024**

NO	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
<b>I Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>					
<b>A. Bidang Perumahan Rakyat</b>					
1	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>		Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang ditangani	55,47%	
	<b>1 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>		Cakupan Perencanaan, Pembangunan/Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilities Umum (PSU) Lingkungan Perumahan	100%	
	<b>Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</b>		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	7 Lokasi.Paket	
		1 Komplek BTN Agung Lestari III Kel. Sei Wie, Kota Singkawang	Pembangunan Paving Blok Jalan Gang Perumahan	1 Paket	Pembangunan jalan
		2 TKN Pembina Jl. Manggis, Perumnas Roban Kecamatan Singkawang Tengah, Kota	Pembangunan Paving Blok Jalan Gang Perumahan	1 Paket	Peningkatan Jalan Paving Blok di TKN Pembina
		3 Jalan Jeruk 3 RT 59 RW 13 Perumnas Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah , Kota Singkawang	Pembangunan Paving Blok Jalan Gang Perumahan	1 Paket	Paving Block 125 M Lebar 3 M
		4 Jl. Pramuka Amethyst Resident Rt. 019/ Rw. 007 Kel. Sekip Lama, Kota Singkawang	Pembangunan Paving Blok Jalan Gang Perumahan	1 Paket	Pemasangan Paving Jalan
		5 Jalan Wonosari Gang Arta I Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah , Kota Singkawang	Pembangunan Paving Blok Jalan Gang Perumahan	1 Paket	Pemasangan Paving Block
		6 Jalan Belimbing Perumnas Kel Roban Singkawang Tengah , Kota Singkawang	Pembangunan Paving Blok Jalan Gang Perumahan	1 Paket	Pemasangan Paving Block
		7 Jl. Griya Tawang Asri Kel. Condong, Kota Singkawang	Pembangunan saluran Permukiman	1 Paket	Pembangunan saluran Permukiman
		8. Jl. Persatuan ( Gg. Buntu Jl.DwiWarna )	Pembangunan dan/atau Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Paket	Pembangunan Jalan
		9 Jalan Teluk Danau TR 8 Kel. Semelagi Kecil Kec. Singkawang Utara, Kota Singkawang	Pembangunan Jalan	1 Paket	Penimbunan Jalan (3 x 200 M)
		10 Gg. Persatuan Rt. 12 Rw. 04 Kel. Bukit Batu Ke. Singkawang Tengah	Pemeliharaan Jalan	1 Paket	Rabat Beton

		11 Jl .Hansip Gg. Cengkeh Rt. 05 Rw. 02 Kel. Roban	Pembangunan dan/atau Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Paket	pengaspalan Jalan
		12 Jl. Pemakaman Jambi RT. 003/RW. 02	Pembangunan dan/atau Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Paket	Perbaikan Jalan
		13 Jl. Nek Sangko RT. 008/RW. 001 ± 70 Meter	Pembangunan dan/atau Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Paket	Perbaikan Jalan

NO	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		14 Jl. P. Natuna Arah Kuburan RT/016± 100 Meter	Pembangunan dan/atau Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Paket	Perbaikan Jalan
		15 Jl. Pasar Turi Dalam RT. 011/RW. 004 ± 100 Meter	Pembangunan dan/atau Perbaikan Jalan dan Jembatan/Box Culvert	1 Paket	Perbaikan Jalan
		16 Gg. Teho RT. 17 Kelurahan Sedau	Pembangunan dan/atau Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Paket	Peningkatan Jalan Paving
		17 Gg. Swadaya RT. 09 Sijangkung	Pembangunan dan/atau Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Paket	Pemasangan Paving Jalan
		18 Jl. Cisdane, Jalur IX Pasiran	Pembangunan Paving Blok Gang Perumahan	1 Paket	Pemasangan Paving Jalan
		19 Gg. Rambai RT. 35/RW. 006 Kel. Sedau	Pembangunan dan/atau Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Paket	Peningkatan Jalan Paving
		20 Gg. Sayur Jl.Sagatani rt.25 Sempalit	Pembangunan dan/atau Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Paket	Pemasangan Paving Jalan
		21 Gg.Swakarsa Jl.Dwi Warna Kel.Melayu	Pembangunan Paving Blok Gang Perumahan	1 Paket	Pemasangan Paving Jalan
		22 Gg. Guntur Jl.Pelangi	Pembangunan dan/atau Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Paket	Perbaikan Jalan
		23 Gg.Persatuan 3 dan 2 Jl.Veteran	Pembangunan Paving Blok Gang Perumahan	1 Paket	Paving Block
		24 Jl. Masjid, Gg. Bersinar, Rt.008/Rw.04 Kel. Sungai Bulan Kec. Singkawang Utara	Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Paket	Jalan Lingkungan
		25 Gg. Kemuningan Kel. Kamp Jawa Kec. Singkawang tengah	Pembangunan dan/atau Perbaikan Jalan dan Jembatan/Box Culvert	1 Paket	Peningkatan Jalan Paving Blok
		26 Gg. Madani Rt. 02 Kel. Bukit Batu Kec. Singkawang Tengah	Pembangunan dan/atau Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Paket	Peningkatan Jalan Paving
		27 Jalan Sindan sana dan sekitarnya	Pembangunan dan/atau Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Paket	Pemasangan Paving Jalan
		28 Gg. Nyiur dan sekitarnya	Pembangunan Paving Blok Gang Perumahan	1 Paket	Pemasangan Paving Jalan

		29 Gg. Sampang Rt. 01 Rw. 02 Kel. Sedau Kec. Singkawang Selatan	Pembangunan dan/atau Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Paket	Peningkatan Jalan Paving
		30 Jl. Tani Gg. Meranti 1 Blok Sundi Zakaria Kec. Singkawang Barat (tembus blok Sitam Saleh)	Pembangunan dan/atau Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Paket	Pemasangan Paving Jalan
		31 Jl. Air Merah/Simajat Rt. 027 Rw. 05 Kel. Sijangkung	Pembangunan Paving Blok Gang Perumahan	1 Paket	Pemasangan Paving Jalan

NO	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		32 Jl. Pramuka Gg. Haji Bagi Blok G, 10 Singkawang Tengah	Pembangunan dan/atau Perbaikan Jalan Lingkungan Permukiman	1 Paket	Perbaikan Jalan
		33 Jl. Sekawan Gg. Ngadimin Rt. 016 Rw. 02 Kel. Roban	Pembangunan Paving Blok Gang Perumahan	1 Paket	Paving Block
		34 Jl. Raya Sedau Gg. A. Rais. Rt. 61 Rw. 10 Kel. Sedau	Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Paket	Jalan Lingkungan
		35 Jl. Juanda RT.4, RT 2 kel. Mayasopa Kec. Skw Timur	Peningkatan Jalan Lingkungan (Lanjutan())	1 Paket	Jalan Lingkungan
		36 Jl. Kalimantan Gg. Kalimantan Indah, Kec. Singkawang Tengah	Peningkatan Jalan Lingkungan (Lanjutan())	1 Paket	Jalan Lingkungan
		37 Jl. Parinto RT. 03/RW.02 Menuju Rt.04 Kel. Mayasofa, Kec Singkawang Timur, Kota Singkawang	Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Paket	Jalan Rusak
		38 Gg. Usaha, RT. 007/RW. 001 Kel. Sungai Garam Hilir, Kec. Singkawang Utara	Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Paket	Jalan Rusak
		39 Jl. Raya Sedau Gg. Permata Block 2 Rt.10/Rw/ 003	Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Paket	Jalan Rusak 3mx200m
		40 Jl. Tani , Gg. Cisdane Jalur IX dan Jalur X, Kel. Pasiran	Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Paket	Jalan Rusak
		41 Jl. Arung Raden, RT.04/RW. 02, Kel. Sungai Rasau	Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Paket	Jalan Rusak
		42 Gg.Aculacah Semanak Sanggau Kulor	Peningkatan Jalan Lingkungan	1 Paket	Jalan Rusak
<b>B</b>	<b>Bidang Kawasan Permukiman</b>				
<b>1</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>		Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani	65%	
			Jumlah Fasilitasi/Monitoring Rumah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi (DAU)	50%	
	<b>Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>		Luas Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan infrastruktur Kawasan Peremukimannya	2 Ha	

			Cakupan Penanganan Jumlah Unit RTLH Bagi MBR pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)	100%	
	<b>Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh</b> 1)	Kota Singkaawang	1) Luas Permukiman Kumuh Yang diRemajakan/ Dipugar	2 Ha	
		Jl. Parit Ketapang Gg.39 Rt.014/Rw.003, Kelurahan Melayu, Kota Singkawang	Pembangunan Saluran Drainase Perumahan	1 Paket	

NO	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		Jl.Parit Ketapang Blok III Rt.014/Rw.003, Kelurahan Melayu, Kota Singkawang	Pembangunan Paving Blok Jalan Gang Perumahan	1 Paket	
		Gg. H.Ackhmal RT.005/002, Kelurahan Tengah, Kota Singkawang	Pembangunan Saluran Drainase Perumahan	1 Paket	
		Gg. Amal RT.003 RW.001, Kelurahan Jawa, Kota Singkawang	Pembangunan Saluran Drainase Perumahan	1 Paket	
		Jl. Siaga, Gg. Amanah, Kelurahan Roban, Kota Singkawang	Pembangunan Paving Blok Jalan Gang Perumahan	1 Paket	
		Jl. Siaga, Gg. Bersama, Kelurahan Roban, Kota Singkawang	Pembangunan Paving Blok Jalan Gang Perumahan	1 Paket	
		Jl. Siaga, Gg. Bersama 3, Kelurahan Roban, Kota Singkawang	Pembangunan Paving Blok Jalan Gang Perumahan	1 Paket	
		Jl. Siaga, Gg. Bersama 4, Kelurahan Roban, Kota Singkawang	Pembangunan Paving Blok Jalan Gang Perumahan	1 Paket	
		Gg. Bersama,, Kel. Roban, Kota Singkawang	Pembangunan Paving Blok Jalan Gang Perumahan	1 Paket	
<b>1</b>	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>		Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani	7,57%	
			Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)	10,8%	
	<b>Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b> 1		Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	5 Ha	
			Cakupan Penanganan jumlah Unit RTLH bagi MBR untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh diluar kawasan permukiman kumuh	100%	
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1)	Kota Singkawang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	8 Unit	

		1 Jl. Mahad Usman, Rt.015, Kota Singkawang	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Renovasi Rumah Warga yang kurang mampu
		2 Jl. RA.Kartini, Rt018/006 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Renovasi Rumah Tidak Layak Huni an. Ibu Karyati/Bapak Pendi
		3 RT 12 Kel. Bukit Batu Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Bedah Rumah an. Natali
		4 6 Kelurahan Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Bantuan Sosial
		5 Warga a/ n Dayang di Kel. Kuala, Kota Singkawang	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Hibah/ Bantuan Sosial

NO	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
		6 Warga a/ n Ego Novianto, Kota Singkawang	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Hibah/ Bantuan Sosial
		7 Rumah Bapak Ridho Habibi Jl. Gunung Merapi No. 08 Rt. 029/ Rw. 012 Kel. Pasiran, Kota Singkawang	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Hibah/ Bantuan Sosial
		8 Rumah Bapak Alpiansyah Jl. Gunung Merapi Gg. Warga Rt. 029/ Rw. 012 Kel. Pasiran, Kota Singkawang	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	Hibah/ Bantuan Sosial
		8 Rumah Jl. Gambir no. 17 RT.2 kel. Mayasopa Kec. Skw Timur	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	1 Unit	RTLH
	<b>Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan 1) Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	8 Dokumen	Potensi Kumuh
		1 Jl. Aliyanyang Gg. Nusantara RT/RW.003/006, Kelurahan Tengah, Kota Singkawang	Pembangunan Saluran Drainase Perumahan	1 Paket	Potensi Kumuh
		2 Gg. Sawi RT/RW.003/001, Kelurahan Jawa, Kota Singkawang	Pembangunan Saluran Drainase Perumahan	1 Paket	Potensi Kumuh
		3 SDN 30 RT/RW.005/002, Kelurahan Tengah, Kota Singkawang	Peningkatan Jalan dalam Gang	1 Paket	Potensi Kumuh
		4 Jl. Pendidikan RT/RW.006/002, Kelurahan Jawa, Kota Singkawang	Pembangunan Saluran Drainase Perumahan	1 Paket	Potensi Kumuh
		5 Jalan Jend. Sudirman Gang Amal I dan Gang Mursid RT/RW.011/002 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang	Pembangunan Paving Blok Jalan Gang Perumahan	1 Paket	Potensi Kumuh

		6 Jl. Jenderal Sudirman Gg. Aliaman Kel. Roban , Kota Singkawang	Pembangunan Paving Blok Jalan Gang Perumahan	1 Paket	Potensi Kumuh
		7 Jl. Yos Sudarso, Gg. Parit Ketapang, Kota Singkawang	Pembangunan Paving Blok Jalan Gang Perumahan	1 Paket	Potensi Kumuh
		8 Jl. Sama - sama, Gg. Gotong Royong, Kelurahan Pasiran, Kota Singkawang	Pembangunan Paving Blok Jalan Gang Perumahan	1 Paket	Potensi Kumuh

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tabel 3.1

Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2024

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas
I.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangandan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan</li><li>2. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi Kreatif dan digital</li></ol>
II.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulandaerah</li><li>2. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan kewilayah yang belum berkembang</li><li>3. Penguatan kemampuanSDM dan lptek berbasis keunggulan wilayah</li><li>4. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata</li><li>5. Peningkatan daya dukung lingkungan serta Ketahanan bencana dan perubahan iklim</li></ol>
III.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan</li><li>2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial</li><li>3. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta</li><li>4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas</li><li>5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan Pemuda</li><li>6. Pengentasan kemiskinan</li><li>7. Peningkatan produktivitas dan daya saing</li></ol>
IV.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Revolusi mental dan pembinaan ideology pancasila</li><li>2. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan</li><li>3. Moderasiberagama</li><li>4. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas</li></ol>

No.	Prioritas Nasional	Program Prioritas
V.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar</li> <li>2. Pembangunan konektivitas multi moda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi</li> <li>3. Pembangunan infrastruktur perkotaan</li> <li>4. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan</li> <li>5. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital</li> </ol>
VI	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup</li> <li>2. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim</li> <li>3. Pembangunan rendah karbon</li> </ol>
VII	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan berkualitas</li> <li>2. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan</li> <li>3. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber</li> <li>4. Peningkatan akses terhadap keadilan dan system anti korupsi</li> <li>5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri</li> <li>6. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan</li> </ol>

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 “**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent*
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap

perubahan iklim);

7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

- ***Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan***

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKP Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah.

Adapun Agenda pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional RKP Tahun 2024 yang menjadi Telaahan dan dipedomani sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang pada Tabel (3.1) sebagai berikut :

Agenda Pembangunan Yaitu :

1. ***Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.***

Agenda pembangunan ini diturunkan kedalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

- a. Infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu
  - 1) Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
- b. Infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu
  - 1) konektivitas jalan;

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan adalah suatu pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk seluruh isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi optimal yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional. Sedangkan perumusan sasaran bertujuan menjabarkan pernyataan tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Kota Singkawang pada RPD Periode Tahun 2023-2026. Tujuan merupakan arah yang akan tempuh dan dicapai dan berfokus pada Sasaran Pembangunan Daerah serta berdasarkan kepada isu dan analisis strategi dan Kebijakan.

Perumusan Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan sasaran target Kinerja Perangkat Daerah dan berdasarkan Arah Tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah/Perubahan RPD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, serta memperhatikan Kesesuaian dengan Agenda Pembangunan Nasional yang tercantum dalam RPJMN, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel. 3.2

#### **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA SINGKAWANG** **Yang Menjadi Acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**

Sasaran (tujuan PD)	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3
Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur pelayanan Dasar	Peningkatan kualitas rumah rusak/tidak layak huni
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban korban bencana
		Fasilitasi peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai
		Peningkatan pengelolaan Air Bersih
		Peningkatan pengelolaan Sanitasi
Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang
		Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan pertanahan

**Tabel 3.3**  
**TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI RPD PERUBAHANTAHUN 2023-2026**  
**Yang Menjadi Acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**

Tujuan	Sasaran (tujuan PD)	Strategi
1	2	3
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur pelayanan Dasar
	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mengacu pada RPD/RPD Perubahan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, sebagaimana ditetapkan dalam Renstra/Perubahan Renstra Dinas Perumahan, permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang tahun 2023-2026, serta dengan memperhatikan RKPD tahun berkenaan adalah sebagai berikut (Tabel 3.3) :

Adapun perumusan tujuan dan sasaran sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (DISPERKIMTA) dengan memperhatikan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu dengan uraian sebagai berikut :

**Tujuan ke - 3 : Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan**

Sasaran ke- 1 : Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar

Sasaran ke- 2 : Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan

**1. Bidang Perumahan Rakyat**

- Tujuan :

**Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.**

Indikator tujuan : Cakupan ketersediaan rumah layak huni.

- Sasaran :

1) Meningkatnya rumah layak huni

- Indikator Sasaran :

- Persentase rumah layak huni

**1. Bidang Kawasan Permukiman**

- Tujuan :

### **Terwujudnya Infrastruktur Pelayanan Dasar.**

1. Indikator tujuan 1 :Persentase Luasan Permukiman kumuh di kawasan perkotaan

- Sasaran :
  - Meningkatnya Penanganan luas kawasan Permukiman kumuh di bawah 10 ha
- Indikator Sasaran : Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha).

### **2. Bidang Pertanahan**

- Tujuan :
  - Meningkatnya kualitas pentaan ruang dan penataan bangunan.
- Indikator Tujuan :
- Sasaran :
  - Meningkatnya penanganan Sengketa Tanah Garapan.
- Indikator Sasaran : Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

### **3. Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA)**

- Tujuan :
  - Meningkatnya Pelaksanaan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Indikator Tujuan :
  - 1) Persentase peningkatan pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Sasaran :
  - 1) Meningkatnya Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah di DISPERKIMTA.  
Indikator Sasaran :
  - 2) Meningkatnya implementasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- Indikator Sasaran :
  - 1) Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 2) Kategori Capaian SAKIP Disperkimta.

## **3.3 Program dan Kegiatan**

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan startegi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrumendari suatu kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah, selanjutnya program kegiatan haruslah memiliki suatu alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu program kegiatan yang disebut. Indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program kegiatan baik

secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan dan sasaran yang menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.

Adapun Program dan Kegiatan yang direncanakan berdasarkan sasaran pembangunan daerah sebagaimana RKPD Tahun anggaran 2024. Renja Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk tahun anggaran 2024 dengan Program dan kegiatan prioritas sesuai Tugas dan Fungsi Dinas dan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dengan faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024, dan telah menyesuaikan dengan Pemutakhiran pada sistem Aplikasi SIPD-RI yang terdiri dari 8 (Delapan) program dan 16 Kegiatan yaitu :

➤ **Program Prioritas**

**1. Program Pengembangan Perumahan.**

– Indikator kinerja Outcome ;

- 1 Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah yang ditangani, target 100%.

Program ini dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
  - 1) Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.
  - 2) Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana.
  - 3) Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus.
  - 4) Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.
  - 5) Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.
  - 6) Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
  - 7) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
  - 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana.
  - 2) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana.

- 3) Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
- 4) Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 5) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.
- 6) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

## **2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**

- Indikator kinerja Outcome ;
- 1 Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang) yang ditangani, target 55,47%.

Program Pengembangan Perumahan dengan rencana kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
  - 1) Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.
  - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
  - 4) Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang.

## **3. Program Kawasan Permukiman.**

- Indikator kinerja Outcome;
- 1 Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani, Target 50,83%
- 2 Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha), target 50%

Program ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman.
  - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman.
2. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.
  - 1) Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
  - 2) Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.
  - 1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

- 2) Sub Kegiatan Kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh.
- 4) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
- 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha.
- 6) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Permukiman Kumuh.

#### **4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**

- Indikator kinerja Outcome;
  - 1 Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani, Target 10,81%
  - 2 Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha), target 7,57%

Program ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota.
  - 1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

#### **5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

- Indikator kinerja Outcome ;
  - 1 Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi, target 100%

Program ini meliputi rencana kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
  - 1) Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota..
  - 2) Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota..

#### **6. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan**

- Indikator kinerja Outcome ;

1. Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan Target 100%.

Program ini meliputi rencana kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  - 1) Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota..
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### **7. Program Penatagunaan Tanah**

- Indikator kinerja Outcome ;

1. Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan target 12%

Program ini meliputi rencana kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
  - 2) Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota.

#### **8. Program Penetapan Tanah Ulayat**

- Indikator kinerja Outcome ;

Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa, Target 0%

#### **9. Program Pengelolaan Tanah Kosong**

- Indikator kinerja Outcome ;

Persentase Persentase Luas Potensi Pemanfaatan atas tanah kosong yang sudah di inventarisasi Target 0%

#### **10. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah**

- Indikator kinerja Outcome ;

- 1 Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN),target 0%

➤ **Program Penunjang/Pendukung**

Program Penunjang/pendukung (supporting program) Sekretariat pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, terdiri dari 1 (satu) program penunjang yaitu;

**1, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

- Indikator kinerja Outcome ;

- 1 Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerahtarget 100%

Program ini meliputi Kegiatan dan sub Kegiatan;

- 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - Sub Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - Sub Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - Sub Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Sub kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- 5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan luar daerah
  - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
  - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
  - Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Tabel 3.4 (Form Tabel T-C.33.)

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 (Perubahan) dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat**

**Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Kinerja APBD INDUK	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				SBLP	STLP	SBLP	SBLP	STLP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04.		<b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				32.577.177.791	32.577.177.791	40.082.633.144				31.604.200.295
		Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan				5.819.349.153	5.819.349.153	5.992.886.581				7.340.896.268
1.04.01.		<b>1. PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH</b>	DISPERKIMTA	100%	100%	5.819.349.153	5.819.349.153	5.992.886.581	APBD		100%	7.340.896.268
1.04.01.2.01.		<b>1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	DISPERKIMTA	100%	100%	83.837.342	83.837.342	83.837.342	APBD		100%	70.000.000
1.04.01.2.01.0001		1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	2 Dokumen (Renja/Renja Perubahan)	2 Dokumen (Renja/Renja Perubahan)	13.838.810	13.838.810	13.838.810	APBD		2 Dokumen (Renja/Renja Perubahan)	8.000.000
1.04.01.2.01.0002		2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISPERKIMTA	1) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1) Dokumen (RKA)	1) Dokumen (RKA)	4.999.180	4.999.180	4.999.180	APBD	1 Dokumen	5.000.000
1.04.01.2.01.0003		3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1) Dokumen (Perubahan RKA)	1) Dokumen (Perubahan RKA)	4.999.652	4.999.652	4.999.652	APBD	1 Dokumen (Perubahan RKA)	5.000.000
1.04.01.2.01.0004		4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DISPERKIMTA	1) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1) Dokumen (DPA)	1) Dokumen (DPA)	4.998.760	4.998.760	4.998.760	APBD	1 Dokumen (DPA)	5.000.000
1.04.01.2.01.0005		5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1) Dokumen (Perubahan DPA)	1) Dokumen (Perubahan DPA)	4.999.180	4.999.180	4.999.180	APBD	1 Dokumen	5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Kinerja APBD INDUK	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				SBLP	STLP	SBLP	SBLP	STLP				
				5	6	7	8	9	10		11	12
1.04.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan 6) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISPERKIMTA	8 Laporan	8 Laporan	30.002.300	30.002.300	30.002.300	APBD		8 Laporan	20.000.000
	Laporan (LPPD-LKPJ, SPM, Perjanjian Kinerja, Realisasi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Fisik dan Keuangan, MRI, Probis, Evaluasi Renja)	Jumlah Laporan (LPPD-LKPJ, SPM, Perjanjian Kinerja, Realisasi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Fisik dan Keuangan, MRI, Probis, Evaluasi Renja)	DISPERKIMTA	8 Laporan	8 Laporan	30.002.300	30.002.300	30.002.300	APBD		8 Laporan	20.000.000
1.04.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	5 Laporan	5 Laporan	19.999.460	19.999.460	19.999.460	APBD		5 Laporan	22.000.000
	- Laporan LAKIP/LKT	Jumlah Laporan LAKIP/LKT	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	4.999.460	4.999.460	4.999.460	APBD		1 Laporan	5.000.000
	- Laporan PMPRB	Jumlah Laporan PMPRB	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	APBD		1 Laporan	4.500.000
	Laporan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional	Jumlah Laporan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional/Jumlah Laporan Standar Kompetensi Jabatan	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	APBD		1 Laporan	4.000.000
	- Laporan Standar Kompetensi Jabatan	Jumlah Laporan SPIP	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	APBD		1 Laporan	4.500.000
	Laporan Inovasi Daerah	Jumlah Laporan Inovasi Daerah	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	APBD		1 Laporan	4.000.000
1.04.01.2.02	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>DISPERKIMTA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3.748.054.994</b>	<b>3.748.054.994</b>	<b>3.859.774.994</b>			<b>100%</b>	<b>4.698.893.938</b>
1.04.01.2.02.0001	1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DISPERKIMTA	36 Orang/12 Bulan	32 Orang/12 Bulan	3.490.107.996	3.490.107.996	3.490.107.996	APBD		32 Orang/12 Bulan	4.304.157.332
1.04.01.2.02.0002	2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	213.535.720	213.535.720	325.255.720	APBD		1 Dokumen	372.236.606
	Jasa administrasi keuangan yang disediakan (Pengelola Keuangan - Pengelola Barang, Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, PPHP dan Operator Aplikasi)	Cakupan Jasa administrasi keuangan yang disediakan (Pengelola Keuangan - Pengelola Barang, Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, PPHP dan Operator Aplikasi)	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	213.535.720	213.535.720	325.255.720	APBD		1 Dokumen	372.236.606
1.04.01.2.02.0003	3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	11.026.880	11.026.880	11.026.880	APBD		1 Dokumen	6.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Kinerja APBD INDUK	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana		Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	04.	01	2.02	0004	4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	11.010.298	11.010.298	11.010.298	APBD		1 Dokumen	6.000.000
1.	04.	01	2.02	0005	5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	14.999.540	14.999.540	14.999.540	APBD		1 Laporan	10.500.000
1.	04.	01	2.02	0006	6) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1) Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	7.374.560	7.374.560	7.374.560	APBD		-	-
1.	04.	01	2.03		<b>3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>3 Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	DISPERKIMTA	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>12.204.900</b>	<b>12.204.900</b>	<b>12.204.900</b>			<b>100%</b>	<b>30.700.000</b>
1.	04.	01	2.03	0001	1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	4.002.300	4.002.300	4.002.300	APBD		1 Dokumen	4.000.000
1.	04.	01	2.03	0005	2) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1) Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPERKIMTA	12 Laporan	12 Laporan	4.196.260	4.196.260	4.196.260	APBD		12 Laporan	4.200.000
1.	04.	01	2.03	0006	3) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	4.006.340	4.006.340	4.006.340	APBD		1 Laporan	4.000.000
1.	04.	01	2.05		<b>4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>4 Cakupan Administrasi Kepegawaian dan Disiplin Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	DISPERKIMTA	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80.106.888</b>			<b>100%</b>	<b>116.000.000</b>
1.	04.	01	2.05	0002	1) Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DISPERKIMTA	0%	1 Paket	-	-	30.106.888	APBD		-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Kinerja APBD INDUK	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				SBLP	STLP	SBLP	SBLP	STLP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04.01.2.05.0009	2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DISPERKIMTA	0%	46 Orang	-	-	50.000.000	APBD		46 Orang	116.000.000
1.04.01.2.06	5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Cakupan Pelayanan Admintrasi Umum Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	100%	100%	757.974.922	757.974.922	892.085.462			100%	752.239.421
1.04.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan 1) komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi 1) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket	24.998.300	24.998.300	24.998.300	APBD		1 Paket	31.738.026
1.04.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DISPERKIMTA	2 Paket	2 Paket	163.808.780	163.808.780	259.127.800	APBD		2 Paket	192.316.930
		Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	DISPERKIMTA	100%	100%	163.808.780	163.808.780	259.127.800	APBD		100%	192.316.930
		- ATK Perkantoran	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket	69.894.940	69.894.940	70.184.580	APBD		1 Paket	82.066.930
		- Peralatan dan Perlengkapan kantor	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket	93.913.840	93.913.840	188.943.220	APBD		1 Paket	110.250.000
1.04.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket	26.841.460	26.841.460	26.841.460	APBD		1 Paket	48.332.233
1.04.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1) Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket	28.311.740	28.311.740	21.113.740	APBD		1 Paket	36.071.132
1.04.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	8.945.000	8.945.000	8.945.000	APBD		1 Dokumen	10.781.100
1.04.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISPERKIMTA	12 Laporan	12 Laporan	501.059.162	501.059.162	551.059.162	APBD		12 Laporan	425.000.000
1.04.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	0 Dokumen	4.010.480	4.010.480	-	APBD		1 Dokumen	4.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Kinerja APBD INDUK	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
				SBLP	STLP	SBLP	SBLP	STLP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.04.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang 6 Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Prasarana sarana 5 operasional/kendaraan operasional Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	0%	-	-	-	-	-	-		100%	130.000.000
1.04.01.2.07.0002	1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1) Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	DISPERKIMTA	0%	-	-	-	-	-	-		6 Unit	80.000.000
1.04.01.2.07.0005	2) Sub Kegiatan Pengadaan Meubeleur	1) Jumlah Mebel yang diadakan	DISPERKIMTA	0%	-	-	-	-	-	-		5 Unit	50.000.000
1.04.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPERKIMTA	100%	100%	839.902.245	839.902.245	787.502.245				100%	860.322.615
1.04.01.2.08.0001	1) Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DISPERKIMTA	12 Laporan	12 Laporan	4.243.120	4.243.120	4.243.120	APBD			12 Laporan	4.678.304
1.04.01.2.08.0002	2) Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DISPERKIMTA	12 Laporan	12 Laporan	290.542.797	290.542.797	270.542.797	APBD			12 Laporan	296.001.905
1.04.01.2.08.0004	3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DISPERKIMTA	12 Laporan	12 Laporan	545.116.328	545.116.328	512.716.328	APBD			12 Laporan	559.642.405
		Cakupan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		100%	100%	545.116.328	545.116.328	512.716.328	APBD			100%	559.642.405
	PTT/Tenaga Kontrak-Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Orang Jasa Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran yang disediakan	DISPERKIMTA	16 Orang/12 Bulan	14 Orang/12 Bulan	445.084.100	445.084.100	445.084.100	APBD			15 Orang/12 Bulan	445.084.100
	Makanan dan Minuman Rapat/Tamu	Jumlah Paket Makanan dan Minuman Tamu/Rapat yang disediakan	DISPERKIMTA	1 Paket/12 Bulan	1 Paket/12 Bulan	100.032.228	100.032.228	67.632.228	APBD			1 Paket/12 Bulan	114.558.305
1.04.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang 8 Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPERKIMTA	100%	100%	377.374.750	377.374.750	277.374.750	APBD			100%	682.740.294
1.04.01.2.09.0002	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DISPERKIMTA	5 Unit	4 Unit	199.490.000	199.490.000	119.490.000	APBD			5 Unit	337.862.750
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	DISPERKIMTA	5 unit / 12 Bulan (60 Kali)	4 unit / 12 Bulan (60 Kali)	184.190.000	184.190.000	104.190.000	APBD			4 unit / 12 Bulan (60 Kali)	330.362.750
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan pajak dan perizinannya	DISPERKIMTA	5 Unit	4 Unit	15.300.000	15.300.000	15.300.000	APBD			4 Unit	7.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Kinerja APBD INDUK	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana		Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				SBLP	STLP	SBLP	SBLP	STLP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04.01.2.09.0009	Sub Kegiatan 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DISPERKIMTA	1 Unit	1 Unit	119.834.750	119.834.750	99.834.750	APBD		1 Unit	284.912.569
1.04.01.2.09.0010	Sub Kegiatan 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Peralatan gedung Kantor) yang dipelihara/direhabilitasi	DISPERKIMTA	80 Unit	85 Unit	58.050.000	58.050.000	58.050.000	APBD		85 Unit	59.964.975
1.04.	<b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					26.757.828.638	26.757.828.638	34.089.746.563				24.263.304.027
	<b>BIDANG PERUMAHAN RAKYAT</b>					25.707.829.068	25.707.829.068	33.009.747.173				11.973.300.701
1.04.02.	<b>1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Persentase Rumah Layak Huni Bagi 1 Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah yang ditangani	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	343.483.668	343.483.668	123.067.360	APBD		100%	900.000.000
1.04.02.2.01	1 Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Cakupan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	101.708.340	101.708.340	82.388.340	APBD		100%	285.000.000
1.04.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Pendataan Rumah 1) Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1) Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	KOTA SINGKAWANG	1 Dokumen	1 Dokumen	79.099.820	79.099.820	59.779.820	APBD		1 Dokumen	95.000.000
1.04.03.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi 2) Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon 1) Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	KOTA SINGKAWANG	1 Dokumen	1 Dokumen	11.126.980	11.126.980	11.126.980	APBD		1 Dokumen	12.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Kinerja APBD INDUK	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana		Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				SBLP	STLP	SBLP	SBLP	STLP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04.02.2.01.0010	Sub Kegiatan Pendataan dan 3) Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon 1) Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	KOTA SINGKAWANG	1 Dokumen	1 Dokumen	11.481.540	11.481.540	11.481.540	APBD		1 Dokumen	12.500.000
1.04.02.2.03	<b>Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi 2 Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	241.775.328	241.775.328	40.679.020	APBD		100%	615.000.000
1.04.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	KOTA SINGKAWANG	6 Unit Rumah	3 Unit Rumah	101.750.928	101.750.928	28.094.620	APBD		6 Unit Rumah	105.000.000
1.04.02.2.03.0007	2) Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban 1) Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	KOTA SINGKAWANG	1 Rumah Tangga	3 Rumah Tangga	4.998.920	4.998.920	4.998.920	APBD		1 Rumah Tangga	5.000.000
1.04.02.2.03.0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi 3) Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang terdampak 1) Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	KOTA SINGKAWANG	1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	4.998.920	4.998.920	4.998.920	APBD		1 Rumah Tangga	5.000.000
1.04.02.2.03.0011	Sub Kegiatan Pembangunan 4) Rumah Khusus beserta PSU bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi 1) masyarakat yang Terkena relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	KOTA SINGKAWANG	1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	130.026.560	130.026.560	2.586.560	APBD		1 Unit Rumah	192.500.000
1.04.05	<b>2. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas 1 Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang) yang ditangani</b>	KOTA SINGKAWANG	55,47%	55,47%	25.364.345.400	25.364.345.400	32.886.679.813	APBD		71,51%	11.073.300.701
1.04.05.2.01	<b>1 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Cakupan Perencanaan, 1 Pembangunan/Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilities Umum (PSU) Lingkungan Perumahan</b>	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	25.364.345.400	25.364.345.400	32.886.679.813	APBD		100%	11.073.300.701
1.04.05.2.01.0001	1) Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1) Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	KOTA SINGKAWANG	1 Dokumen	3 Dokumen	366.483.440	366.483.440	316.483.440	APBD		1 Dokumen	150.000.000
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	KOTA SINGKAWANG	1 Dokumen	3 Dokumen	366.483.440	366.483.440	316.483.440	APBD		1 Dokumen	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Kinerja APBD INDUK	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana		Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				SBLP	STLP	SBLP	SBLP	STLP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.04.05.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang 1) Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	KOTA SINGKAWANG	189 Lokasi/Paket	237 Lokasi/Paket	24.821.934.380	24.821.934.380	32.394.268.793	APBD		20 Lokasi/Paket	10.723.300.701
	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan (jalan dan drainase Lingkungan Perumahan)	Cakupan Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan * Prasarana dan Sarana PSU lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU) yang terfasilitasi PSU	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	24.821.934.380	24.821.934.380	32.394.268.793	APBD		100%	10.723.300.701
	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan (jalan dan drainase Lingkungan Perumahan)	Jumlah lokasi PSU lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	KOTA SINGKAWANG	189 Lokasi/Paket	237 Lokasi/Paket	24.821.934.380	24.821.934.380	32.394.268.793	APBD		20 Lokasi/Paket	10.723.300.701
1.04.05.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 1) Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan	21.943.000	21.943.000	21.943.000	APBD		1 Laporan	25.000.000
1.04.05.2.01.0010	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	1) Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan	153.984.580	153.984.580	153.984.580	APBD		1 Dokumen	175.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Kinerja APBD INDUK	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana		Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
				SBLP	STLP	SBLP	SBLP	STLP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.04		URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
		BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN				1.049.999.570	1.049.999.570	1.079.999.390					12.290.003.326
1.04.03	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	KOTA SINGKAWANG	65,14%	50,83%	239.060.930	239.060.930	196.187.780				83,51%	8.290.003.326
		1.1 Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani											
		1.2 Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)		50%	50%	-						75%	892.000.000
1.04.03.2.03	1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Singkawang	2 Ha	0,1 Ha	239.060.930	239.060.930	196.187.780	APBD			2,44 Ha	8.040.003.326
		1.1 Luas Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan infrstruktur Kawasan Permukimannya											
		1.2 Cakupan Penanganan Jumlah Unit RTLH Bagi MBR pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)	Kota Singkawang	100%	100%	-			APBD			100%	892.000.000
1.04.03.2.03.0004		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	1 Laporan	1 Laporan	85.035.950	85.035.950	38.745.520	APBD			1 Laporan	85.000.000
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh											
1.04.03.2.03.0007		Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	1 Dokumen	1 Dokumen	154.024.980	154.024.980	157.442.260	APBD			1 Dokumen	50.000.000
		1) Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi											



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025							
				Kinerja APBD INDUK	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana		Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif						
				SBLP	STLP	SBLP	SBLP	STLP										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
2	10						1.894.974.380	1.894.974.380	1.944.453.440				4.667.453.364					
							100%	100%	1.894.974.380	1.894.974.380	1.944.453.440		100%	4.667.453.364				
2	10	04		1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	10.789.200	10.789.200	10.789.200	APBD		100%	120.900.000	
2	10	04	201	1	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah/ Kota.	1	Cakupan Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi/ditangani	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	10.789.200	10.789.200	10.789.200	APBD		100%	120.900.000	
2	10	04	201	0001	Sub Kegiatan Inventarisasi 1) Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	1	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	0%	-	-	-	-			100%	45.000.000	
2	10	04	201	0002	Sub Kegiatan Mediasi 2) Penyelesaian Sengketa Tanah Gerapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi 1) Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	1	1	10.789.200	10.789.200	10.789.200	APBD		1	Dokumen/Berita Acara	75.900.000
2	10	05		2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	1.400.000.000	1.400.000.000	1.432.799.060	APBD		100%	2.959.600.000	
2	10	05	201	1	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1	Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	1.400.000.000	1.400.000.000	1.432.799.060	APBD		100%	1.379.600.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
				Kinerja APBD INDUK	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana		Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
				SBLP	STLP	SBLP	SBLP	STLP							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	10	05	201	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	462.799.060	APBD	1 Dokumen	1.379.600.000
					Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	200.000.000	200.000.000	462.799.060	APBD	100%	1.379.600.000	
					Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	64.899.060,00	APBD	1 Laporan	1.379.600.000	
					Jumlah laporan Tim Persiapan Kegiatan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	91.500.000,00	APBD	1 Laporan	579.600.000	
					Jumlah laporan iklan/reklame, film dan Pemotretan	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	306.400.000,00	APBD	1 Laporan	800.000.000	
2	10	05	201	0005	Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1). Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan	1.200.000.000	1.200.000.000	970.000.000		1 Laporan	1.500.000.000
					Ganti Rugi/Santunan Tanah yang terdampak Pembangunan	Cakupan Ganti Rugi/Santunan Tanah/Kerohiman yang terdampak Pembangunan	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan	1.200.000.000	1.200.000.000	970.000.000		1 Laporan	1.500.000.000

	- Jumlah dokumen Ganti Rugi/Santunan Tanah/Kerohiman yang terdampak Pembangunan	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan	1.100.000.000	1.100.000.000	917.526.960			1 Laporan	1.400.000.000
	- Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan							
	- Jumlah Dokumen Appraisal Penilaian Tanah	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	50.000.000			1 Laporan	80.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
				Kinerja APBD INDUK	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana		Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
				SBLP	STLP	SBLP	SBLP	STLP							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan										
		Jumlah Sertifikasi/ Pembuatan Alas Hak Tanah	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	2.473.040				1 Laporan	20.000.000		
2	10	07		3. PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	3	Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa	KOTA SINGKAWANG	0%	-	-	-	-	78,94%	100.000.000	
2	10	08		4. PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	4	Persentase Luas Potensi Pemanfaatan atas tanah kosong yang sudah diinventarisasi	KOTA SINGKAWANG	0%	-	-	-	-	66,66%	156.060.000	
2	10	09		5 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	5	Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	KOTA SINGKAWANG	0%	-	-	-	-	91,57%	93.203.364	
2	10	10		3. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	3.	Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan	KOTA SINGKAWANG	12%	12%	484.185.180	484.185.180	500.865.180	24%	1.037.250.000	
2	10	10	201	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1	Cakupan Penggunaan/Pemanfaatan Tanah	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	484.185.180	484.185.180	500.865.180	APBD	100%	1.037.250.000
2	10	10	201	0001	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi 1) dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	19 Laporan	20 Laporan	257.080.530	257.080.530	293.480.530	APBD	20 Laporan	482.250.000
2	10	10	201	0002	2) Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk menetapkan Zonasi Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	KOTA SINGKAWANG	2 Dokumen	2 Dokumen	227.104.650	227.104.650	207.384.650	APBD	2 Dokumen	480.000.000
<b>J U M L A H</b>									<b>34.472.152.171</b>	<b>34.472.152.171</b>	<b>42.027.086.584</b>			<b>36.271.653.659</b>	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap usulan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang pada Tahun 2024 dan tetap merujuk pada target RPD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan RKPD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2024, Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan guna mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2024 ini, maka disusun beberapa Program terkait penyelenggaraan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pertanahan. Ada 8 Program, 16 kegiatan dan 54 Sub Kegiatan dengan Rencana Anggaran sebesar Rp. 42.027.086.584 sebagaimana tabel 3.4 (Form Tabel T-C.33

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor. Keluarannya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar serta menyangkut kelayakan dan taraf kesejahteraan kehidupan masyarakat, juga mendorong pertumbuhan perekonomian. Perumahan dan permukiman sangat berkaitan erat dengan sektor pembangunan yang lain sehingga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan paling tidak berkaitan dengan dua hal yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan diusahakan agar masyarakat di manapun mereka bertempat tinggal dapat merasakan lingkungan hidup yang sehat, lebih aman, lebih tertib, dan lebih nyaman. Guna mencapai maksud tersebut diusahakan untuk meningkatkan sarana lingkungan perumahan permukiman/ Prasarana sarana Dasar (PSD) dan prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) baik yang bersifat fisik seperti perumahan, air bersih, dan penyehatan lingkungan permukiman, maupun sarana non fisik seperti adanya peraturan tata ruang, peraturan tata bangunan, pedoman-pedoman pembangunan dan lainnya yang dapat menuju kesejahteraan hidup bersama dalam lingkungan Perumahan dan Permukiman.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024 merupakan pelaksanaan tahun ke 2 (dua) untuk periode Perubahan Renstra Tahun 2023-2026 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang, Disamping itu, Rencana Kerja DISPERKIMTA harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2024, terjalin keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti Rencana Pembangunan Daerah (RPD/Perubahan RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan RKPD Kota Singkawang Tahun 2024.

Yang menjadi catatan penting adalah pada Dokumen Perubahan Renstra DISPERKIMTA Tahun 2023-2026 dan dalam rancangan awal Renja Perubahan Dinas Perumahan permukiman dan Pertanahan kota Singkawang Tahun 2024 terdapat target program yang tidak dapat di penuhi sesuai target Renstra Perubahan DISPERKIMTA Tahun 2023-2026 mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah (APBD) khususnya di Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan yaitu :

#### **1. Program Kawasan Permukiman Kumuh**

- Indikator kinerja Outcome
- 1 Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani, target semula sebesar 53.84%, pada Renja Perubahan Tahun 2024 target menjadi 50.83%.
- 2 Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha), target semula 50% dan dilakukan

penyesuaian kembali.

Program ini meliputi rencana kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.
  - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak layak Huni, dengan indikator output: Jumlah Rumah Tidak Layak huni yang diperbaiki, Target 0 unit.  
Perbaikan Rumah tidak layak huni di fokuskan pada program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, dengan target 34 unit.
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh, target 0%.

## 2. Program Penetapan Tanah Ulayat

- Indikator kinerja Outcome
- 1 Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa, Target 0%

## 3. Program Pengelolaan Tanah Kosong

- Indikator kinerja Outcome
- 1 Persentase Luas Potensi Pemanfaatan atas tanah kosong yang sudah diinventarisasi, Target 0%

## 4. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

- Indikator kinerja Outcome
- 1 Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN), Target 0%

Adapun beberapa Target Capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

### ➤ Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah DISPERKIMTA :

1. Persentase Rumah Layak Huni, Target 99,32%
2. Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha, Target 50,83%
3. Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, Target 100%
4. Kategori Capaian SAKIP, Target BB

### ➤ Target Indikator Kinerja Program (Outcome) Perangkat Daerah DISPERKIMTA :

1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan Terdampak Relokasi Program Pemerintah, target 100%.
2. Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang ditangani, target 55,47%.
- 3a. Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani, Target 50,83%.

- 3b. Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha), target 50%.
- 4a. Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani, target 10,81%.
- 4b. Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha), target 7,57%.
5. Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi, target 100%.
6. Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan, target 100%.
7. Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan, target 12%.

Untuk dapat mewujudkan target capaian kinerja tersebut, Oleh karena itu Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang diharapkan dapat memposisikan diri sebagai Perangkat Daerah yang dapat dipercaya dan mampu merespon masalah-masalah serta dapat melaksanakan program-program prioritas dengan maksimal dalam rangka memberikan pelayanan publik utamanya Pelayanan Dasar secara optimal kepada masyarakat.

Dengan dijabarkannya Renja ini, merupakan penjabaran Operasional Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun anggaran 2024 Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, yang terkait pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar urusan Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman yang menjadi tugas dan fungsi Pada Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman, serta Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pada Bidang Pertanahan.

Demikianlah penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang Tahun anggaran 2024. Masukan yang konstruktif sangat kami harapkan.

Singkawang, 25 Juli 2024

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

Kota Singkawang



**H. AWANG DICKO M, S.Si, MIDS, M.Eng**

Pembina

NIP. 19781209 200604 1 009

*LAMPIRAN*

LAMPIRAN

Tabel 2.1 (Form Tabel T-C.29.)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024 (tahun berjalan)\*

Pemerintah Kota Singkawang

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah	
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2024	Tingkat Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.	04.									
1.	04.	01.								
1.	04.	01.	2.01							
			000 1							
			000 2							
			000 3							
			000 4							
			000 5							





				000 2	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1)	8	Paket	-	2	2	100	2	4	50,00
						Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan									
						2)	400	%		100	100	100	100	200	50,00
				000 3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1)	4	Paket	-	1	1	100	1	2	50,00
				000 5	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1)	4	Paket	-	1	1	100	1	2	50,00
				000 6	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1)	4	Dokumen	-	1	1	100	1	2	50,00
				000 9	Sub Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan luar daerah	1)	48	Laporan	-	12	12	100	12	24	50,00
				001 0	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1)	4	Dokumen	-	1	1	100	1	2	50,00
				001 1	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1)	4	Dokumen	-	1	1	100	1	2	50,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah	
								Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan(n-1) Tahun 2024	Tingkat Realisasi Target Rentra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1.	04.	01.	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400 %	-	100	100	100	100	200	50,00
			000 1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	-	12	12	100	12	24	50,00
			000 2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1)	48 Laporan	-	12	12	100	12	24	50,00
			000 4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan		12	12	100	12	24	50,00
					- Cakupan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	400 %		100	100	100	100	200	50,00
1.	04.	01.	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	400 %	-	100	100	100	100	200	50,00
			000 1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1)	1 Unit/12 bulan	-	1	1	100	1	1	50,00
			000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1)	19 Unit	-	4	4	100	4	8	50,00
			000 9	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		1	1	100	1	2	50,00
			001 0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1) Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Peralatan gedung Kantor) yang dipelihara/direhabilitasi	320 Unit		80	80	100	80	160	50,00

1.	04				URUSAN WAJIB DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
					BIDANG PERUMAHAN RAKYAT											
1.	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah yang ditangani	400	%	-	100	100	100	100	200	50,00
						2	Persentase Pendataan, inventarisasi/identifikasi dan DED Perumahan Permukiman terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah	100	%		50	50	100	-	-	-
1.	04.	02	2.01		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.	Cakupan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	400	%	-	100	100	100	100	200	50,00
				0006	Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1)	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	4	Dokumen	-	1	1	100	1	2	50,00
				0008	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Jumlah Dokumen Bakal Calon Penerima Rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/kota	4	Dokumen	-	-	-	-	1	1	25,00
				0010	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	Jumlah Dokumen Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kab/Kota	4	Dokumen	-	-	-	-	1	1	25,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah	
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2024	Tingkat Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
1 04 02 2 03.	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	400 %	-	-	-	-	100	200	50,00
1 04 02 2 03. 0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1) Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	24 Unit Rumah	-	6	6	-	6	12	50,00

				02	Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1) Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah/Rumah Khusus Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	4	Dokumen	-	1	1	100	-	-	-
				0007	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1) Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	24	Rumah Tangga	-	-	-	-	6	6	25,00
				0008	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang terdampak Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota	1) Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	6	Rumah Tangga	-	-	-	-	1	1	16,67
				0012	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1) Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	4	Unit Rumah	-	2	2	100	1	3	75,00
1.	04	05			<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>1. Persentase Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana, dan Utilities Umum (PSU)</b>	<b>79,27</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>78,52</b>	<b>78,52</b>	<b>99,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						<b>2. Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang ditangani</b>	<b>87,55</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>55,47</b>	<b>70,47</b>	<b>80,49</b>
1.	04.	05	2.01		Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1). Cakupan Perencanaan, Pembangunan/Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilities Umum (PSU) Lingkungan Perumahan	400	%	-	100,00	100	100	100,00	200	50,00
				0001	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1) Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	4	Dokumen	-	1	1	100,00	1	2	50,00
				0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1) Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	125	Lokasi/Paket	-	33	33	100	35	68	50,00
				0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	4	Laporan	-	1	1	100	1	2	50,00
				0010	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	1) Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	4	Laporan	-	1	1	100	1	2	50,00

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah	
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2024	Tingkat Realisasi Target Rentra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
	<b>BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN</b>									
1. 04. 03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>1</b> Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani	69,95 %	-	50,08	50,08	100	53,84	53,84	77,00
		<b>2</b> Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)	100 %	-	25,00	25,00	100	50,00	50,00	50,00
1 04 03 2.01	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	<b>Cakupan Izin/Rumusan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh</b>	200 %	-	-	-	-	100	100	50,00
1 04 03 2.01 0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	2 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	50,00
1 04 03 2.02	<b>Kegiatan Penataan dan Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>Cakupan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	200 %	-	-	-	-	100	100	50,00
1 04 03 2.02 0008	Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	2 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	50,00
1 04 03 2.02 0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
1. 04. 03 2.03	<b>Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>1.</b> Luas Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan infrstruktur Kawasan Peremukimannya	8,63 Ha	-	2	2,00	100	2	4	46,00
		<b>2.</b> Cakupan Penanganan Jumlah Unit RTLH Bagi MBR pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)	400 %	-	100	100	100	100	200	50,00
	01 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1) Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) danDetail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	12 Dokumen	-	4	4	100	-	-	-





						- Jumlah Dokumen Appraisal Penilaian Tanah	4	Dokumen	-	1	1,00	100	1	2,00	50,00
						Jumlah SK Tim Verifikasi, Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah (3 SK Walikota)	1	Dokumen	-	1	1,00	100	-	-	-
						Jumlah Pengumuman dimedia cetak mengenai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	-	1	1,00	100	-	-	-
2	10	08			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	<b>Persentase inventarisasi Tanah Kosong dan Kebijakan Pemanfaatan</b>	<b>400</b>	<b>%</b>	-	100,00	100	100	-	-	-
2	10	08	202		Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Cakupan Inventarisasi/terdata dan kebijakan Pemanfaatan Tanah Kosong	400	%	-	100	100	100	-	-	-
				01	Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong	1) Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	4	Dokumen	0	1	1	100	-	-	-

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Renstra (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun (n-3) Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Renja Perangkat daerah tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah						
					Target Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun (n-2) Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2023		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (n-1) Tahun 2024	Tingkat Realisasi Target Rentra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)					
		Jumlah Draft Peraturan (Perda/Perwako) Pemanfaatan Tanah Kosong yang disusun	1 Dokumen		1	1	100	-	-	-					
		Jumlah Dokumen Survey Lapangan dalam keperluan Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen	0	1	1	100	-	-	-					
2	10	09			<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	<b>Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)</b>	<b>400</b>	<b>%</b>	-	100,00	100	100	-	-	-
2	10	09	201		Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	Cakupan Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara	400	%	-	100	100	100	-	-	-
				01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah.	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	4	Dokumen	4	4,00	100	-	-	-	-
						Jumlah Dokumen Pengukuran Pertanahan (Pendataan PTSL)	4	Dokumen	1	1,00	100	-	-	-	-



						Jumlah Nilai Lahan Wilayah Administrasi - kelurahan di Kota Singkawang yang terinventarisasi	12/4	Kelurahan/ Dokumen	9	9,00	100	3	0	47,37
						Jumlah Dokumen /laporan Konsolidasi - dan Penataan/Pengamanan Tanah Aset Milik Pemerintah Daerah	3	Dokumen	0	0,00	0	1	0,00	0,00
						Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi kegiatan - Pertanahan	1	Dokumen	0	0	0	1	0	0

LAMPIRAN

Tabel 2.2 (Form Tabel T-C.30.)

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

NO	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis	KET
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n)	Tahun (n+1)		
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>														
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar</b>														
<b>A.</b>	<b>Bidang Perumahan Rakyat</b>													
<b>I Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>														
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota.	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0%	100%	100%	100,00%	100,00%		SPM PerumahanRakyat Permen PUPR No: 29/PRT/M/2018
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0%	100%	100%	100,00%	100,00%		SPM PerumahanRakyat Permen PUPR No: 29/PRT/M/2018
3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)		%	91,75%	92,25%	97,97%	98,03%	91,42%	97,91%	99,20%	99,32%	99,43%		Permendagri86/2017
4	Persentase Rumah Layak Huni			91,75%	92,25%	97,97%	98,03%	91,42%	91,42%	99,20%	99,32%	99,43%		IKU - DISPERKIMTA 2023-2026
5	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah yang ditangani			-	-	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%		RENSTRA
6	Persentase Pendataan, inventarisasi/identifikasi dan DED Perumahan Permukiman terdampak Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah			-	-	50%	-	-	-	50%	-	-		RENSTRA
7	Persentase lingkungan Perumahan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)			-	-	78,52%	-	-	-	79,71%	78,77%	79,02		RENSTRA

8	Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan aset PSU) yang ditingkatkan/dipelihara					-	-	15%	-	-	-	45,45%	30%	45%		RENSTRA
9	Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang ditangani					-	-	39,43%	55,47%	-	-	0%	55,47%	71,51%		PERUBAHAN RENSTRA

NO	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis	KET	
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n)	Tahun (n+1)			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2025			
1	2	3	4	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar</b>															
<b>B Bidang Kawasan Permukiman</b>															
10	Persentase Berkurangnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha yang ditangani					-	-	47,74%	-	-	35,02%	47,74%	-	-	RENSTRA
11	Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak huni pada Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 ha yang ditangani					-	-	26%	-	-	0%	26%	-	-	RENSTRA
12	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha yang					-	-	12,5%	-	-	0%	12,5%	-	-	RENSTRA
13	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha					-	-	12,5%	-	-	0%	12,5%	-	-	RENSTRA
14	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni					-	-	1,57%	-	-	0%	1,57%	-	-	RENSTRA
15	Persentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha					-	-	15,06%	-	-	0%	15,06%	-	-	RENSTRA
16	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan		%			-	-	21,05%	24,47%	-	17,64%	21,05%	46,16%	38,63%	IKU KOTA
17	Persentase Penanganan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh					-	-	50,08%	65,14%	-	-	35,02%	50,08%	65,14%	IKU - DISPERKIMTA 2023-2026

18	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani			-	-	50,08%	65,14%	-	-	35,02%	50,08%	65,14%		PERUBAHAN RENSTRA
19	Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani			-	-	5,4%	10,81%	-	-	5,4%	5,4%	10,81%		PERUBAHAN RENSTRA

NO	Indikator	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis	KET
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n)	Tahun (n+1)		
				2021	2022	2023	2024	2022	2022	2023	2024	2025		
1	2	3	4	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>														
<b>C Bidang Pertanahan</b>														
III Pertanahan														
20	Persentase Penyelesaian Konflik Pertanahan			-	-	100%	-	-	-	100%	100%	100%		IKU - DISPERKIMT A 2023-2026
21	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi/ditangani			-	-	100%	-	-	-	100%	100%	100%		RENSTRA
22	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan			-	-	100%	-	-	-	0%	100%	100%		RENSTRA
23	Persentase inventarisasi Tanah Kosong dan Kebijakan Pemanfaatan			-	-	100%	-	-	-	100%	-	66,66%		RENSTRA
24	Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)			-	-	100%	-	-	-	100%	-	91,57%		RENSTRA
25	Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/Hukum Adat/ Kas Desa			-	-	100%	-	-	-	100%	-	78,94%		RENSTRA
26	Persentasi Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan			-	-	34,61%	-	-	-	15,38%	-	24%		RENSTRA
27	Persentase Sistem Informasi Tanah Terpadu yang dipelihara			-	-	100%	-	-	-	100%	-	-		RENSTRA
28	Persentase Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan yang difasilitasi ditangani/diselesaikan			-	-	100%	-	-	-	100%	100%	100%		RENSTRA

29	Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%		IKU - DISPERKIMT A 2023-2026
30	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%		PERUBAHAN RENSTRA
31	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan			-	-	100%	100%	-	-	0%	100%	100%		PERUBAHAN RENSTRA
32	Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/Hukum Adat/ Kas Desa			-	-	-	36,84%	-	-	-	-	78,94%		PERUBAHAN RENSTRA
33	Persentase Luas Potensi Pemanfaatan atas tanah kosong yang sudah di inventarisasi			-	-	-	33,33%	-	-	-	-	66,66%		PERUBAHAN RENSTRA
34	Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)			-	-	79,77%	84,82%	-	-	76,39%	-	91,57%		PERUBAHAN RENSTRA
35	Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan			-	-	7%	12%	-	-	4,99%	-	24%		PERUBAHAN RENSTRA

LAMPIRAN

Tabel 2.16 (Form Tabel T-C.31.)

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				40.082.633.144					40.082.633.144			
	Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan				5.992.886.581					5.992.886.581			
1	1	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	DISPERKIMTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	5.992.886.581	1	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	DISPERKIMTA	1	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	5.992.886.581
1	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	83.837.342	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	1	Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	83.837.342
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan 1) Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	1) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen (Renja/Renja Perubahan)	13.838.810	1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen (Renja/Renja Perubahan)	13.838.810
		2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2) 1 Dokumen (RKA)	4.999.180	2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISPERKIMTA	2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen (RKA)	4.999.180
		3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3) 1 Dokumen (Perubahan RKA)	4.999.652	3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DISPERKIMTA	3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen (Perubahan RKA)	4.999.652
		4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4) 1 Dokumen (DPA)	4.998.760	4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DISPERKIMTA	4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen (DPA)	4.998.760
		5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5) 1 Dokumen (Perubahan DPA)	4.999.180	5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DISPERKIMTA	5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen (Perubahan DPA)	4.999.180

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Iokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Iokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	30.002.300	6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	30.002.300	
			Jumlah Laporan (LKPJ-LPPD, SPM, RFK, PERJANKIN, Realisasi PERJANKIN)	8 Laporan	30.002.300			Jumlah Laporan (LKPJ-LPPD, SPM, RFK, PERJANKIN, Realisasi - PERJANKIN)	8 Laporan	30.002.300	
7)	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	19.999.460	7) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	19.999.460	
			- Jumlah Laporan LAKIP/LKT	1 Laporan	4.999.460			- Jumlah Laporan LAKIP/LKT	1 Laporan	4.999.460	
			- Jumlah Laporan PMPRB	1 Laporan	4.000.000			- Jumlah Laporan PMPRB	1 Laporan	4.000.000	
			Jumlah Laporan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional/Jumlah Laporan Standar Kompetensi Jabatan	1 Laporan	3.500.000			Jumlah Laporan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional/Jumlah Laporan Standar Kompetensi Jabatan	1 Laporan	3.500.000	
			- Jumlah Laporan SPIP	1 Laporan	4.000.000			- Jumlah Laporan SPIP	1 Laporan	4.000.000	
			- Jumlah Laporan Inovasi Daerah	1 Laporan	3.500.000			Jumlah Laporan Inovasi Daerah	1 Laporan	3.500.000	
2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>DISPERKIMTA</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan 2 Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.859.774.994</b>	<b>2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>DISPERKIMTA</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.859.774.994</b>	
1)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISPERKIMTA	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/1 2 Bulan	3.490.107.996	1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DISPERKIMTA	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/1 2 Bulan	3.490.107.996	
2)	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 2) Tugas ASN	DISPERKIMTA	2) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	325.255.720	2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DISPERKIMTA	2) Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	325.255.720	
			Cakupan Jasa administrasi keuangan yang disediakan (Pengelola Keuangan Pengelola Barang, Panitia Pengadaan, - PPK, PPTK, PPHP dan Operator Aplikasi )	1 Dokumen	325.255.720			Cakupan Jasa administrasi keuangan yang disediakan (Pengelola Keuangan Pengelola Barang, Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, PPHP dan Operator Aplikasi )	1 Dokumen	325.255.720	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	11.026.880	3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISPERKIMTA	3) Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	11.026.880	
	4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	11.010.298	4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DISPERKIMTA	4) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	11.010.298	
	5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14.999.540	5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISPERKIMTA	5) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	14.999.540	
	6) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	7.374.560	6) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DISPERKIMTA	6) Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	7.374.560	
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	12.204.900	3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	3) Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	12.204.900	
	1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.002.300	1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DISPERKIMTA	1) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.002.300	
	2) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.196.260	2) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPERKIMTA	2) Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	4.196.260	
	3) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.006.340	3) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPERKIMTA	3) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.006.340	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Administrasi Kepegawaian dan Disiplin Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	80.106.888	4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	4) Cakupan Administrasi Kepegawaian dan Disiplin Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	80.106.888	
	1) Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	30.106.888	1) Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DISPERKIMTA	1) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	30.106.888	

	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 2) Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DISPERKIMTA	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang 1) Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	46 Orang	50.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DISPERKIMTA	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	46 Orang	50.000.000
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Pelayanan Admintrasi Umum Perangkat Daerah	100%	892.085.462	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Pelayanan Admintrasi Umum Perangkat Daerah	100%	892.085.462
	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1)	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.998.300	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.998.300
	2) Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	259.127.800	2) Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	259.127.800
			Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%	259.127.800			Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%	259.127.800
	ATK Perkantoran		Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang disediakan	1 Paket	70.184.580	ATK Perkantoran		Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang disediakan	1 Paket	70.184.580
	Peralatan dan Perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kerja Perkantoran yang disediakan	1 Paket	188.943.220	Peralatan dan Perlengkapan kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kerja Perkantoran yang disediakan	1 Paket	188.943.220
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3)	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	26.841.460	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3)	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	26.841.460
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4)	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.113.740	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4)	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.113.740
7	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5)	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.945.000	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5)	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.945.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 6)	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6)	12 Laporan	551.059.162	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 6)	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6)	12 Laporan	551.059.162	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7)	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7)	-	-	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7)	DISPERKIMTA	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7)	-	0	
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7	DISPERKIMTA	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7	100%	787.502.245	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7	DISPERKIMTA	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7	100%	787.502.245	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 1)	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat 1)	12 Laporan	4.243.120	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 1)	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat 1)	12 Laporan	4.243.120	

	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2)	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2)	12 Laporan	270.542.797	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2)	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2)	12 Laporan	270.542.797
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3)	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3)	12 Laporan	512.716.328	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3)	DISPERKIMTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3)	12 Laporan	512.716.328
			Cakupan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	512.716.328			Cakupan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	512.716.328
	PTT/Tenaga Kontrak-Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	DISPERKIMTA	Jumlah Orang Jasa Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran yang disediakan	14 Orang/1 2 Bulan	445.084.100	- PTT/Tenaga Kontrak-Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	DISPERKIMTA	Jumlah Orang Jasa Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran yang disediakan	14 Orang/1 2 Bulan	445.084.100
	Makanan dan Minuman Rapat/Tamu	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Makanan dan Minuman Tamu/Rapat yang disediakan	1 Paket/12 Bulan	67.632.228	- Makanan dan Minuman Rapat/Tamu	DISPERKIMTA	Jumlah Paket Makanan dan Minuman Tamu/Rapat yang disediakan	1 Paket/12 Bulan	67.632.228

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPERKIMTA	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8	100%	277.374.750	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8	DISPERKIMTA	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8	100%	277.374.750	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1)	DISPERKIMTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1)	4 Unit	119.490.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1)	DISPERKIMTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1)	4 Unit	119.490.000	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	4 unit / 12 Bulan (60 Kali)	104.190.000			- Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	4 unit / 12 Bulan (60 Kali)	104.190.000	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit	15.300.000			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit	15.300.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2)	DISPERKIMTA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2)	1 Unit	99.834.750	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2)	DISPERKIMTA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2)	1 Unit	99.834.750	

	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3)	DISPERKIMTA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Peralatan gedung Kantor) yang dipelihara/direhabilitasi 3)	85 Unit	58.050.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3)	DISPERKIMTA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Peralatan gedung Kantor) yang dipelihara/direhabilitasi 3)	85 Unit	58.050.000
--	---	-------------	--	---------	------------	---	-------------	--	---------	------------

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>											
	<b>BIDANG PERUMAHAN RAKYAT</b>				33.009.747.173					33.009.747.173	
1.	1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	KOTA SINGKAWANG	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah yang ditangani 1	100%	123.067.360	1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	KOTA SINGKAWANG	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dan terdampak Relokasi Program Pemerintah yang ditangani 1	100%	123.067.360	
1	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1	100%	82.388.340	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1	100%	82.388.340	
1)	Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus 1)	1 Dokumen	59.779.820	Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 1)	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus 1)	1 Dokumen	59.779.820	
2)	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1)	1 Dokumen	11.126.980	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 2)	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1)	1 Dokumen	11.126.980	
3)	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1)	1 Dokumen	11.481.540	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 3)	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1)	1 Dokumen	11.481.540	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	40.679.020	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	40.679.020	
1)	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	6 Unit Rumah	28.094.620	1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	6 Unit Rumah	28.094.620	
2)	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah 1) Penyediaan Rumah	3 Rumah Tangga	4.998.920	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah 1) Rumah	3 Rumah Tangga	4.998.920	
3)	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Rumah Tangga yang terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah 1)	1 Rumah Tangga	4.998.920	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Rumah Tangga yang terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah 1)	1 Rumah Tangga	4.998.920	
4)	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi masyarakat yang Terkena relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun 1)	1 Unit Rumah	2.586.560	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi masyarakat yang Terkena relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun 1)	1 Unit Rumah	2.586.560	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>KOTA SINGKAWANG</b>	<b>Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang) yang ditangani</b>	<b>55,47%</b>	<b>32.886.679.813</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>KOTA SINGKAWANG</b>	<b>Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang) yang ditangani</b>	<b>55,47%</b>	<b>32.886.679.813</b>	
1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Perencanaan, Pembangunan/Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilites Umum (PSU) Lingkungan Perumahan	100%	32.886.679.813	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Perencanaan, Pembangunan/Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilites Umum (PSU) Lingkungan Perumahan	100%	32.886.679.813	
	1) Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	316.483.440	1) Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	KOTA SINGKAWANG	1) Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	316.483.440	
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	KOTA SINGKAWANG	- Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	316.483.440	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	KOTA SINGKAWANG	- Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	316.483.440	
	2) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	237 Lokasi/Paket	32.394.268.793	2) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	237 Lokasi/Paket	32.394.268.793	
	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan (jalan dan drainase Lingkungan Perumahan)	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PSU lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang sudah menyerahkan Aset PSU yang terfasilitasi PSU	100%	32.394.268.793	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan (jalan dan drainase Lingkungan Perumahan)	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PSU lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang sudah menyerahkan Aset PSU yang terfasilitasi PSU	100%	32.394.268.793	
	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan (jalan dan drainase Lingkungan Perumahan)	KOTA SINGKAWANG	Jumlah lokasi PSU lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	237 Lokasi/Paket	32.394.268.793	Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan (jalan dan drainase Lingkungan Perumahan)	KOTA SINGKAWANG	Jumlah lokasi PSU lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	237 Lokasi/Paket	32.394.268.793	
	3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	21.943.000			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	21.943.000	

4)	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	153.984.580	4)	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	153.984.580
----	--	-----------------	--	-----------	-------------	----	--	-----------------	--	-----------	-------------

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>											
	<b>BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN</b>				1.079.999.390					1.079.999.390	
3.	3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	KOTA SINGKAWANG	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan 1.1 Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani	50,83%	196.187.780	3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	KOTA SINGKAWANG	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan 1.1 Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani	50,83%	196.187.780	
			Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha) 1.2	50,0%	0			Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha) 1.2	50%	0	
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Singkawang	Luas Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan 1.1 infrastruktur Kawasan Peremukimannya	0,1 Ha	196.187.780	3 Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Singkawang	Luas Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan 1.1 infrastruktur Kawasan Peremukimannya	0,1 Ha	196.187.780	
	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 1) Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	38.745.520	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 1) Pemukiman Kumuh	1 Laporan	38.745.520	
	2) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	1) Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	157.442.260	2) Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	1) Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	157.442.260	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	KOTA SINGKAWANG	1.1 Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani	10,81%	883.811.610	4.	KOTA SINGKAWANG	1.1 Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani	10,81%	883.811.610	
			2.2 Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)	7,57%	883.811.610			2.2 Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)	7,57%	883.811.610	
1.	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	1.1 Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	5 Ha	883.811.610	1.	Kota Singkawang	1.1 Luas Area Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota	5 Ha	883.811.610	
			1.2 Cakupan Penanganan jumlah Unit RTLH bagi MBR untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh diluar kawasan permukiman kumuh	100%	883.811.610			1.2 Cakupan Penanganan jumlah Unit RTLH bagi MBR untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh diluar kawasan permukiman kumuh	100%	883.811.610	
	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Singkawang	1) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	34 Unit	883.811.610	1)	Kota Singkawang	1) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	34 Unit	883.811.610	
		Kota Singkawang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi/Pembangunan baru	34 Unit	883.811.610		Kota Singkawang	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni MBR yang mendapat bantuan Rehabilitasi/Pembangunan baru	34 Unit	883.811.610	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERTANAHAN										
	BIDANG PERTANAHAN					1.944.453.440				1.944.453.440	
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	KOTA SINGKAWANG	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi	100%	10.789.200	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	KOTA SINGKAWANG	Persentase Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi	100%	10.789.200	
1	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah/ Kota.	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi/ditangani	100%	10.789.200	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah/ Kota.	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Sengketa Tanah Garapan yang difasilitasi/ditangani	100%	10.789.200	
1)	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen/Berita Acara	10.789.200	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen/Berita Acara	10.789.200	
2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	KOTA SINGKAWANG	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	1.432.799.060	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	KOTA SINGKAWANG	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	1.432.799.060	
1	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	462.799.060	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Rugi/Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	462.799.060	
1)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	462.799.060	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	462.799.060	
		KOTA SINGKAWANG	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah # Daerah Kabupaten/Kota	100%	64.899.060		KOTA SINGKAWANG	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	64.899.060	

		KOTA SINGKAWANG	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	1 Dokumen	64.899.060		KOTA SINGKAWANG	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	1 Dokumen	64.899.060	
		KOTA SINGKAWANG	Jumlah laporan Tim Persiapan Kegiatan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah	1 Laporan	91.500.000		KOTA SINGKAWANG	Jumlah laporan Tim Persiapan Kegiatan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah	1 Laporan	91.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Iokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatif (Rp)	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Iokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		KOTA SINGKAWANG	Jumlah laporan iklan/reklame, film dan Pemetretan	1 Laporan	306.400.000		KOTA SINGKAWANG	Jumlah laporan iklan/reklame, film dan Pemetretan	1 Laporan	306.400.000	
	Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1 Laporan	970.000.000	Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1 Laporan	970.000.000	
			Cakupan Ganti Rugi/Santunan Tanah/Kerohiman yang # terdampak Pembangunan	100%	970.000.000			Cakupan Ganti Rugi/Santunan Tanah/Kerohiman yang # terdampak Pembangunan	100%	970.000.000	
			Jumlah dokumen Ganti Rugi/Santunan Tanah/Kerohiman yang terdampak Pembangunan	1 Laporan	917.526.960			Jumlah dokumen Ganti Rugi/Santunan Tanah/Kerohiman yang terdampak Pembangunan	1 Laporan	917.526.960	
			Jumlah Dokumen Appraisal Penilaian Tanah	1 Laporan	50.000.000			Jumlah Dokumen Appraisal Penilaian Tanah	1 Laporan	50.000.000	
			Jumlah Sertifikasi/ Pembuatan Alas Hak Tanah	1 Laporan	2.473.040			Jumlah Sertifikasi/ Pembuatan Alas Hak Tanah	1 Laporan	2.473.040	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Pagu Dana Indikatiff (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian 2024	Kebutuhan Dana / (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	KOTA SINGKAWANG	Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa	0%		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	KOTA SINGKAWANG	Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa	0%	0	
										0	
4.	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	KOTA SINGKAWANG	Persentase Luas Potensi Pemanfaatan atas tanah kosong yang sudah diinventarisasi	0%		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	KOTA SINGKAWANG	Persentase Luas Potensi Pemanfaatan atas tanah kosong yang sudah diinventarisasi	0%	0	
5.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	KOTA SINGKAWANG	Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	0%		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	KOTA SINGKAWANG	Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	0%	0	
6.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	KOTA SINGKAWANG	Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan	12%	500.865.180	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	KOTA SINGKAWANG	Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan	12%	500.865.180	
1	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Penggunaan/Pemanfaatan Tanah	100%	500.865.180	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Cakupan Penggunaan/Pemanfaatan Tanah	100%	500.865.180	
1)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	20 Laporan	293.480.530	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	20 Laporan	293.480.530	
2)	Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk menetapkan Zonasi Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	2 Dokumen	207.384.650	Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk menetapkan Zonasi Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	2 Dokumen	207.384.650	
			<b>JUMLAH</b>		<b>42.027.086.584</b>			<b>JUMLAH</b>		<b>42.027.086.584</b>	

LAMPIRAN

Tabel 3.4 (Form Tabel T-C.33.)

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 (Perubahan) dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
Pemerintah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat**

**Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Kinerja APBD INDUK	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana		Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
				SBLP	STLP	SBLP	SBLP	STLP					
				5	6	7	8	9	10		11	12	13
1.04.		URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			32.577.177.791	32.577.177.791	40.082.633.144					31.604.200.295	
		Sekretariat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan			5.819.349.153	5.819.349.153	5.992.886.581					7.340.896.268	
1.04.01.		1. PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	1. Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DISPERKIMTA	100%	100%	5.819.349.153	5.819.349.153	5.992.886.581	APBD		100%	7.340.896.268
1.04.01.2.01.		1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	100%	100%	83.837.342	83.837.342	83.837.342	APBD		100%	70.000.000
1.04.01.2.01.0001		1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	2 Dokumen (Renja/Renja Perubahan)	2 Dokumen (Renja/Renja Perubahan)	13.838.810	13.838.810	13.838.810	APBD		2 Dokumen (Renja/Renja Perubahan)	8.000.000
1.04.01.2.01.0002		2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen (RKA)	1 Dokumen (RKA)	4.999.180	4.999.180	4.999.180	APBD		1 Dokumen	5.000.000
1.04.01.2.01.0003		3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1) dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen (Perubahan RKA)	1 Dokumen (Perubahan RKA)	4.999.652	4.999.652	4.999.652	APBD		1 Dokumen (Perubahan RKA)	5.000.000
1.04.01.2.01.0004		4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen (DPA)	1 Dokumen (DPA)	4.998.760	4.998.760	4.998.760	APBD		1 Dokumen (DPA)	5.000.000
1.04.01.2.01.0005		5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1) dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen (Perubahan DPA)	1 Dokumen (Perubahan DPA)	4.999.180	4.999.180	4.999.180	APBD		1 Dokumen	5.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Kinerja APBD INDUK	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
				SBLP	STLP	SBLP	SBLP	STLP	10		11	12
1.04.01.2.01.0006	6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DISPERKIMTA	8 Laporan	8 Laporan	30.002.300	30.002.300	30.002.300	APBD		8 Laporan	20.000.000
	Laporan (LPPD-LKPJ, SPM, Perjanjian Kinerja, Realisasi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Fisik dan Keuangan, MRI, Probis, Evaluasi Renja)	Jumlah Laporan (LPPD-LKPJ, SPM, Perjanjian Kinerja, Realisasi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Fisik dan Keuangan, MRI, Probis, Evaluasi Renja)	DISPERKIMTA	8 Laporan	8 Laporan	30.002.300	30.002.300	30.002.300	APBD		8 Laporan	20.000.000
1.04.01.2.01.0007	7) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	5 Laporan	5 Laporan	19.999.460	19.999.460	19.999.460	APBD		5 Laporan	22.000.000
	- Laporan LAKIP/LKT	Jumlah Laporan LAKIP/LKT	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	4.999.460	4.999.460	4.999.460	APBD		1 Laporan	5.000.000
	- Laporan PMPRB	Jumlah Laporan PMPRB	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	APBD		1 Laporan	4.500.000
	- Laporan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional	Jumlah Laporan Evaluasi Jabatan Struktural dan Fungsional/Jumlah Laporan Standar Kompetensi Jabatan	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	APBD		1 Laporan	4.000.000
	- Laporan Standar Kompetensi Jabatan	Jumlah Laporan SPIP	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	APBD		1 Laporan	4.500.000
	Laporan Inovasi Daerah	Jumlah Laporan Inovasi Daerah	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	3.500.000	3.500.000	3.500.000	APBD		1 Laporan	4.000.000
1.04.01.2.02	2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	100%	100%	3.748.054.994	3.748.054.994	3.859.774.994			100%	4.698.893.938
1.04.01.2.02.0001	1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DISPERKIMTA	36 Orang/12 Bulan	32 Orang/12 Bulan	3.490.107.996	3.490.107.996	3.490.107.996	APBD		32 Orang/12 Bulan	4.304.157.332
1.04.01.2.02.0002	2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	213.535.720	213.535.720	325.255.720	APBD		1 Dokumen	372.236.606
	Jasa administrasi keuangan yang disediakan (Pengelola Keuangan Pengelola Barang, Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, PPHP dan Operator Aplikasi)	Cakupan Jasa administrasi keuangan yang disediakan (Pengelola Keuangan Pengelola Barang, Panitia Pengadaan, PPK, PPTK, PPHP dan Operator Aplikasi)	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	213.535.720	213.535.720	325.255.720	APBD		1 Dokumen	372.236.606
1.04.01.2.02.0003	3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	11.026.880	11.026.880	11.026.880	APBD		1 Dokumen	6.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan	lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Kinerja APBD	Kinerja	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber		Target Capaian	Kebutuhan Dana /

1					Daerah dan Program / Kegiatan	(Output)	4	INDUK	Perubahan	SBLP	SBLP	STLP	Dana	Penting	Target Capain	Pagu Indikatif
								SBLP	STLP							
1	04.	01	2.02	0004	4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	11.010.298	11.010.298	11.010.298	APBD		1 Dokumen	6.000.000
1.	04.	01	2.02	0005	5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1) Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	14.999.540	14.999.540	14.999.540	APBD		1 Laporan	10.500.000
1.	04.	01	2.02	0006	6) Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1) Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	7.374.560	7.374.560	7.374.560	APBD		-	-
1.	04.	01	2.03		3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3) Cakupan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	100%	100%	12.204.900	12.204.900	12.204.900			100%	30.700.000
1.	04.	01	2.03	0001	1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1) Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	4.002.300	4.002.300	4.002.300	APBD		1 Dokumen	4.000.000
1.	04.	01	2.03	0005	2) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1) Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPERKIMTA	12 Laporan	12 Laporan	4.196.260	4.196.260	4.196.260	APBD		12 Laporan	4.200.000
1.	04.	01	2.03	0006	3) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DISPERKIMTA	1 Laporan	1 Laporan	4.006.340	4.006.340	4.006.340	APBD		1 Laporan	4.000.000
1.	04.	01	2.05		4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4) Cakupan Administrasi Kepegawaian dan Disiplin Kepegawaian Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	0%	100%	-	-	80.106.888			100%	116.000.000
1.	04.	01	2.05	0002	1) Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	DISPERKIMTA	0%	1 Paket	-	-	30.106.888	APBD		-	-

1					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Kinerja APBD INDUK	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana		Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	04.	01	2.05	0009	2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DISPERKIMTA	0%	46 Orang	-	-	50.000.000	APBD		46 Orang	116.000.000
1.	04.	01	2.06		5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4) Cakupan Pelayanan Admintrasi Umum Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	100%	100%	757.974.922	757.974.922	892.085.462			100%	752.239.421

1.	04.	01	2.06	0001	Sub Kegiatan Penyediaan 1) komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi 1) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket	24.998.300	24.998.300	24.998.300	APBD		1 Paket	31.738.026
1.	04.	01	2.06	0002	2) Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DISPERKIMTA	2 Paket	2 Paket	163.808.780	163.808.780	259.127.800	APBD		2 Paket	192.316.930
						# Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	DISPERKIMTA	100%	100%	163.808.780	163.808.780	259.127.800	APBD		100%	192.316.930
					- ATK Perkantoran	- Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang disediakan	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket	69.894.940	69.894.940	70.184.580	APBD		1 Paket	82.066.930
					- Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kerja Perkantoran yang disediakan	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket	93.913.840	93.913.840	188.943.220	APBD		1 Paket	110.250.000
1.	04.	01	2.06	0003	3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket	26.841.460	26.841.460	26.841.460	APBD		1 Paket	48.332.233
1.	04.	01	2.06	0005	4) Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1) Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DISPERKIMTA	1 Paket	1 Paket	28.311.740	28.311.740	21.113.740	APBD		1 Paket	36.071.132
1.	04.	01	2.06	0006	5) Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DISPERKIMTA	1 Dokumen	1 Dokumen	8.945.000	8.945.000	8.945.000	APBD		1 Dokumen	10.781.100
1.	04.	01	2.06	0009	6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DISPERKIMTA	12 Laporan	12 Laporan	501.059.162	501.059.162	551.059.162	APBD		12 Laporan	425.000.000
1.	04.	01	2.06	0010	7) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DISPERKIMTA	1 Dokumen	0 Dokumen	4.010.480	4.010.480	-	APBD		1 Dokumen	4.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
				Kinerja APBD INDUK	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana		Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
				SBLP	STLP	SBLP	SBLP	STLP								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.	04.	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang 6 Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Prasarana sarana 5 operasional/kendaraan operasional Perangkat Daerah	DISPERKIMTA	0%	-	-	-	-	-	-	100%	130.000.000
1.	04.	01	2.07	0002	1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1) Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	DISPERKIMTA	0%	-	-	-	-	-	-	6 Unit	80.000.000
1.	04.	01	2.07	0005	2) Sub Kegiatan Pengadaan Meubeleur	1) Jumlah Mebel yang diadakan	DISPERKIMTA	0%	-	-	-	-	-	-	5 Unit	50.000.000
1.	04.	01	2.08		7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DISPERKIMTA	100%	100%	839.902.245	839.902.245	787.502.245			100%	860.322.615
1.	04.	01	2.08	0001	1) Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DISPERKIMTA	12 Laporan	12 Laporan	4.243.120	4.243.120	4.243.120	APBD		12 Laporan	4.678.304
1.	04.	01	2.08	0002	2) Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISPERKIMTA	12 Laporan	12 Laporan	290.542.797	290.542.797	270.542.797	APBD		12 Laporan	296.001.905





1.	04.	05			2.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1	Persentase Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) Lingkungan Perumahan (perumahan Pengembang) yang ditangani	KOTA SINGKAWANG	55,47%	55,47%	25.364.345.400	25.364.345.400	32.886.679.813	APBD		71,51%	11.073.300.701
1.	04.	05	2.01		1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1	Cakupan Perencanaan, Pembangunan/Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilites Umum (PSU) Lingkungan Perumahan	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	25.364.345.400	25.364.345.400	32.886.679.813	APBD		100%	11.073.300.701
1.	04.	05	2.01	0001	1)	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1)	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	KOTA SINGKAWANG	1 Dokumen	3 Dokumen	366.483.440	366.483.440	316.483.440	APBD		1 Dokumen	150.000.000
						Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	KOTA SINGKAWANG	1 Dokumen	3 Dokumen	366.483.440	366.483.440	316.483.440	APBD		1 Dokumen	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
				Kinerja APBD INDUK	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana		Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				
				SBLP	STLP	SBLP	SBLP	STLP	10		11	12	13			
				5	6	7	8	9								
1.	04.	05	2.01	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	KOTA SINGKAWANG	189 Lokasi/Paket	237 Lokasi/Paket	24.821.934.380	24.821.934.380	32.394.268.793	APBD		20 Lokasi/Paket	10.723.300.701
					Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan (jalan dan drainase Lingkungan Perumahan)	Cakupan Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan * Prasarana dan Sarana PSU lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang yang sudah menyerahkan Aset PSU) yang terfasilitasi PSU	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	24.821.934.380	24.821.934.380	32.394.268.793	APBD		100%	10.723.300.701
					Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumahan (jalan dan drainase Lingkungan Perumahan)	Jumlah lokasi PSU lingkungan Perumahan (Perumahan Pengembang) yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara	KOTA SINGKAWANG	189 Lokasi/Paket	237 Lokasi/Paket	24.821.934.380	24.821.934.380	32.394.268.793	APBD		20 Lokasi/Paket	10.723.300.701
1.	04.	05	2.01	0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan	21.943.000	21.943.000	21.943.000	APBD		1 Laporan	25.000.000
1.	04.	05	2.01	0010	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan	153.984.580	153.984.580	153.984.580	APBD		1 Dokumen	175.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Kinerja APBD INDUK	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana		Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
				SBLP	STLP	SBLP	SBLP	STLP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.04.	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN					1.049.999.570	1.049.999.570	1.079.999.390				12.290.003.326	
1.04.03	3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.1 Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh (dengan Luas di Bawah 10 Ha) yang ditangani	KOTA SINGKAWANG	65,14%	50,83%	239.060.930	239.060.930	196.187.780				83,51%	8.290.003.326
		1.2 Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)		50%	50%	-						75%	892.000.000
1.04.03.2.03	Kegiatan Peningkatan Kualitas 1. Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.1 Luas Permukiman Kumuh yang Ditingkatkan infrstruktur Kawasan Permukimannya	Kota Singkawang	2 Ha	0,1 Ha	239.060.930	239.060.930	196.187.780	APBD			2,44 Ha	8.040.003.326
		1.2 Cakupan Penanganan Jumlah Unit RTLH Bagi MBR pada Kawasan Permukiman Kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)	Kota Singkawang	100%	100%	-			APBD			100%	892.000.000
1.04.03.2.03.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 1) Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 1) Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kota Singkawang	1 Laporan	1 Laporan	85.035.950	85.035.950	38.745.520	APBD			1 Laporan	85.000.000
1.04.03.2.03.0007	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	1) Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Kota Singkawang	1 Dokumen	1 Dokumen	154.024.980	154.024.980	157.442.260	APBD			1 Dokumen	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
				Kinerja APBD INDUK	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana		Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
				SBLP	STLP	SBLP	SBLP	STLP	10		11	12	13
1	04	04											
		4. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH											
		1.1 Persentase Luas Area Pencegahan Perumahan dan Permukiman yang Berpotensi Kumuh di Luar Kawasan Kumuh (dengan Luas di bawah 10 Ha) yang ditangani	KOTA SINGKAWANG	10,81%	10,81%	810.938.640	810.938.640	883.811.610				16,21%	4.000.000.000
		1.2 Persentase Penanganan Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar kawasan permukiman kumuh (dengan luas dibawah 10 Ha)		7,57%	7,57%	810.938.640	810.938.640	883.811.610				11,36%	4.000.000.000
1	04	04	2.01										
		1. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	5 Ha	5 Ha	810.938.640	810.938.640	883.811.610	APBD			5 Ha	4.000.000.000
		1.2 Cakupan Penanganan jumlah Unit RTLH bagi MBR untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh diluar kawasan permukiman kumuh		100%	100%	810.938.640	810.938.640	883.811.610	APBD			100%	4.000.000.000
1	04	04	2.01	01									
		1) Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Singkawang	33 Unit	34 Unit	810.938.640	810.938.640	883.811.610	APBD			33 Unit	4.000.000.000
		1) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki											



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
				Kinerja APBD INDUK	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana		Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
				SBLP	STLP	SBLP	SBLP	STLP							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	10	05	201	0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	462.799.060	APBD	1 Dokumen	1.379.600.000
					Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	200.000.000	200.000.000	462.799.060	APBD	100%	1.379.600.000	
					Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	64.899.060,00	APBD	1 Laporan	1.379.600.000	
					Jumlah laporan Tim Persiapan Kegiatan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	91.500.000,00	APBD	1 Laporan	579.600.000	
					Jumlah laporan iklan/reklame, film dan Pemetretan	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	306.400.000,00	APBD	1 Laporan	800.000.000	
2	10	05	201	0005	Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1). Jumlah laporan penyelesaian permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan	1.200.000.000	1.200.000.000	970.000.000		1 Laporan	1.500.000.000
					Ganti Rugi/Santunan Tanah yang terdampak Pembangunan	Cakupan Ganti Rugi/Santunan Tanah/Kerohiman yang terdampak Pembangunan	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan	1.200.000.000	1.200.000.000	970.000.000		1 Laporan	1.500.000.000

	Jumlah dokumen Ganti Rugi/Santunan Tanah/Kerohiman yang terdampak Pembangunan	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan	1.100.000.000	1.100.000.000	917.526.960			1 Laporan	1.400.000.000
	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan							
	Jumlah Dokumen Appraisal Penilaian Tanah	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	50.000.000			1 Laporan	80.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
				Kinerja APBD Induk	Kinerja Perubahan	APBD Induk	Pergeseran	Rencana Perubahan	Sumber Dana		Target Capain	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
				SBLP	STLP	SBLP	SBLP	STLP						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan									
		Jumlah Sertifikasi/ Pembuatan Alas Hak Tanah	KOTA SINGKAWANG	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	50.000.000	2.473.040			1 Laporan	20.000.000		
2	10	07	3. PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	3	Persentase Terdatanya Jumlah Tanah Ulayat/ Hukum Adat/ Kas Desa	KOTA SINGKAWANG	0%	-	-	-	-	78,94%	100.000.000	
2	10	08	4. PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	4	Persentase Luas Potensi Pemanfaatan atas tanah kosong yang sudah diinventarisasi	KOTA SINGKAWANG	0%	-	-	-	-	66,66%	156.060.000	
2	10	09	5 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	5	Persentase Terdatanya/Tertib Administrasi Data Pertanahan Mengenai Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)	KOTA SINGKAWANG	0%	-	-	-	-	91,57%	93.203.364	
2	10	10	3. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	3.	Persentase Luas Wilayah Yang Sudah Terpetakan	KOTA SINGKAWANG	12%	12%	484.185.180	484.185.180	500.865.180	24%	1.037.250.000	
2	10	10	201	1	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	KOTA SINGKAWANG	100%	100%	484.185.180	484.185.180	500.865.180	APBD	100%	1.037.250.000
2	10	10	201	0001	1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	KOTA SINGKAWANG	19 Laporan	20 Laporan	257.080.530	257.080.530	293.480.530	APBD	20 Laporan	482.250.000

2	10	10	201	0002	2) Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk menetapkan Zonasi Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya 1)	KOTA SINGKAWANG	2 Dokumen	2 Dokumen	227.104.650	227.104.650	207.384.650	APBD	2 Dokumen	480.000.000
					<b>J U M L A H</b>					<b>34.472.152.171</b>	<b>34.472.152.171</b>	<b>42.027.086.584</b>			<b>36.271.653.659</b>

Tabel. 5.1

**MAPING/PERSANDINGAN DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN  
RENJA TAHUN 2024**

**DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

NO.	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (BERDASARKAN KEMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021)	NO.	KODE	PROGRAM, KEGIATAN (SETELAH PEMUTAKHIRAN)	KET
<b>SEKRETARIAT DISPERKIMTA</b>						
1	1.04.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1	1.04.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
1)	1.04.01.2.01	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	1)	1.04.01.2.01	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
-	1.04.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	1.04.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
-	1.04.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1.04.01.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
-	1.04.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1.04.01.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
-	1.04.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	1.04.01.2.01.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	
-	1.04.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	1.04.01.2.01.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
-	1.04.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	1.04.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
-	1.04.01.2.01.07	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	-	1.04.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2)	1.04.01.2.02.	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	2)	1.04.01.2.02	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
-	1.04.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	1.04.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
-	1.04.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	1.04.01.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
-	1.04.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	1.04.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
-	1.04.01.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	1.04.01.2.02.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
-	1.04.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1.04.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
-	1.04.01.2.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	1.04.01.2.02.0006	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
-	1.04.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	1.04.01.2.02.0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
3)	1.04.01.2.03	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	3)	1.04.01.2.03	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
-	1.04.01.2.03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan	-	1.04.01.2.03.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan	

		Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
-	1.04.01.2.03.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		-	1.04.01.2.03.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
-	1.04.01.2.03.05	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	1.04.01.2.03.0005	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
-	1.04.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	1.04.01.2.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4)	1.04.01.2.05	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	4)	1.04.01.2.05	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
-	1.04.01.2.05.01	Sub kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		-	1.04.01.2.05.0001	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
-	1.04.01.2.05.02	Pengadaan Mesin /Kartu Absensi berbasis online		-	1.04.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
-	1.04.01.2.05.09	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		-	1.04.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5)	1.04.01.2.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	5)	1.04.01.2.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	

NO.	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (BERDASARKAN KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021)	NO.	KODE	PROGRAM, KEGIATAN (SETELAH PEMUTAKHIRAN)	KET
-	1.04.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	1.04.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
-	1.04.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	1.04.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
-	1.04.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	1.04.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
-	1.04.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	1.04.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
-	1.04.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	1.04.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
-	1.04.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	-	1.04.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
-	1.04.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1.04.01.2.06.0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
-	1.04.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1.04.01.2.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
6)	1.04.01.2.07	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	6)	1.04.01.2.07	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
-	1.04.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	1.04.01.2.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
-	1.04.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Meubeler	-	1.04.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
7)	1.04.01.2.08	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	7)	1.04.01.2.08	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
-	1.04.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	-	1.04.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
-	1.04.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	1.04.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
-	1.04.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	1.04.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
8)	1.04.01.2.09	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	8)	1.04.01.2.09	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
-	1.04.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	1.04.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
-	1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	1.04.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
-	1.04.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	1.04.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
-	1.04.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	1.04.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NO.	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (BERDASARKAN KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021)	NO.	KODE	PROGRAM, KEGIATAN (SETELAH PEMUTAKHIRAN)	KET
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						
2	1.04.02.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	2	1.04.02.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	
1)	1.04.02.2.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1)	1.04.02.2.01	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

	1.04.02.2.01.01	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.04.02.2.01.0007	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				1.04.02.2.01.0009	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
	1.04.02.2.01.02	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		1.04.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
	1.04.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		1.04.02.2.01.0004	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
	1.04.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.04.02.2.01.0008	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				1.04.02.2.01.0010	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
	1.04.02.2.01.05	Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		1.04.02.2.01.0006	Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
2)	1.04.02.2.03	<b>Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	2)	1.04.02.2.03	<b>Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota</b>	
	1.04.02.2.03.01	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		1.04.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
	1.04.02.2.03.02	Sub Kegiatan Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			TIDAK DITEMUKAN di SIPD RI	
	1.04.02.2.03.04	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		1.04.02.2.03.0004	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
	1.04.02.2.03.05	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		1.04.02.2.03.0011	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				1.04.02.2.03.0012	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
3	1.04.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	3	1.04.05.	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	
1)	1.04.05.2.01.	<b>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	1)	1.04.05.2.01	<b>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	
	1.04.05.2.01.01	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		1.04.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
	1.04.05.2.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		1.04.05.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
	1.04.05.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		1.04.05.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
	04.05.2.01.03.05	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang		1.04.05.2.01.0010	Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
4	1.04.03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	4	1.04.03	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	
1)	1.04.03.2.01	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	1)	1.04.03.2.01	<b>Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	

	1.04.03.2.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pengembangan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh			TIDAK DITEMUKAN di SIPD RI	
<b>NO.</b>	<b>KODE</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (BERDASARKAN KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021)</b>	<b>NO.</b>	<b>KODE</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN (SETELAH PEMUTAKHIRAN)</b>	<b>KET</b>
	1.04.03.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh		1.04.02.2.06.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
2)	1.04.03.2.02	<b>Kegiatan Penataan dan Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	2)	1.04.03.2.02	<b>Kegiatan Penataan dan Peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	
	1.04.03.2.02.01	Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.02.0014	Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
	1.04.03.2.02.05	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.03.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
3)	1.04.03.2.03	<b>Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	3)	1.04.03.2.03	<b>Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	
	1.04.03.2.03.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh			TIDAK DITEMUKAN di SIPD RI	
	1.04.03.2.03.02	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		1.04.03.2.03.0002	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
	1.04.03.2.03.023	Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		1.04.03.2.03.0003	Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
	1.04.03.2.03.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.03.0004	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
	1.04.03.2.03.05	Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh			TIDAK DITEMUKAN di SIPD RI	
	1.04.03.2.03.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.03.0013	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
	1.04.03.2.03.07	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.03.0007	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
5	1.04.04	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	5	1.04.04	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	BARU
1)	1.04.04.2.01	<b>Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	1)	1.04.04.2.01	<b>Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	1.04.04.2.01.01	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		1.04.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
	1.04.04.2.01.02	Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		1.04.03.2.03.0003	TIDAK DITEMUKAN di SIPD RI	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
1	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
1)	2.10.04.2.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah/ Kota.	1)	2.10.04.2.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	2.10.04.2.01.01	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.		2.10.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	2.10.04.2.01.02	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.		2.10.04.2.01.0002	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
1)	2.10.05.2.01	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1)	2.10.05.2.01	Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NO.	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (BERDASARKAN KEMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021)	NO.	KODE	PROGRAM, KEGIATAN (SETELAH PEMUTAKHIRAN)	KET
	2.10.05.2.01.01	Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.		2.10.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	2.10.05.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.		2.10.05.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
3	2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	3	2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	
1)	2.10.07.2.01	Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1)	2.10.07.2.01	Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	2.10.07.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2.10.07.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
4	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	4	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	
1)	2.10.08.2.01	Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	1)	2.10.08.2.01	Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	
	2.10.08.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.		2.10.08.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
2)	2.10.08.2.02	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	2)	2.10.08.2.02	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	
	2.10.08.2.02.02	Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong		2.10.08.2.02.0002	Sub Kegiatan Pemanfaatan Tanah Kosong	

NO.	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (BERDASARKAN KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021)	NO.	KODE	PROGRAM, KEGIATAN (SETELAH PEMUTAKHIRAN)	KET
5	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	5	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	
1)	2.10.09.2.01	Kegiatan Penertiban Izin Membuka Tanah	1)	2.10.09.2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah	
-	2.10.09.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah.	-	2.10.09.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	
-	2.10.09.2.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara.	-	2.10.09.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	
6	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	6	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
1)	2.10.10.2.01	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1)	2.10.10.2.01	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	
-	2.10.10.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	-	2.10.10.2.01.0001	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	
-	2.10.10.2.01.02	Sub Kegiatan Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	2.10.10.2.01.0002	Sub Kegiatan Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	
-	2.10.10.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	-	2.10.10.2.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	